



Garam untuk Negeri

Perjalanan Sejarah PT Garam (Persero)



Garam untuk Negeri

Perjalanan Sejarah PT Garam (Persero)

Penulis

Imam Hidayah, Badru Tamam Alwahdi

BP No. 6719

No. KDT. 081

ISBN 978-602-260-174-6

21 x 21 cm

158 hlm.

Penata Letak

Irene Anggraini

Perancang Sampul

Ato Hermawan

Diterbitkan oleh

Penerbitan dan Percetakan

Balai Pustaka

Jalan Bunga No. 8–8A

Matraman, Jakarta 13140

Tel. (6221) 8583369, Faks. (6221) 29622129

Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

Balai Pustaka bekerja sama dengan PT Garam (Persero)

Cetakan Pertama: 2019

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2:

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Untuk para pendahulu, mereka yang menyerahkan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Tanah Airnya.

Untuk generasi yang akan datang, mereka yang sigap bergerak bersama untuk kemajuan Tanah Airnya.



Daftar Isi

Jejak Langkah PT Garam (Persero)	6	Bagian III: Transformasi Menuju PN Garam	72
Sambutan Komisaris Utama PT Garam (Persero)	8	Perusahaan Garam dan Soda Negeri	74
Sambutan Direktur Utama PT Garam (Persero)	10	Berakhirnya Monopoli Garam	78
Bagian I: Dalam Tiga Era	12	Perusahaan Negara Garam	82
Kuasa Garam di Tangan Raja Madura	14	Restrukturisasi Perusahaan	88
Dalam Genggaman Belanda	20	Bagian IV: Transformasi dari Perum Garam menjadi	
Berdirinya Jawatan Regie Garam		PT Garam	97
di Hindia Belanda	27	Perusahaan Umum Garam	98
Perusahaan Garam pada Masa Penjajahan		Optimalisasi Lahan dan Penambahan Armada	104
Jepang	37	Di Awal Pendirian PT Garam (Persero)	110
Bagian II: Ke Pangkuan Ibu Pertiwi	42	Bagian V: Menuju Bisnis Berkelanjutan	115
Penguasaan Jawatan Regie Tjandu dan Garam		Perubahan untuk Masa Depan	116
ke Pangkuan Indonesia	44	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	119
Peran Jawatan Regie Tjandu dan Garam di Masa		Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	125
Kemerdekaan	49	Pengelolaan Perusahaan Berbasis Digital	128
Mencari Dana Perjuangan	56	Modernisasi dan Inovasi Teknologi	132
Penyelundupan Candu ke Singapura	59	Hilirisasi Produksi Garam	137
Penghapusan Candu dan berdirinya Jawatan		Harapan Baru di Timur Indonesia	140
Regie Garam	66	Memuliakan Lingkungan, Memuliakan Manusia	143
Upaya Meningkatkan Produksi Garam Nasional	70	Profile PT Garam (Persero)	147



EGARAM (PUSKESMAS)

Jejak Langkah PT Garam (Persero)

Pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Bepalingen tot Verzekering van het Zoutmonopolie*, mengatur monopoli produksi dan distribusi garam di Hindia Belanda.

1882



Melakukan ekspansi lahan pegaraman di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seluas ±400 hektar.

2016



1921
Jawatan Regie Garam.



2000
PT Industri Soda Indonesia dilebur ke dalam PT Garam, sesuai PP No.2 Tahun 2000.



Berubah menjadi Jawatan Regie Tjandu dan Garam.

1937



Pembinaan PT Garam beralih dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian BUMN.

1998



1942-1945
Diambil alih Jepang dan dikelola di bawah Senbai Kyoku.



1991
11 Februari 1991, Perum Garam berubah menjadi PT Garam (Persero), sesuai PP 12 tahun 1991.



Jawatan Regie Tjandu dan Garam dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Moekarto Notowidigdo ditunjuk sebagai Kepala Regie Tjandu dan Garam Pusat pertama.

1945



Proyek Renovasi/Rehabilitasi Pegaraman Madura Timur dimulai.

1985



Berubah menjadi
Jawatan Regie Garam.
Pengusahaan candu
dihentikan.

1949



Pemerintah melepaskan
hak monopoli garam,
sesuai dengan Undang-
Undang Darurat Nomor
25 tahun 1957.

1957



1955

Telah memiliki 16 kapal
tarik, 40 cunia, dan 14
coaster, sebagai sarana
distribusi garam ke
seluruh wilayah Tanah
Air.

Sesuai dengan PP
No.138 tahun 1961,
PGSN dipecah menjadi
dua Perusahaan Negara
(PN), yakni PN Garam
dan PN Soda.

1961

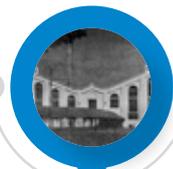


1958

Kapal-kapal pengangkutan garam
milik PGSN ditugaskan untuk
membantu negara untuk keperluan
pengangkutan tentara ke daerah
operasi di Sumatera dan Sulawesi
dalam rangka penumpasan
pemberontakan PRRI/PERMESTA.

Berubah status dari PN
menjadi PERUM, sesuai
PP No.46 tahun 1981.

1981



1973

Kantor Pusat PN Garam
berpindah dari Jakarta
ke Kalianget, Madura.



1959

Pembinaan PGSN
beralih dari Departemen
Keuangan ke Departemen
Perindustrian.



Sambutan Komisaris Utama PT Garam (Persero)

Motifasi untuk Menjawab Tantangan Masa Depan

Dalam lanskap kebutuhan pangan di Indonesia, garam merupakan komoditas yang tak bisa dianggap remeh. Pertama, garam merupakan salah satu komoditas dalam daftar sembilan bahan pokok (sembako), sehingga garam memiliki posisi strategis dalam program ketahanan pangan nasional. Kedua, garam tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, namun juga bahan baku industri di antaranya sektor farmasi, pertambangan, pupuk, dan lain-lain. Ketiga, permasalahan garam di Indonesia dilatarbelakangi beberapa faktor produksi, seperti infrastruktur, kelembagaan, pemasaran, serta permintaan dan penawarannya.

Peran penting tersebut membawa sebuah konsekuensi yang juga tak kalah penting, yakni perlunya ikhtiar yang kuat dari segenap elemen bangsa, khususnya keluarga besar PT Garam (Persero), untuk terus mempertahankan primanya kinerja PT Garam (Persero) selaku produsen garam terkemuka nasional.

Sebagai salah satu bagian ikhtiar kita mempertahankan kinerja baik tersebut ialah dengan merawat sejarah yang kita miliki. Melalui buku ini bisa kita saksikan pasang surut perjalanan PT Garam (Persero), sejak era pra-kemerdekaan.

Saya, mewakili Dewan Komisaris, menyambut baik kehadiran buku penting ini. Buku ini tidak hanya berfungsi untuk merekam dan mendokumentasikan perjalanan PT Garam (Persero), tetapi juga bagian dari upaya untuk memberi motivasi kepada generasi penerus, agar dapat melanjutkan seluruh upaya yang telah dilakukan para pendahulu kita di masa lalu.

Hari ini, sebagaimana kita ketahui, kita menghadapi suatu tantangan yang tak bisa dikatakan mudah. Angin perubahan yang berembus seiring dengan perubahan di banyak lini, utamanya akibat kemajuan teknologi informasi, membuat kita untuk terus dapat mawas diri.

Kita menyaksikan, mereka yang tak sanggup beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, perlahan-lahan tersingkir ke pinggir lapangan hanya untuk dikenang sebagai bagian dari masa lalu.

Kesiapsiagaan kita untuk terus dapat menjawab tantangan demi tantangan ke depan akan menjadi penentu kesuksesan PT Garam (Persero) pada masa kini dan masa-masa yang akan datang. Dalam konteks inilah buku sejarah PT Garam (Persero) akan memainkan peranan pentingnya.

Selamat membaca.

Komisaris Utama PT Garam (Persero)

(Eniya Listiniani Dewi)



Sambutan Direktur Utama PT Garam (Persero)

Menuju Sejarah yang Lebih Panjang Lagi

Perjalanan PT Garam (Persero) pada 2019 ini telah memasuki masa yang tak lagi bisa dibilang muda. Pada Oktober 2018 lalu, PT Garam (Persero) memperingati usianya yang ke-73 tahun. Usia ini dihitung dengan menjadikan momentum nasionalisasi Jawatan Regie Garam ke pangkuan Republik Indonesia. Namun, sebagaimana kita ketahui, perjalanan sejarah PT Garam (Persero) sesungguhnya merentang jauh hingga awal abad ke-20.

Perjalanan panjang ini tentu merupakan bekal penting bagi perjalanan PT Garam (Persero) saat ini dan nanti. Melalui sejarah yang panjang, kita bisa lebih mengenal

diri kita sendiri. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari perjalanan sejarah yang panjang ini. Tentu dengan harapan agar pelajaran-pelajaran tersebut dapat menambah keyakinan kita dalam menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi pada masa-masa yang akan datang.

Hari ini PT Garam (Persero) telah bertransformasi jauh melampaui dari apa yang telah dibayangkan para pendahulu kita. Sebagai institusi yang mengusahakan tercukupinya pasokan kebutuhan garam nasional, kita bahkan telah meluaskan area pemasaran kita hingga ke luar negeri. PT Garam (Persero) hari ini juga tidak hanya

sekadar memproduksi kebutuhan garam rumah tangga, tetapi juga berhasil memenuhi kebutuhan sektor industri.

Rasanya kita patut berbangga pada apa yang telah berhasil kita catatkan hari ini. Segala kemajuan yang telah kita usahakan, akan menambah daftar panjang upaya bakti kita kepada negara yang kita cintai ini.

Jajaran Direksi PT Garam (Persero) menyambut baik kehadiran buku sejarah ini. Di dalamnya bisa kita lihat bagaimana eksistensi PT Garam (Persero) dalam setiap fase sejarah penting republik ini. Kita melihat bagaimana

para pendahulu kita turut berperan dalam mendanai perjuangan. Dapat kita ketahui juga bagaimana para pendahulu kita bekerja keras untuk memenuhi target-target yang ditetapkan, demi tercapainya kecukupan kebutuhan garam nasional.

Kita berharap, perjalanan ini masih akan terus berlangsung dan kita dapat memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk kemajuan Indonesia.

Semoga.

Direktur Utama PT Garam (Persero)

Budi Sasongko





Bagian I

Dalam Tiga Era





► Bangunan Gedung PT Garam (Persero) dari masa lalu di Sumenep.

Kuasa Garam di Tangan Raja Madura

DI ANTARA belasan ribu pulau yang ada di Indonesia, Madura tentu memiliki nama tersendiri yang tak akan mungkin diabaikan begitu saja. Pulau ini, dengan segala macam berkah Tuhan yang turun di atas tanah dan di bawah buminya, telah menjadi pemasok garam yang luar biasa bagi Indonesia. Tidak hanya saat ini, tapi juga sejak jauh ke belakang pada era sebelum kolonialisme menancapkan cengkeramannya di Nusantara. Tentu tak mengherankan bila Madura sampai saat ini dikenal sebagai Pulau Garam.

Namun, tentu saja, ada begitu banyak liku dalam perjalanan garam di pulau seluas 5.168 km persegi itu. Ada begitu banyak jejak yang bisa kita urai mengenai pasang surut garam. Meski demikian, untuk konteks ke-Indonesia-an, suka tidak suka, berbicara garam haruslah dimulai dari pulau ini: Madura.

Dalam surat kontrak (*contingenten*) antara raja-raja Madura dengan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1751, Garam Madura dianggap

“
 Sebagai daerah penghasil garam terbesar di Nusantara, Madura memainkan peranan penting sebagai pemasok utama garam di wilayah-wilayah kekuasaan VOC. Besarnya nilai transaksi perdagangan garam menjadi magnet bagi kompeni untuk menguasai perdagangan garam di Hindia Timur.”

sebagai komoditi yang tidak dicantumkan di dalam daftar pemberian upeti. Ya, memang demikian adanya. Pulau Madura, pada awalnya hanya dipandang sebelah mata oleh Kompeni Hindia Timur Belanda. Tanahnya yang tidak subur menjadikan Madura sebagai daerah jajahan yang bernilai kecil di mata VOC.

Memasuki abad ke-18, barulah pandangan Kongsi Perusahaan Hindia Timur terhadap Madura mulai berubah. Sebagai daerah penghasil garam terbesar di Nusantara, Madura memainkan peranan penting sebagai pemasok utama garam di wilayah-wilayah

kekuasaan VOC. Besarnya nilai transaksi perdagangan garam menjadi magnet bagi kompeni untuk menguasai perdagangan garam di Hindia Timur. Langkah awal VOC sebelum memonopoli produksi dan perdagangan garam di Madura dengan memberlakukan pembayaran pajak petani-petani garam ke Belanda.

Sempat tidak dilirik, garam menjadi komoditas yang terus-menerus berusaha dikuasai dan dimonopoli produksi serta perdagangannya hingga masa penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942.

Jauh sebelum VOC mengeksploitasi garam, penguasaan terhadap garam berada di tangan raja-raja Madura. Penjualan garam dilakukan dengan cara menggadaikan kepada pengusaha-pengusaha Tionghoa. Raja-raja Madura memperoleh 2.000 Gulden setiap tahun dari hasil menggadaikan penjualan tersebut. Dengan mekanisme



► Salah satu peninggalan masa lalu.



ini, harga jual garam dari para petani menjadi sangat rendah, berkisar f5-f6 per koyang. Satu koyang setara dengan 30 pikul atau 1.825 kilogram.

Harga beli yang murah tersebut sudah termasuk biaya angkut hingga ke pelabuhan di mana kapal-kapal pembeli bersandar dan siap mengantarkan garam ke tempat tujuan. Selain memperoleh keuntungan dari penjualan, para pengusaha pembeli gadai memperoleh pajak dari penduduk

seperti pajak tegalan dan pekarangan. Kondisi ini membuat sebagian rakyat enggan menjadi petani garam.

Dominasi pengusaha-pengusaha Tionghoa dalam memonopoli perdagangan garam mulai terkikis ketika Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia pada 1811. Pada masa pendudukan Inggris di Hindia Belanda, orang nomor satu ini menghapus sistem gadai dan mengambil alih pengelolaan

garam dari pengusaha-pengusaha Tionghoa. Raffles menawarkan skema kerja sama baru kepada para penguasa Madura. Para raja Madura sepakat memberikan hak pengelolaan garam kepada pemerintah dengan ganti rugi sebesar f5.000 per tahun dan 50 koyang garam atau setara dengan 91.250 kilogram. 50 koyang garam diberikan untuk keperluan sang raja. Sedangkan uang sebesar f5.000 diberikan untuk para pembuat garam.



Selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Raffles melakukan beberapa kali perubahan terhadap pengelolaan garam. Gagasan mengenai industri garam berasal dari pemikiran Raffles. Ia mendorong terciptanya industrialisasi garam dengan cara memproduksi garam kemasan atau *patcher*. Dalam memproduksi garam kemasan, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Namun skema kerja sama produksi ini hanya berlangsung seumur jagung. Kebijakan ini, menurut Raffles hanya menguntungkan pengusaha garam. Kehidupan para petani dan pekerja tetap saja melarat. Pemutusan kerja sama ini menjadi pukulan berat bagi pengusaha garam yang waktu itu didominasi warga negara Tionghoa.

Pengusahaan kehidupan yang lebih baik bagi para petani dan pegaram di Madura sempat menyala ketika tanggal 15 Oktober 1813, Raffles mengeluarkan peraturan yang menghapus sistem *contingenten*, sistem penyewaan produksi, dan perdagangan garam yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Harapan itu meredup seketika, ketika Raffles mengeluarkan peraturan yang menyebutkan seluruh pengelolaan garam di bawah negara. Raffles juga menerapkan sistem *free labor (vrije arbeid)* terhadap produksi, perdagangan, dan distribusi garam.

Raffles mengangkat superintendan sebagai kepala dinas pengelolaan garam di Jawa dan Madura. Daerah Jawa dan Madura dibagi menjadi tiga bagian dan tiap-tiap bagian dikepalai seorang agen. Ketiga bagian tersebut kemudian dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian dan semuanya dikelola oleh agen. Dengan mekanisme ini, produksi dan distribusi dipegang oleh kepala dinas. Masyarakat Madura yang bekerja sebagai pegaram



Meski awalnya dianggap tidak berkontribusi besar terhadap keuntungan Belanda, Pulau Madura yang letaknya berada di pesisir pantai dan memiliki musim kemarau panjang, merupakan tempat strategis budidaya garam.

hanya diposisikan sebagai pegawai rendahan dengan upah yang sangat rendah.

Berakhirnya masa kekuasaan Raffles pada 1816 dan bangkrutnya *Vereenigde Oost Indische Compagnie*, pengelolaan garam di Madura secara otomatis berada di bawah pemerintah kolonial Belanda. Johannes van den Bosch yang menggantikan posisi Raffles sebagai Gubernur Jenderal Hindia yang baru, terkenal dengan kebijakan sistem tanam paksa (*cutuurstelsel*). Pada masa kekuasaannya, antara tahun 1830-1834, van den Bosch memang tidak menerapkan tanam paksa di Madura, tetapi mengganti dengan memberlakukan pajak.

Monopoli garam dan pemberlakuan pajak yang tinggi kepada petani garam dianggap sebagai pengganti kebijakan tanam paksa yang telah dihapus. Bosch menilai, penerapan pajak seperti halnya *cultuur diensten* yang berlangsung di Pulau Jawa. Sebagai bagian dari pelayanan kerja, monopoli dianggap pemerintah kolonial Belanda merupakan hal yang sangat wajar bagi wilayah-wilayah yang berada di jajahannya. Beratnya pajak yang harus ditanggung petani garam serasa mencekik. Selain penghasilan yang semakin sedikit yang diterima petani, para pekerja semakin sulit penghidupannya dengan gaji yang sangat minim yang diberikan Belanda.

Perkembangan produksi garam di tangan pemerintah Hindia Belanda berjalan cukup baik, setidaknya sampai

► Proses pengapalan pada masa lalu.





▶ Para petani garam di masa lalu.

1858. Memasuki 1859, terjadi krisis yang menyebabkan merosotnya produksi garam di Madura. Guna merangsang peningkatan produksi, pemerintah kolonial menaikkan harga beli garam kepada para petani yang awalnya 3,50 gulden menjadi 10 gulden. Peningkatan harga beli yang diberlakukan Belanda berhasil mendorong peningkatan produksi. Namun peningkatan produksi yang tinggi menimbulkan masalah baru. Produksi garam mengalami surplus. Over produksi ini membuat Belanda mengambil keputusan menutup tambak garam di Sampang dan Pamekasan pada 1868. Setahun berselang, tambak garam di Sumenep pun ikut ditutup.

Penutupan tambak garam Sumenep hanya berlangsung satu tahun. Pada 1870, Belanda kembali membuka tambak garam Sumenep dengan menetapkan aturan produksi maksimal 24.000 koyang. Butuh waktu delapan tahun untuk kembali membuka tambak garam Sampang. Pada 1876, tambak Sampang kembali beroperasi dengan aturan produksi sebesar 7.250 koyang. Penetapan aturan produksi mulai diberlakukan Belanda untuk menghindari terjadi kelebihan produksi yang pernah terjadi pada 1868. Berbeda dengan dua ladang garam yang telah dibuka, tambak garam Pamekasan tidak dioperasikan

dalam waktu yang tidak ditentukan akibat sulitnya transportasi untuk pengiriman hasil produksi.

Meski awalnya dianggap tidak berkontribusi besar terhadap keuntungan Belanda, Pulau Madura yang letaknya berada di pesisir pantai dan memiliki musim kemarau panjang, merupakan tempat strategis budidaya garam. Pandangan Belanda kepada Madura berubah ketika Madura berhasil menjadi pemasok utama garam di seluruh wilayah jajahan Belanda.

Dalam Genggaman Belanda

MONOPOLI YANG dilakukan Thomas Stamford Raffles dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan garam kepada negara pada kenyataannya belum dapat menciptakan industri garam yang ideal di Hindia Belanda. Sepeninggal Raffles, sejak tahun 1818, kontrol terhadap produksi dan perdagangan garam di daerah dilakukan oleh residen. Harapan pemerintah kolonial Belanda dengan menerapkan kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. Namun yang terjadi malah sebaliknya, para pejabat daerah pada masa itu justru mendahulukan kepentingan pribadi. Akibatnya, yang terjadi bukan peningkatan pendapatan bagi negara, pemasukan justru semakin berkurang.

Kondisi ini semakin diperparah akibat berlangsungnya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro mulai pada 1925-1930. Perang dahsyat ini menyebabkan kas keuangan Belanda mengalami defisit. Perang yang berlangsung selama lima tahun itu bukan hanya menewaskan banyak prajurit dari kedua belah pihak, tapi juga berdampak pada semakin menipisnya kondisi keuangan kolonial Belanda. Perang selalu membutuhkan biaya yang besar. Guna meningkatkan pendapatan dan



menutupi arus keuangan yang semakin memburuk, pada 1829, Komisaris Jenderal Du Bus De Gesignes menyewakan pengelolaan garam kepada pihak swasta.

Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, produksi garam tidak mengalami perbaikan yang berarti. Penerapan pajak yang tinggi justru semakin menjerat para petani garam. Murahahnya harga beli garam membuat produksi garam semakin lesu. Demi merangsang

peningkatan produksi, Belanda meningkatkan harga beli garam kepada para petani pada 1859. Strategi yang diharapkan dapat memberi keuntungan besar bagi Belanda justru menjadi bumerang. Tidak adanya peraturan penetapan produksi, membuat produksi garam mengalami surplus. Hal ini membuat Belanda menutup ladang garam di Sampang, Sumenep, dan Pamekasan.

Meski silih berganti harus menghadapi kerumitan, pemerintah kolonial Belanda tidak sedikit pun mengendurkan hasrat Belanda untuk memonopoli garam di Nusantara. Cengkeraman terhadap komoditi satu ini semakin diperkuat dengan menerbitkan *Bepalingen tot Verzekering van het Zoutmonopolie*. Aturan monopoli garam yang tertuang dalam *Staatblad van Nelerlandsich*



Guna meningkatkan pendapatan dan menutupi arus keuangan yang semakin memburuk, pada 1829, Komisaris Jenderal Du Bus De Gesignes menyewakan pengelolaan garam kepada pihak swasta.

Indie Nomor 73 tahun 1882 ayat (1) ini menyebutkan, semua wilayah kekuasaan Belanda dilarang membuat garam kecuali daerah-daerah yang disebutkan seperti pulau Jawa, Madura, dan pantai Barat Sumatera. Selain pelarangan pembuatan garam tanpa seizin pemerintah, Belanda juga mewajibkan pembuatan garam bagi para pemilik kolam yang berada di daerah monopolinya.

Aturan ketat yang mewajibkan seluruh pemilik tambak memproduksi garam dilakukan dengan cara meminta seluruh pemilik kolam mendatangi kantor perwakilan negara di tiap-tiap daerah. Disaksikan kepala desa dan kepala distrik, pemilik kolam ditanyai

oleh kepala pembuatan garam mengenai siapa yang akan menggarap garam di kolam miliknya. Semua tambak yang digunakan untuk membuat garam dicatat dalam selembarnya yang diterbitkan pemerintah. Kartu tersebut memuat informasi mengenai nama pemilik kolam, produksi yang dihasilkan beberapa tahun sebelumnya, serta alasan berpindahtangganya kepemilikan tambak tersebut. Pemanggilan yang dilakukan kepala pembuatan garam kepada pemilik kolam disebut penaksiran.

Aktivitas memanen garam umumnya berlangsung selama empat bulan, dari Juli hingga awal November. Namun pengaliran air laut ke kolam-kolam, peminihan, dan semua proses persiapan sebelum panen dilakukan pada akhir April hingga awal Mei. Pada masa persiapan ini, kantor garam akan mengeluarkan ketentuan pembuatan

“

Lahirnya aturan *Bepalingen tot Verzekering van het Zoutmonopolie* mendorong pemerintah kolonial mengelola garam melalui mekanisme perusahaan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya pabrik pengolahan garam briket di Kalianget, Sumenep, pada 1899.

”





► Sisa-sisa bangunan era Belanda.

garam dari masing-masing tambak. Para pemilik tambak yang telah ditentukan harus mengambil surat izin pada waktu yang telah ditentukan. Dalam surat tersebut tercantum nama yang berhak memproduksi garam. Surat yang disebut 'pepel' ini menggunakan bahasa Belanda dan Madura.

Lahirnya aturan *Bepalingen tot Verzekering van het Zoutmonopolie*

mendorong pemerintah kolonial mengelola garam melalui mekanisme perusahaan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya pabrik pengolahan garam briket di Kalianget, Sumenep, pada 1899. Bahan baku pembuatan briket berasal dari garam yang benar-benar kering dan bebas kotoran. Garam yang masih berbentuk pasir ini kemudian dimasukkan ke dalam kubus untuk dilakukan proses

pengepresan. Garam briket memiliki ukuran yang berbeda-beda mulai dari 1kg, 5kg, 10kg, 15kg, hingga 25 kg.

Keberhasilan memproduksi garam briket di Sumenep disusul dengan didirikannya pabrik garam briket di Krampon, Sampang, pada 1903. Setahun setelahnya, Belanda membangun kembali pabrik pengolahan briket di Mangunan,

Pamekasan. Namun sejak didirikan, pabrik garam Pamekasan tidak pernah digunakan untuk memproduksi garam briket. Secara ekonomis, pabrik Pamekasan dianggap tidak akan mendatangkan keuntungan karenanya pabrik dipindahkan ke Bander.

Meski telah membangun tiga pabrik, tidak semua produksi garam diolah menjadi briket. Sebagian hasil produksi diolah untuk kebutuhan garam konsumsi dan pengawetan ikan yang membutuhkan banyak sekali garam pasir. Meningkat atau menurunnya produksi pengolahan ikan sangat bergantung pada besar-kecilnya pasokan garam yang mereka terima.

“

Sistem monopoli yang tidak hanya menguasai pengolahan, tetapi juga ranah produksi, dengan mengeluarkan surat izin produksi bagi petani garam, menjadikan pemerintah kolonial sebagai satu-satunya produsen dan distributor garam di Madura.

”



► Sisa-sisa bangunan dermaga.



► Proses pengapalan di masa lalu.

Kontrol terhadap pengelolaan garam yang semula berada di tangan pejabat daerah (residen) berakhir pada 1915. Sejak perubahan aturan tersebut, kewenangan mengendalikan monopoli garam sepenuhnya berada di bawah kendali Kepala Dinas Monopoli Garam (*Hoofd van den Dienst der Aoutregie*). Kepala dinas bertanggung jawab kepada direktur dari Departemen Perusahaan Negara (*Departement van Gouvernementsbederijven*).

Sejak ditetapkannya aturan baru tersebut, maka daerah penghasil garam, *zoutlanden*, pada masa VOC disebut *zoutnegorizen*, terbagi ke dalam tiga wilayah: Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ketiga daerah penghasil garam ini memiliki 4.572 empang garam: Sampang (1.377 empang), Pamekasan (1.547 empang), dan Sumenep (1.648 empang). Masing-masing wilayah berada di bawah kepala pembuatan garam. Dalam pelaksanaannya,

ketiga kepala pembuatan garam ini dibantu 1 orang pembuat garam (*hoof van denaammaak*), 3 orang pengatur atau pelaksana administrasi (*beheerders*), 3 orang wakil pengatur (*hulpbeheerders*), 14 orang pengawas (*opzichters*), 3 orang mantri kepala (*hoofd mantris*), 24 mantri, 44 mandor tetap, 4 penulis (*schrijvers*), 3 agen polisi kelas satu, dan 18 polisi kelas dua.

Pembentukan *zoutregie* yang dikepalai *Hoofd van den Dienst der Aoutregie* bertujuan mengubah sistem monopoli garam yang sebelumnya dianggap kurang ideal. Melalui dinas garam, pemerintah Hindia Belanda kemudian menyingkirkan peran pengusaha Tionghoa yang selama ini berperan besar dalam pengolahan dan perdagangan garam di Madura. Sistem monopoli yang



tidak hanya menguasai pengolahan, tetapi juga ranah produksi, dengan mengeluarkan surat izin produksi bagi petani garam, menjadikan pemerintah kolonial sebagai satu-satunya produsen dan distributor garam di Madura. Perubahan

sistem juga mempermudah Belanda dalam hal pengawasan produksi garam. Kontrol ketat pun diberlakukan, disertai dengan sanksi berat seperti ganti rugi dan penyitaan barang jika terjadi pelanggaran.

Dengan mengubah tata kelola monopoli garam, dalam rentang waktu lima tahun, 1916 – 1920, pemerintah Hindia Belanda meraup keuntungan lebih dari 9 juta Gulden setiap tahunnya.

No	Tahun	Jumlah Keuntungan (Gulden)
1	1916	9.220.205.09
2	1917	9.958.217.69
3	1918	10.274.753.37
4	1919	10.083.605.29
5	1920	9.304.698.00

Sumber: Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.



Berdirinya Jawatan Regie Garam di Hindia Belanda

Guna mengukuhkan penguasaan garam di Nusantara, Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerbitkan aturan *Staatsblad* No.454 tahun 1921. Penerbitan aturan baru ini bertujuan menyempurnakan *zoutmonopolie* yang telah diterbitkan pada 1882, sekaligus penanda lahirnya perusahaan Jawatan Regie Garam di Hindia Belanda. Aturan mengenai monopoli garam terus-menerus diperbarui, *Staatsblad* No.20 tahun 1923, *Staatsblad* No.119 tahun 1930, *Staatsblad* No.168 dan No. 191 tahun 1931, dan *Staatsblad* No.254 tahun 1937. Dengan diberlakukannya

Staatsblad No.254 ini, Jawatan Regie Garam dilebur dengan pengolahan candu menjadi Jawatan Regie Candu dan Garam.

Upaya menggenjot produksi garam terus dilakukan Pemerintah Hindia Belanda. Pada 1918, Belanda membuka lahan pegaraman baru di Nembakor Barat seluas 465 hektare. Dirasa tidak dapat meningkatkan produksi secara signifikan, maka pada 1925, Belanda kembali membuka pegaraman baru di Gresik Putih dengan luas area 329 hektare. Menurut laporan residen

► Area kompleks Jawatan Regie Garam di Hindia Belanda, Kalianget, Madura.



Madura, J G van Heyst, pada tahun 1928, alasan dibukanya lahan baru di Sumenep karena daerah ini merupakan lahan terbaik dibanding daerah lain dalam hal pembuatan garam. Selama musim kemarau berlangsung, daerah timur Madura ini tidak mendapat curah hujan selama empat bulan.

Dalam laporannya, Heyst juga menulis ada dua faktor alami yang menyebabkan Sumenep dan daerah Madura lainnya, menjadi tempat terbaik memproduksi garam. Pantai selatan merupakan wilayah pesisir yang memiliki kadar garam yang tinggi. Selain itu, kristalisasi garam lebih cepat dibandingkan daerah lainnya karena pengaruh angin gending dari Probolinggo yang berembus dari arah selatan ke wilayah Madura.

Meski telah membuka dua lahan pegaraman baru, nyatanya pemerintah Hindia Belanda belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pulau Madura.



Pantai selatan merupakan wilayah pesisir yang memiliki kadar garam yang tinggi. Selain itu, kristalisasi garam lebih cepat dibandingkan daerah lainnya karena pengaruh angin gending dari Probolinggo yang berembus dari arah selatan ke wilayah Madura.



Tahun	Garam Rakyat	Garam Pemerintah	Jumlah
1922	97.626	3.709	101.335
1923	84.188	5.475	89.663
1924	71.082	7.503	78.585
1925	219.769	34.754	254.523
1926	185.416	35.262	220.678

Sumber: Laporan Residen Madura J. G van Heyst 9 April 1928 (1922-1926)

Hasil produksi garam pemerintah masih kalah jauh jika dibandingkan dengan hasil produksi para petani garam. Ketimpangan produksi tersebut tercantum dalam laporan Heyst. Pada 1922, misalnya, dari jumlah 101.335 ton, garam yang dihasilkan pemerintah hanya mencapai 3.709 ton. Sisanya, sebesar 97,626 ton berasal dari pegaraman rakyat. Bahkan dalam laporan produksi selama lima tahun (1922 – 1926), produksi garam pemerintah tidak sekalipun

menunjukkan keberhasilan menyamai produksi para petani garam.

Berbagai cara untuk memuluskan langkah pemerintah Hindia Belanda memonopoli garam terus dilakukan. Namun langkah ini harus terhenti dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di tangan tentara Jepang pada 1942. Berakhirnya kekuasaan Belanda, maka berakhir pula penguasaan Belanda terhadap garam di Nusantara. Namun,

angin perubahan belum membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Negara yang menyebut dirinya saudara tua, hadir bukan sebagai penyelamat, melainkan meneruskan penjajahan lama di tangan kekuasaan yang baru.

Penjajahan belum berakhir. Kekayaan sumber daya alam belum dapat dinikmati masyarakat . Masyarakat harus merasakan sekali lagi pahitnya hidup sebagai jajahan.



▶ Kaliangget, Madura.

Moda Transportasi Angkutan Garam

Mahalnya biaya pengangkutan garam menjadi masalah yang harus dihadapi perusahaan. *Oost-Java Zeetransport* (OJZ) didirikan guna memangkas tingginya beban pengiriman garam ke luar Pulau Madura.

Dinas angkutan resmi garam, *Oost-Java Zeetransport* (OJZ), didirikan pada 6 Juni 1912. Lahirnya badan pengangkutan resmi milik perusahaan garam ini dipicu

oleh tingginya biaya operasional pengangkutan garam. Awal mula pembentukan OJZ, bermula dari perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada perusahaan garam untuk membeli kapal penarik dan lima kapal cunia pada 1911. Masing-masing kapal cunia mampu memuat garam seberat 50 koyang, setara dengan 91.250 kilogram. Hadirnya OJZ diharapkan mampu mengurangi biaya pengiriman garam yang selama ini membebani perusahaan.





► Sisa-sisa bangunan dermaga.

Pada masa kemerdekaan, *Oost-Java Zeetransport* berubah nama menjadi Pengangkutan Laut Djawa Timur (PLDT). Kemudian berubah menjadi Perusahaan Pengangkutan Laut dan Kali (PPLK), pada 21 Oktober 1952.

Sebelum lahirnya OJZ, hak monopoli pengangkutan garam dikuasai oleh perusahaan milik Kerajaan Belanda, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM). Monopoli pengiriman garam kali pertama didapatkan KPM pada tahun 1894. Selain bertujuan meraup keuntungan dari pengangkutan garam, tujuan KPM sebagai lini bisnis Belanda adalah menguasai seluruh pelayaran di Hindia

Belanda. KPM berencana mengambil alih jalur pelayaran yang dikuasai perusahaan pelayaran lain. Selain itu, Belanda juga berniat membuka jalur-jalur pelayaran baru yang nantinya memuluskan KPM dalam menguasai seluruh pelayaran di Hindia Belanda.

Berdasarkan surat *de inspecteur Voor de Vervoeren* pada tahun 1924, yang tersimpan di Arsip Daerah Jawa Timur, pengangkutan garam yang dilakukan KPM pada tahun itu mencapai 11.700 koyang. Garam sebanyak 21,352 ton tersebut dikirimkan ke beberapa pelabuhan dengan jumlah yang berbeda-beda. Di pelabuhan Indramayu KPM mengirim sebanyak 250 koyang, pelabuhan Tegal

sebanyak 1.900 koyang, dan pelabuhan Pekalongan sebanyak 1.650 koyang. Jumlah terbanyak dikirimkan ke pelabuhan Semarang sebesar 2.500 koyang. Biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman garam ke lima pelabuhan tersebut sebesar f 268.861,50.

Di dalam surat yang sama disebutkan, upah yang diterima kuli bongkar muat barang (*koelielonen*) di tiap-tiap pelabuhan berbeda-beda. Di pelabuhan Panarukan misalnya, seorang kuli pembongkaran mendapat upah f 1,60 per koyang. Meski sama-sama berada di wilayah Jawa Timur, seorang kuli bongkar di pelabuhan Pasuruan mendapat upah lebih kecil daripada di pelabuhan Panarukan. Setiap 1 koyang yang berhasil diangkut, kuli di Pasuruan mendapat bayaran sebesar f 0,75. Satu kali lebih kecil dari yang diterima para buruh di pelabuhan Panarukan.



“

Kapasitas pengiriman garam yang dilakukan KPM semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dalam surat Mr.G. Sanderse kepada *Hoof der Opium en Zoutregie* (Kepala Jawatan Regie Candu dan Garam) pada tahun 1939.

”

Kapasitas pengiriman garam yang dilakukan KPM semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dalam surat Mr.G. Sanderse kepada *Hoof der Opium en Zoutregie* (Kepala Jawatan Regie Candu dan Garam) pada tahun 1939. Jangkauan wilayah pengiriman pun semakin meluas, meliputi pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dua bulan menjelang akhir tahun memang terjadi penurunan pengiriman. Jika dibandingkan dengan pengiriman pada Oktober yang mencapai 9.525 ton, maka pada November garam dikirimkan sebanyak 8.719 ton, lalu pada Desember sebanyak 7.141 ton.



Penurunan yang terjadi pada bulan November dan Desember disebabkan berakhirnya masa panen garam. Puncak pengiriman garam biasanya berlangsung selama empat bulan, dari Juni hingga September, bertepatan dengan masa memanen garam. Mengingat garam yang dikirimkan sebagian besar merupakan garam kemasan, maka pengiriman garam yang dilakukan menjelang akhir

tahun tersebut berasal dari stok tahun sebelumnya.

Distribusi garam ke wilayah-wilayah luar Madura tidak hanya dilakukan melalui jalur perairan. Administrasi pegaraman Belanda juga menggunakan kereta api untuk mendistribusikan produksi garam. Tidak lama setelah hak monopoli pengangkutan garam melalui jalur laut dipegang KPM, pada

1896, berdirilah perusahaan kereta api swasta *Madoera-Stoomtram Maatschappij* (MSM). Rel kereta dibangun dari pusat produksi garam di Kalianget hingga ke Kamal, posisinya tepat berada di depan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Pemerintah Hindia Belanda memberikan hak pengangkutan kepada MSM pada tahun 1902.

Perusahaan kereta api swasta ini mendapat hak monopoli pengangkutan garam dari tahun 1902 – 1908. Selama hampir tujuh tahun, MSM tercatat melakukan pengangkutan garam briket dari gudang Krampon ke Surabaya sebanyak 20.690 koyang. Tidak hanya mengirimkan garam olahan, MSM juga berperan dalam mengirimkan garam dari tambak ke pabrik-pabrik pengolahan. Sebesar 10.032,22 koyang dikirimkan MSM dari pegaraman Mangunan menuju pabrik-pabrik pengolahan yang berada di Kalianget.

Meski sudah menggunakan MSM sebagai alternatif pendistribusian garam, tingginya tarif yang diterapkan MSM masih membebani perusahaan. Guna memangkas biaya distribusi, pemerintah Hindia Belanda sempat berencana mengambil alih perusahaan kereta api swasta ini menjadi perusahaan negara. Rencana nasionalisasi MSM gagal dilakukan. Hak monopoli pengangkutan yang dimiliki MSM akhirnya dicabut pemerintah pada 1908. Akibat dicabutnya kerja sama ini, MSM mengalami kerugian sebesar f 600.000 setiap tahunnya.

Mahalnya biaya angkut selalu menjadi persoalan yang harus selalu dihadapi perusahaan. Perusahaan pelat merah kolonial Belanda ini bukan tidak pernah mencari solusi mengatasi masalah ini. Pengangkutan garam pernah diserahkan kepada perusahaan Eropa, P. Landberg dan Sons. Namun lagi-lagi tingginya tarif pengangkutan menjadi persoalan yang harus dihadapi perusahaan garam. Kesulitan yang dihadapi perusahaan



► Tugu kereta di Kalianget, Madura

ini menjadi latar belakang berdirinya Dinas angkutan resmi, *Oost-Java Zeetransport* pada 1912.

Perbandingan biaya operasional antara KPM dan OJZ dapat dilihat dalam surat *de inspecteur Voor de Vervoeren*. Surat yang ditulis pada 1924 ini menyebutkan, pengangkutan dengan jumlah dan tujuan yang sama, tarif yang dipasang KPM sebesar f 268.861,50. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan jika menggunakan armada OJZ sebesar f 159.003,00. Selisih tarif yang diterapkan KPM dan OJZ mencapai f 109.858,50.



Penghematan perusahaan bukan hanya berasal dari tarif pengangkutan saja, tetapi juga berasal dari selisih gaji awak kapal antara KPM dan OJZ. Jumlah awak kapal *sleepboot* yang dimiliki KPM dan kapal ss Regina milik OJZ masing-masing berjumlah 19 orang. Setiap tahun perusahaan garam harus membayar tenaga kerja KPM sebesar *f* 13.200. Berbeda dengan KPM, gaji awal kapal OJZ setiap tahunnya hanya *f* 10.200. Setiap tahun perusahaan dapat menghemat sebesar *f* 3.000. Jika ditotal, setiap tahunnya perusahaan dapat menekan biaya operasional pengangkutan mencapai *f* 112.858,50.

Kehadiran OJZ sebagai angkutan resmi perusahaan garam tidak mampu menghapus dominasi KPM sebagai moda utama pengangkutan garam. Sebagai armada resmi kerajaan, KPM memiliki hak-hak istimewa termasuk hak monopoli pengangkutan yang tidak dapat dicabut pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, jumlah armada yang OJZ masih kalah jauh jika dibandingkan dengan jumlah armada yang dimiliki KPM. Selama 28 tahun beroperasi, dari 1992 – 1940, OJZ kuantitas garam yang diangkut OJZ kurang dari 50 persen. Bahkan dalam catatan *Verslag Betreffende de Opium en Zoutregie en de Zoutwinning over het jaar* pada tahun 1935 disebutkan, kontrak pengangkutan garam KPM antara tahun 1935 – 1936 jauh lebih besar daripada OJZ.

Regie Garam memang tidak mampu menghapus hak-hak istimewa yang melekat pada perusahaan KPM, tetapi kesenjangan jumlah armada antara KPM dan OJZ masih bisa diupayakan jalan keluarnya. Meningkatkan kapasitas kapal OJZ dan bekerja sama dengan pengusaha perahu layar asal Madura merupakan langkah yang diambil perusahaan. OJZ membuka wilayah-wilayah baru yang belum tersentuh menggunakan perahu layar ini. Keberadaan perahu layar yang disewa oleh OJZ membawa perubahan besar dalam hal pemasaran produksi garam. Penggunaan perahu layar untuk distribusi merangsang para pembuat dan pengangkut garam menciptakan pasar sendiri. Dibanding mengambil sewa pengangkutan dari perusahaan, menjual secara langsung lebih menjanjikan keuntungan yang besar bagi pemilik garam dan pengusaha perahu layar.



Sejak berakhirnya kontrak kerja sama antara *Madoera-Stoomtram Maatschappij* dengan Regie Garam, untuk menutupi kerugian, MSM mengoptimalkan angkutan penumpang. Perusahaan swasta kereta api ini mulai merambah bisnis di angkutan kapal laut dan bus. Menggunakan kapal motor bernama *Madoera* dan *Pandora*, MSM membuka pelayanan angkutan penumpang dari Madura ke Surabaya pada 1923. Dengan kapal *Bodemeijer*, MSM membuka jalur pelayanan baru yang menghubungkan Madura dengan Panarukan. Pada tahun 1930, terdapat 53 bus untuk yang melayani rute-rute pendek di Madura. 25 armada bus dimiliki oleh MSM.

Peran MSM dalam pengangkutan garam telah berakhir. Perubahan situasi politik menyingkirkan KPM sebagai moda transportasi utama pengangkutan garam. Hanya OJZ dan perahu layar milik masyarakat Madura yang terus mengangkut dan mengirimkan garam pada masa kemerdekaan Republik Indonesia.

Perusahaan Garam pada Masa Penjajahan Jepang

Kalijati, Bandung, menjadi saksi penyerahan kekuasaan tanpa syarat yang dilakukan Panglima tertinggi Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang. Runtuhnya kekuasaan Belanda terhadap Hindia Timur pada tanggal 8 Maret 1942, sekaligus meruntuhkan penguasaan terhadap seluruh aset di

negara jajahannya, tidak terkecuali Perusahaan Regie Candu dan Garam. Berakhirnya masa pendudukan Belanda di Indonesia, tidak lantas menghapus monopoli garam di nusantara. Penguasaan terhadap sumber daya alam dan aset-aset penting yang sebelumnya dikuasai Belanda, hanya beralih ke tangan Jepang.

► Lorem ipsum onet, quaerernam, qui velicia si non eic totatium qui





Orang pertama yang memimpin perusahaan garam di era pendudukan Jepang adalah Y. Yasuda. Masa kepemimpinannya berlangsung dari tahun 1942 hingga 1944, kemudian digantikan S. Iidjima dari tahun 1944-1945.



Penjajahan belum berakhir. Monopoli masih terus berlangsung. Hanya penguasanya saja yang berganti, dari Belanda beralih ke Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang, seluruh hal yang berbau Belanda dihapuskan. Kantor pusat perusahaan garam yang berada di Jakarta, pada masa kolonial Belanda bernama *Dienst Der Opium en Zout Regie* diubah menjadi *Senbai Kyoku*. Kantor-kantor perwakilan di daerah diubah namanya menjadi *Tjihoo Senbai Kyoku*. Perusahaan garam yang pada masa Belanda disebut *Zoutregie*,

diubah menggunakan bahasa Indonesia menjadi Perusahaan Garam.

Pengubahan nama yang dilakukan Jepang dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia bertujuan merebut simpati masyarakat Indonesia. Negara yang mengaku sebagai saudara tua ini tidak lain hanya ingin menguasai sumber daya alam dan aset-aset berharga yang dimiliki Indonesia. Keuntungan yang didapat dari penguasaan aset ini sebagian disalurkan sebagai dana perang Asia Timur Raya. Jepang berhasrat menjadi penguasa Asia Tenggara, kemudian menguasai Asia.

Orang pertama yang memimpin perusahaan garam di era pendudukan Jepang adalah Y. Yasuda. Masa kepemimpinannya berlangsung dari tahun 1942 hingga 1944, kemudian digantikan S. Iidjima dari tahun 1944-1945.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Pabrik Krampon pada tanggal 10 September 1943, Yasuda menjelaskan tata kelola perusahaan garam. Surat dengan nomor 4184 ini menjelaskan, Kepala perusahaan atau Kepala pabrik di daerah yang hendak mengirimkan surat kepada Kepala Perusahaan Garam di kantor pusat harus memperlihatkan isi surat kepada petinggi Jepang yang berada di wilayah masing-masing. Surat akan dikirimkan kepada kepala perusahaan setelah mendapat persetujuan dan distempel petinggi Jepang.

Semua hal penting terkait dengan pegaraman dan pengolahan pabrik garam harus dibicarakan dengan petinggi Jepang. Tanpa adanya persetujuan, maka semua program tidak bisa dijalankan. Hal-hal yang tidak begitu penting tidak memerlukan izin, cukup dengan memberitahukan kepada petinggi Jepang. Jika ada hal-hal mendesak yang harus segera dilakukan demi kepentingan produksi dan pada saat bersamaan petinggi Jepang sedang tidak berada di tempat, maka kepala perusahaan dan kepala pabrik daerah boleh mengambil langkah tanpa menunggu persetujuan. Dengan catatan, semua harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan segera dilaporkan setelah pejabat berwenang berada di tempat.

Pengaturan jam kerja bagi karyawan dibedakan sesuai dengan fungsi dan bagian di dalam perusahaan. Para karyawan di kantor pusat pegaraman mulai bekerja pukul delapan pagi dan berakhir pada pukul tiga sore hari. Pada hari Sabtu, para karyawan diperbolehkan pulang satu jam lebih awal dari jam kerja pada hari biasa. Penerapan jam kerja ini pun berlaku bagi staf administrasi yang berada di pabrik-pabrik pengolahan garam. Berbeda dengan staf administrasi, bagian pekerjaan umum dan gudang terbagi ke dalam dua shift, mulai pukul 08:00 – 13:30 dan pukul 13:30 – 16:00. Pada hari Sabtu dan Minggu setiap 14 hari, kedua bagian ini harus membersihkan oven-oven serta mesin-mesin di pabrik pengolahan.

Negara Matahari terbit ini memberlakukan gaji pegawai disesuaikan dengan keterampilan, usia, dan jenis kelamin. Buruh kasar pria yang berusia di atas 18 tahun mendapat upah f 0,30 setiap harinya, sedangkan yang berumur di bawah 18 tahun mendapat f 0,24. Pekerja pria yang memiliki pendidikan dan kecakapan teknik mendapat upah f 1.0 setiap harinya jika berusia di atas 18 tahun. Untuk yang berumur di bawah 18 tahun mendapat bayaran sebesar f 0,80. Pekerja wanita mendapat bayaran lebih rendah daripada laki-laki. Bagi yang berumur di atas 18 tahun mendapat bayaran f 0,90, sedangkan yang berusia di bawah 18 tahun mendapat bayaran f 0,72.

Jumlah pekerja di pegaraman dan pabrik Kalianget pada 20 April 1943 tercatat sebanyak 11.997 orang. Dengan rincian: pegawai tetap 74 orang, pegawai bulanan 60 orang, pegawai harian 783 orang, pegawai lepas 7.322 orang, dan pegawai borongan mencapai 3.754 orang.

► Petani garam masa lalu.



Kondisi keuangan perusahaan garam di masa penjajahan Jepang sampai tahun 1944 mencapai f 902.971.384. Rincian mengenai kondisi keuangan perusahaan garam dari tahun 1943 – 1944 tercatat dalam Laporan Buku

Bulanan, Arsip Perusahaan Garam buku 1 No.109, yang tersimpan di Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Timur.

No	Bagian	Pemasukan	Pengeluaran	Kas
1	Pegaraman Sumenep	191.926.977	78.515.430	113.411.574
2	Pegaraman Pamekasan	80.720.934	14.931.984	65.788.940
3	Pegaraman Sampang	200.610.618	103.115.655	97.494.863
4	Pegaraman Nembakor	126.636.150	37.022.373	89.613.777
5	Pegaraman Gresik	27.326.090	4.132.580	23.103.501
6	Pegaraman Gresik Putih	101.847.478	39.774.424	62.073.054
7	Himpunan I/IV	728.978.147	277.492.455	451.485.692
		f 1.487.956.294	f 554.984.901	f 902.971.384

Sumber: Laporan Buku Bulanan April 1993 – Maret 1944. Arsip Perusahaan Garam buku 1 No.109. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Timur.

Daftar nama jabatan di perusahaan garam yang diganti oleh Jepang

Jabatan dalam bahasa Belanda

Ambtenaar
 Adjunct-boekhouder
 Adjunct Inspecteur
 Adjunct-magasi jnmeester
 Beherdeer 3e kl
 Boukhouder 2e kl
 Boukhouder 1e kl
 Controleur
 3e Commies
 2e Commies
 Commies-redacteur
 Hoofd der Zoutwinning
 Hoofd Boukhouder
 Hoofdmantri
 Hoofdtechnisch Amtenaar
 Magazi Jnmeester
 Magazi Jnmeester 1e kl
 Mantri Laboratorium

Jabatan dalam bahasa Indonesia

Pegawai
 Adjung Juru buku
 Adjung Inspektoer
 Adjung Pengurus Gudang
 Pengurus Kelas III
 Juru Buku Kelas II
 Juru Buku Kelas I
 Kontrolir
 Komis Kelas III
 Komis Kelas II
 Komis Redaktur
 Kepala Perusahaan Garam
 Kepala Juru Buku
 Kepala Mantri
 Kepala Pegawai Teknik
 Pengurus Gudang
 Pengurus Gudang Kelas I
 Mantri Laboratorium

Jabatan dalam bahasa Belanda

Mantri Verbandmester
 Mantri Verpleger
 Opzichter
 Opzichter 1e kl
 Scrijver 1e kl
 Technisch ambtenaar 2e kl
 Technisch ambtenaar 1e kl
 Archief Beambten
 Bediende
 Boekbinder
 Chauffeur
 Hoofd Kantooppasser
 Laboratorium Bediende
 Radiotelegrafist
 HoofdMandoer
 Hoofdwalker
 Kejuitsok

Jabatan dalam bahasa Indonesia

Mantri Bebas
 Mantri Rawat
 Opshiter
 Opshiter Kelas I
 Juru Tulis Kelas I
 Pegawai Teknik Kelas 2
 Pegawai Teknik Kelas 2
 Pegawai Arsip
 Pelayan
 Penjahit Buku
 Supir
 Kepala Opas Kantor
 Pembantu Laboratorium
 Juru Rawat Radio
 Kepala Mandor
 Kepala Penjaga
 Koki





Bagian II

Ke Pangkuan Ibu Pertiwi



Penguasaan Jawatan Regie Tjandu dan Garam ke Pangkuan Indonesia



Taring militer Jepang tidak lagi runcing. Berada di ambang kekalahan, Jepang melakukan taktik licik dengan memanggil Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin militer tertinggi Jepang di kawasan Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi di Dalat, Vietnam. Pertemuan diadakan dengan tujuan

membahas pemberian kemerdekaan Indonesia oleh Jepang. Ketiganya sepakat memenuhi undangan tersebut. Pembicaraan mengenai janji kemerdekaan pun berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945.

Sekembalinya ke Tanah Air, Soekarno, Hatta, dan Radjiman langsung menuju ke kediaman Hatta. Di sana telah menunggu tokoh-tokoh bangsa yang ingin mengetahui hasil pembicaraan mereka dengan pimpinan militer Jepang. Ketiga tokoh ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Terauchi berjanji memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kabar mengenai pemberian kemerdekaan ini tidak disambut dengan suka cita oleh para tokoh, terutama Sjahrir dari golongan pemuda. Sjahrir menilai, janji tersebut tidak lain hanya tipu muslihat yang dilakukan Jepang untuk menghambat tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Bukan kali pertama Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Pada September 1944, melalui Deklarasi Koiso, Kekaisaran Jepang mengumumkan akan segera

menyerahkan sepenuhnya kekuasaan Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Janji tersebut diberikan setelah Jepang beberapa kali menelan kekalahan di medan perang. Deklarasi tersebut bertujuan menarik simpati masyarakat Indonesia dengan harapan, Indonesia akan membantu Jepang melawan musuh-musuhnya. Dengan adanya Indonesia di pihak Jepang akan memperkuat posisi negara matahari terbit di Asia Tenggara.

Selain persoalan janji yang tidak kunjung ditepati, melalui siaran radio, Sjahrir mengetahui bahwa Jepang sudah

berada di ambang kekalahan. Kesimpulan tersebut ia dapatkan setelah mengetahui Kota Hiroshima luluh lantah setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Hari ketika Soekarno, Hatta, dan Radjiman berangkat menuju Dailat, pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki menjadi kota kedua yang hancur dijatuhi bom tentara sekutu. Dengan hancurnya dua kota tersebut, kekuatan militer Jepang semakin melemah. Hanya tinggal menunggu waktu hingga Jepang akhirnya benar-benar tidak berdaya di hadapan kekuatan tentara sekutu.



“

Bukan kali pertama Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Pada September 1944, melalui Deklarasi Koiso, Kekaisaran Jepang mengumumkan akan segera menyerahkan sepenuhnya kekuasaan Indonesia kepada masyarakat Indonesia.

”

Janji kemerdekaan yang diucapkan Panglima Tertinggi Jepang Asia Tenggara itu selain bertujuan menyelamatkan harga diri, juga sebagai taktik menghambat Indonesia lepas dari genggaman Jepang. Terauchi belum sepenuhnya pupus harapan. Ia menilai, dengan waktu yang diberikan, Jepang berharap dapat membalikkan keadaan. Dengan begitu, janji kemerdekaan Indonesia tidak perlu dipenuhi. Walaupun pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan, kemerdekaan Indonesia dapat diklaim sebagai hadiah dari kemurahan hati negeri matahari terbit ini.

Soekarno dan Hatta memiliki pandangan yang berbeda dengan Sjahrir. Keduanya masih belum sepenuhnya percaya bahwa Jepang tak berkutik lagi menghadapi kekuatan sekutu. Baik Soekarno dan Hatta sepakat, jika Jepang benar-benar kalah, hanya soal waktu saja kemerdekaan Indonesia akan diumumkan. Yang harus diutamakan, dibutuhkan persiapan yang matang agar Indonesia benar-benar terbebas dari penjajahan, mengingat Belanda masih berupaya menghimpun kekuatan merebut kembali Indonesia ke dalam jajahannya.

Tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, Soekarno dan Hatta mendatangi kantor penguasa militer Jepang (*Gunseikan*) di Koningsplein (Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat). Namun yang mereka dapati hanya gedung kosong tanpa seorang pun ada di dalamnya. Ditemani Achmad Soebardjo, keduanya menemui perwira tinggi Angkatan Laut Jepang,



Laksamana Muda Maeda Tadhasi. Mereka berencana mengorek informasi mengenai kondisi terkini Jepang. Namun yang mereka dapati hanya ucapan selamat atas pertemuan di Dailat. Kabar mengenai kondisi Jepang saat itu tidak diketahui oleh Maeda. Perwira angkatan laut ini mengatakan, masih menunggu konfirmasi dari Tokyo.

“

Baik Soekarno dan Hatta sepakat, jika Jepang benar-benar kalah, hanya soal waktu saja kemerdekaan Indonesia akan diumumkan

”

”

Kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap sekutu akhirnya mereka ketahui dari siaran radio. Meski begitu, keduanya tidak ingin terburu-buru memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Sikap Soekarno dan Hatta membuat tokoh-tokoh muda akhirnya mengambil tindakan dengan menculik keduanya ke Rengasdengklok. Penculikan ini bertujuan meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa ide mengenai janji kemerdekaan dari mulut Jepang hanya bualan semata. Jepang tidak pernah benar-benar menginginkan Indonesia Merdeka.

Dari Rengasdengklok, Soekarno dan Hatta mendatangi Jenderal Yamamoto di Jakarta. Komandan Jepang di Jawa ini mengatakan, Jepang telah sepenuhnya kalah sehingga tidak memiliki lagi kewenangan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Berbekal informasi ini,

keduanya menjadi yakin bahwa Jepang telah takluk. Ditemani anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno dan Hatta mendatangi rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Naskah yang semula ditulis tangan kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Bertempat di rumah Soekarno, jalan Pegangsaan Timur No.56, Jakarta Pusat, pada pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini membawa Indonesia ke babak baru, Indonesia tanpa penjajahan. Indonesia merdeka.

Setelah merdeka, maka seluruh aset yang sebelumnya dikuasai Jepang diambil alih. Pengambilan aset ini bertujuan menghimpun dana untuk perjuangan republik belia ini. Salah satu perusahaan yang kembali ke pangkuan Republik Indonesia adalah Jawatan Regie Tjandu dan Garam. Dimonopoli sejak zaman Belanda, perusahaan garam akhirnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Dengan dasar hukum *Indische Bedrijvenwet* (IBW), pengelolaan Jawatan Regie Tjandu dan Garam berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.

Kepala Jawatan Regie Tjandu dan Garam, Moekarto Notowidigdo, menyelundupkan candu. Uang hasil penjualan digunakan sebagai dana perjuangan Republik Indonesia.

“Salah satu perusahaan yang kembali ke pangkuan Republik Indonesia adalah Jawatan Regie Tjandu dan Garam. Dimonopoli sejak zaman Belanda, perusahaan garam akhirnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Dengan dasar hukum *Indische Bedrijvenwet* (IBW), pengelolaan Jawatan Regie Tjandu dan Garam berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.

”

Peran Jawatan Regie Tjandu dan Garam di Masa Kemerdekaan



▶ Moekarto Notowidigdo, Kepala Pusat Jawatan Regie Tjandu dan Garam Pertama.

SURAT KEPUTUSAN Menteri Keuangan nomor 796 yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 1945, mengukuhkan Moekarto Notowidigdo sebagai Kepala Pusat Jawatan Regie Tjandu dan Garam. Peran sebagai pimpinan perusahaan sudah dilakukan Moekarto sejak 1 Oktober 1945. Ia bertugas di Kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Dalam surat tersebut juga disebutkan, Kepala perusahaan dibantu Kepala Inspeksi Regie Tjandu dan Garam Jawa Timur,

Soewahjo Darmosarkoro. Dengan adanya SK Menteri Keuangan ini, secara definitif Perusahaan Candu dan Garam berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.

Pemimpin perusahaan pada masa awal kemerdekaan tidak hanya bertugas memastikan operasional perusahaan berjalan lancar, tetapi juga berperan dalam mencari dana untuk perjuangan. Untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya perebutan tentara sekutu (*Allied Forces Netherland East Indies*) bersama *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) yang menginginkan Indonesia kembali dalam jajahannya, maka diperlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah berharap perusahaan-perusahaan nasional bisa menjadi kantong-kantong pendanaan bagi perjuangan. Namun menghasilkan uang pada masa awal kemerdekaan bukan perkara mudah. Blokade ekonomi yang dilakukan NICA menghambat proses pencarian dana ini.

Blokade yang dilakukan Belanda sejak November 1945 bertujuan mematikan perdagangan Indonesia.

Pemblokiran dilakukan Angkatan Laut Belanda dengan cara menutup jalur keluar-masuk kapal. Dengan ditutupnya akses pelabuhan, maka hasil perkebunan di satu wilayah tidak dapat dikirimkan ke wilayah lain di Indonesia. Tidak hanya arus perdagangan di dalam negeri yang diputus, Belanda juga memastikan agar upaya ekspor Indonesia ke negara lain digagalkan. Bahkan barang-barang yang rencananya akan diekspor dihancurkan tentara NICA.

Blokade jalur laut juga bertujuan mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. NICA khawatir, jika senjata dan peralatan militer lainnya berhasil masuk, maka perlawanan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah semakin menguat. Belanda tidak pandang bulu dalam melakukan aksinya. Semua kapal yang hendak masuk atau keluar dari Indonesia ditangkap dan dihancurkan. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekurangan pasokan makanan.

Minimnya bantuan yang masuk ke Madura membuat daerah ini kekurangan bahan makanan. Pemerintah daerah akhirnya mengambil inisiatif mengirimkan delegasi ke Jawa untuk meminta bantuan makanan sekaligus melaporkan kondisi Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1946, utusan pemda Madura menaiki kapal Kangean menuju Probolinggo. Dalam perjalanan kapal yang ditumpangi delegasi ini ditembaki oleh NICA

sehingga mengakibatkan kapal dan seluruh penumpang di dalamnya tenggelam. Hanya dua penumpang yang selamat dalam tragedi ini.

Tidak hanya berusaha mematikan perdagangan di dalam negeri, Belanda juga berusaha memutus mata rantai perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Angkatan laut Belanda menghalangi perdagangan antara Sumatera dengan Singapura dan Malaysia. Sebuah kapal dagang dari Singapura yang memuat bahan bakar

“

Pemimpin perusahaan pada masa awal kemerdekaan tidak hanya bertugas memastikan operasional perusahaan berjalan lancar, tetapi juga berperan dalam mencari dana untuk perjuangan.

”

minyak berupa solar dan bensin ditembaki hingga menyebabkan kapal hangus terbakar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Mei 1848. Tiga hari berselang, pada tanggal 26 Mei, kapal tongkang milik pengusaha Tionghoa bernama Gong Sui Tjao yang bertolak dari

Bengkalis menuju Bagan Siapi-api dihadang oleh Angkatan laut Belanda. Kapal dagang ini kemudian dibawa ke perairan Riau.

Upaya NICA dalam merebut kembali Indonesia tidak hanya dilakukan dengan memblokir perairan laut Indonesia. Awal

November 1945, Belanda mulai gencar melakukan serangan ke beberapa daerah di Indonesia. Penyerangan di Surabaya juga mulai dilakukan tentara sekutu pada awal November. Penyerangan ini nantinya meletus secara besar-besaran pada tanggal 10 November 1945 dan diperingati



Tidak hanya berusaha mematikan perdagangan di dalam negeri, Belanda juga berusaha memutus mata rantai perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain.



► Tugu di Kalianget, Madura.

sebagai Hari Pahlawan. Tidak ingin hasil produksi garam dirampas atau dihancurkan tentara Belanda, Moekarto menginstruksikan kepada Kepala Pabrik Garam Kalianget dan Krampon untuk menghentikan pengiriman garam ke gudang pusat di Tanjung Perak, Surabaya.

Pengiriman garam dialihkan ke gudang-gudang yang berada di Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, dan Banyuwangi. Dari keempat tempat penyimpanan ini, garam dikirimkan ke gudang-gudang yang berada di tiap-tiap kabupaten menggunakan kereta api. Semua wilayah yang mampu dijangkau kereta api di seluruh pulau Jawa harus mendapat pasokan garam.





► Salah satu tugu di Kalianget, Madura.

Lancarnya pengiriman garam ini tidak terlepas dari peran Djawatan Kereta Api (D.K.A) Surabaya. Dari kabupaten, pengiriman diteruskan hingga tingkat kecamatan. Selain mencegah masyarakat kekurangan konsumsi garam, komoditi satu ini merupakan bahan makanan yang sangat penting bagi para tentara Indonesia.

Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT Garam (Persero), Wahyudi Badar Sungkowo mengatakan, pada masa perjuangan, gudang garam menjadi salah satu indikator bagi pihak Belanda dalam menemukan basis-basis tentara Indonesia. Semakin besar pasokan garam yang dikirimkan ke gudang di satu wilayah, maka semakin besar potensi keberadaan tentara Indonesia di wilayah tersebut. Pada masa kemerdekaan, gudang garam milik pemerintah tidak hanya berada di tingkat kabupaten, tetapi juga berada di tingkat kecamatan.

“Pada zaman perjuangan, garam menjadi lauk utama bagi para pejuang kemerdekaan. Cukup nasi dan garam.

Garam tidak bisa digantikan,” ujar Wahyudi.

Pengiriman garam dari pabrik menuju gudang-gudang di pulau Jawa bukan tanpa kendala. Sebuah kapal coaster bermuatan garam milik Jawatan Regie Tjandu dan Garam yang bertolak dari Kalianget menuju Probolinggo dibom oleh tentara sekutu. Mereka beralasan, kapal coaster yang akan berangkat menuju Jawa, membawa pejuang-pejuang Indonesia serta amunisi rampasan milik Belanda yang berada di Kamal, Madura.

Kantor Inspeksi Regie Tjandu dan Garam Jawa Timur pun tidak luput dari sasaran tembak tentara sekutu. Peristiwa yang terjadi akhir November 1945 ini membuat kepala perusahaan memutuskan memindahkan kantor garam Jawa Timur yang semula berlokasi di Surabaya dipindahkan ke Probolinggo. Desas-desus mengenai tentara sekutu yang hendak melakukan penyerangan (*doorstoot*) ke wilayah Malang semakin terdengar. Guna menghindari terjadinya penembakan, untuk kali kedua kantor Inspeksi Regie Tjandu dan Garam Jawa Timur

dipindahkan ke Mojokerto pada akhir Desember 1945. Pertengahan Januari 1946 menjadi momen ketiga kalinya perusahaan garam cabang Jawa Timur ini harus dipindahkan lagi ke Kediri.

Masa-masa perjuangan antara tahun 1945-1949, memang tidak pernah menjadi masa yang tenang bagi masyarakat Indonesia. Hal ini pun berlaku bagi perusahaan candu dan garam milik negara. Jika sebelumnya kantor cabang garam Jawa Timur yang harus berpindah-pindah tempat, maka pada pertengahan Februari 1946, Kantor Pusat Jawatan Regie Tjandu dan Garam yang harus dipindahkan dari Jakarta ke Solo. Kepindahan ini dilatarbelakangi oleh pemindahan pusat kekuasaan Indonesia yang sebelumnya berada di Jakarta dipindahkan ke Jogjakarta.

Menjelang akhir tahun 1945, situasi Ibu Kota Jakarta sangat tidak kondusif. Hal ini disebabkan tentara sekutu yang diboncengi NICA mulai melakukan penangkapan terhadap para pejuang Indonesia. Situasi



semakin tidak aman ditandai dengan penyerangan fisik yang dilakukan kepada Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mohammad Roem. Kondisi semakin diperparah ketika terjadi penyerangan terhadap Perdana Menteri Indonesia Sjahrir dan Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin yang hampir terbunuh oleh simpatisan Belanda.

Melihat kondisi Jakarta yang tidak aman bagi pemerintahan Indonesia, maka pada tanggal 1

Januari 1946, Presiden memberikan perintah ke Balai Yasa Manggarai agar segera menyiapkan kereta api untuk menyelamatkan para petinggi negara. Menggunakan kereta api berjadwal khusus, Kereta Luar Biasa (KLB), Soekarno, Hatta dan beberapa menteri beserta keluarganya berangkat menuju Jogjakarta pada tanggal 3 Januari 1946. Sebagai perdana Mentari, Sjahrir tetap tinggal di Jakarta untuk bernegoasi dengan Belanda. Berangkatnya para pejabat tinggi

ini sekaligus memindahkan pusat pemerintahan ke Jogjakarta.

Wakil Menteri Penerangan, Ali Sastroamidjojo dalam siaran radio Republik Indonesia menjelaskan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Jogjakarta disebabkan situasi di Ibu kota sudah tidak lagi aman. Selain itu, pemerintahan Yogyakarta yang berada di bawah naungan keraton lebih stabil sehingga pemerintah bisa menyempurnakan organisasi pemerintahan RI selama di sana. Dari sisi keamanan, para pejabat tinggi negara menilai, kondisi pemerintahan Jogjakarta sangat kuat karena merupakan gabungan antara negara dan kerajaan.

Menempati gedung tua bekas toko mesin, Kantor Candu dan Garam pun didirikan. Kondisi ini berlangsung selama beberapa bulan, hingga bantuan dari pemerintah Mangkunegaraan datang. Bantuan tersebut berupa perizinan untuk menggunakan bekas kantor Agraria Mangkunegaraan yang berlokasi di pasar Legi, Solo. Selain pemindahan kantor pusat ke Solo, terdapat peristiwa penting yang terjadi pada bulan Maret 1946. Kepala Inspeksi Regie Tjandu dan Garam Jawa Timur, Soewahjo Darmosarkoro diangkat menjadi Kepala Muda Jawatan Regie Tjandu dan Garam. Dalam perjalanannya nanti, Soewahjo melanjutkan estafet perjuangan memimpin Jawatan Regie Tjandu dan Garam menggantikan Moekarto yang ditahan oleh Belanda.

“Menempati gedung tua bekas toko mesin, Kantor Candu dan Garam pun didirikan. Kondisi ini berlangsung selama beberapa bulan, hingga bantuan dari pemerintah Mangkunegaraan datang. Bantuan tersebut berupa perizinan untuk menggunakan bekas kantor Agraria Mangkunegaraan yang berlokasi di pasar Legi, Solo.”

Mencari Dana Perjuangan

Berpindahnya pusat pemerintahan Indonesia ke Jogjakarta dan Kantor Pusat Jawatan Regie Tjandu dan Garam ke Solo, membuat Moekarto melakukan penyelamatan aset-aset penting perusahaan, diantaranya adalah candu. Candu murni (mentah) sebanyak 22 ton diselundupkan dari gudang Jakarta menuju Jogjakarta. Selain tidak ingin dirampas oleh tentara sekutu, hasil penjualan candu rencananya akan digunakan untuk membiayai perjuangan bangsa Indonesia.

Pada masa kependudukan Jepang, pabrik tjandu Jakarta yang berlokasi di sebelah utara Universitas

Indonesia hanya difungsikan sebagai tempat produksi obat-obatan. Jepang melarang kegiatan produksi candu di pabrik tersebut. Penghapusan produksi candu yang dilakukan oleh Jepang menyebabkan stok candu yang jumlahnya berton-ton menjadi tidak terpakai. Ketika masa penjajahan Jepang berakhir, kegiatan produksi candu kembali dilakukan. Namun hanya candu cepuk yang diproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan para pematik berlisensi.

Dalam kompleks pabrik candu terdapat kereta api yang berfungsi mengantarkan obatan-obatan ke berbagai wilayah di Indonesia. Posisinya yang berada di kawasan pabrik membuat kereta api menjadi satu-satunya pilihan sarana transportasi untuk menyelundupkan candu ke Jogjakarta. Namun menyelundupkan candu keluar dari pabrik tidaklah mudah. Tentara sekutu memeriksa dengan teliti setiap gerbong yang keluar dari area pabrik.

Untuk meloloskan penyelundupan candu dari pemeriksaan tentara Belanda, Kepala Pabrik Tjandu Jakarta, Ibrahim melakukan modifikasi pada dinding-dinding wagon. Ibrahim membuat dinding rangkap (*dubbele bewending*) pada sisi-sisi bagian dalam wagon. Candu yang akan diselundupkan dimasukkan ke dalam



► Pabrik candu masa lalu di Salemba, Batavia. (Sumber: Tropenmuseum).

dinding rangkap tersebut. Proses pengiriman candu ke Jogjakarta dilakukan secara bertahap.

Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari tentara sekutu, pengiriman candu dilakukan bersamaan dengan pengiriman bahan-bahan untuk pembuatan obat. Dalam gerbong yang sama terdapat bahan-bahan obat seperti gebalan kulit kina, daun digitalis, drum-drum berisi ramuan obat untuk pembuatan Zalven, kaleng-kaleng berisi vaseline, mesin cetak pengisian cepuk untuk kebutuhan produksi candu cepuk. Selain candu, perusahaan garam juga berjasa dalam menyelundupkan senjata dan pakaian yang dibeli dari tentara Gurkha di Jakarta.

Berkat kecermatan Ibrahim dalam memodifikasi wagon, serta strategi menggabungkan penyelundupan bersamaan dengan bahan obat-obatan dan membiarkan gerbong kereta yang menuju Jogjakarta tetap terbuka, penyelundupan candu, senjata, dan pakaian pun selalu lolos dari setiap pemeriksaan. Tentara sekutu tidak pernah sekalipun mendapati keanehan pada gerbong-gerbong yang meninggalkan pabrik tjandu.

Candu sebanyak 22 ton yang berhasil diselundupkan kemudian disimpan di gudang garam yang berlokasi di sebelah utara stasiun Tugu. Pemerintah memberlakukan aturan ketat mengenai penyimpanan candu ini. Tidak ada seorang pun boleh membuka gudang, apalagi mengeluarkan candu meski hanya secuil dari gudang

tanpa adanya surat yang ditandatangani Wakil Presiden Indonesia, Mohammad Hatta.

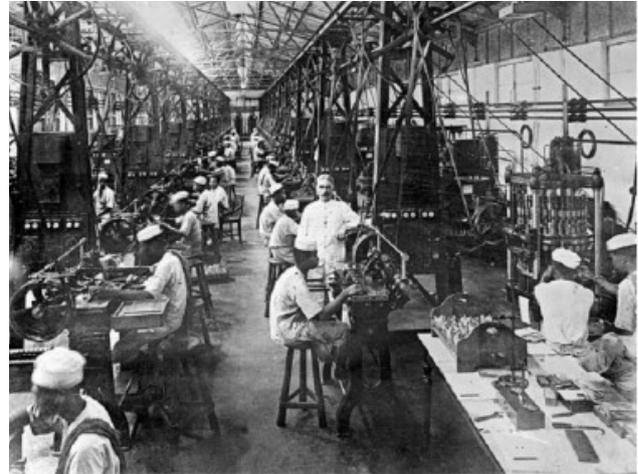
Dari gudang garam di dekat stasiun Tugu, candu ini kemudian dipindahkan ke dua tempat. Sebagian besar dipindahkan ke gudang garam yang berada Wonosari, Gunung Kidul, dan sisanya dipindahkan ke Wonogiri. Pemandahan candu mentah ini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu tentara NICA menyerang pusat pemerintahan Indonesia di Jogjakarta.

Setelah proses penyelundupan berhasil, Pabrik Tjandu dan obat-obatan yang berada di Salemba, Jakarta, kemudian dipindahkan ke bekas pabrik gula di Tjepu, Klaten. Tidak lama berada di Klaten, pabrik pembuatan candu ini kemudian diungsikan kembali ke Prembun. Seperti kondisi sebelumnya, bekas pabrik gula yang menjadi tempat penampungan sementara produksi candu dan obat-obatan. Dari Prembun, pabrik direlokasi ke daerah Sawangan yang berada di lereng gunung merapi. Untuk memudahkan produksi, pabrik dipecah menjadi dua, pabrik candu cepuk dan pabrik obat. Sementara pabrik obat tetap ditempatkan di Sawangan, pabrik candu cepuk direlokasi ke Wonosari.

Menurunnya jumlah pematik berlisensi pasca kemerdekaan Indonesia membuat permintaan candu cepuk semakin berkurang. Di sisi lain, kebutuhan akan obat-obatan semakin meningkat dari hari ke hari. Para pejuang kemerdekaan sangat membutuhkan pasokan

obat-obatan dalam jumlah besar. Menurunnya jumlah produksi candu dan meningkatnya kebutuhan obat-obatan, menjadi latar belakang dipisahkannya dua fungsi pabrik ini. Pemisahan fungsi produksi juga bertujuan menggenjot produksi obat-obatan seperti pulvus, pil kina, dan zalven yang sangat dibutuhkan para pejuang.

Dengan menurunnya produksi candu cepuk, sebagian candu mentah yang tidak terpakai dikirim ke Bukit Tinggi untuk membiayai perjuangan di Sumatera. Sebagian lagi diserahkan kepada tentara-tentara di sejumlah daerah yang sedang bergerilya sebagai sokongan dana perjuangan. Sebanyak enam ton diselundupkan ke Singapura untuk dijual kepada pengusaha di negeri Singa tersebut.



► Kesibukan di pabrik candu, Batavia. (Sumber: Tropenmuseum).

“

Dengan menurunnya produksi candu cepuk, sebagian candu mentah yang tidak terpakai dikirim ke Bukit Tinggi untuk membiayai perjuangan di Sumatera.

”

Penyelundupan Candu ke Singapura



▶ Alexander Andries Maramis, Menteri Keuangan Indonesia (1947-1948)

"Penyelundupan candu ke Singapura merupakan ide Menteri Keuangan A. A Maramis dan telah disetujui dalam sidang kabinet."

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan mengangkat senjata, bertempur melawan tentara sekutu, tetapi juga ditempuh melalui jalur politik. Perjuangan untuk mendapat pengakuan sebagai bangsa yang merdeka dari negara-negara di dunia

ditempuh melalui jalur diplomatis di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam mencari dana untuk kebutuhan perjuangan, Menteri Keuangan, A. A Maramis mengusulkan agar menjual candu murni ke Singapura. Hasil penjualan digunakan untuk diplomasi ke PBB, membeli senjata dari Philipina, dan membeli mesin-mesin percetakan uang.

Gagasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mendapat persetujuan dalam sidang kabinet. Setelah persetujuan didapat, maka dibentuk tim yang akan menjalankan tugas menyelundupkan dan menjual candu ke Singapura. Tim ini beranggotakan delapan orang, M. Subeno Sosrosaputro, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Tony Wen, Sis Tek Soen, Lisbawati, Ibrahim, Lie Kwet Tjin, dan dikepalai oleh Kepala Jawatan Regie Tjandu dan Garam, Moekarto Notowidigdo.

Penjualan pertama dilakukan pada bulan Juli 1948. Langkah ini diambil setelah Tony Wen, pengusaha etnis Tionghoa asal Solo ini mendapat kabar dari Lie Kwet Tjin yang menyatakan siap membantu penjualan candu di Singapura. Pengangkutan candu seberat setengah ton ini menggunakan kapal yang disewa Tony Wen dari Singapura. Tony Wen didampingi M.



▶ Tony Wen, salah satu pejuang yang turut menyelundupkan candu ke Singapura.

Subeno Sosrosaputro yang kala itu menjabat Kepala Kantor Tjandu dan Garam Jogjakarta dan Karkono Partokusumo. Kapal dengan kapasitas 80 ton ini berlabuh di pantai di desa Popoh, selatan Kediri di Samudera Indonesia. Ruang kapal dipenuhi dengan gula pasir yang akan dijual ke Singapura. Candu diselipkan di antara karung-karung gula pasir.

Ombak laut selatan yang terkenal tidak begitu ganas memudahkan kapal berlayar hingga memasuki tengah perairan laut bebas. Selama berlayar lampu kapal sengaja dimatikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kapal patroli Belanda. Dengan hanya bermodalkan kompas, pelayaran diarahkan ke timur, arah kepulauan Lombok, hingga terus menyusuri perairan selat Lombok. Sebetulnya, waktu pelayaran akan lebih cepat jika

melewati selat Bali. Namun, selat Bali dan Selat Madura dipenuhi kapal-kapal pengintai Belanda.

Selama enam hari enam malam mengarungi lautan, kapal kecil bermuatan gula dan candu ini hampir saja tertangkap kapal patroli Belanda. Bahkan, ketika sampai di laut Jawa, mereka berpapasan dengan kapal milik Belanda. Kapten kapal berkebangsaan Tionghoa Singapura dengan sigap mematikan mesin kapal. Ia membiarkan kapal Belanda lewat lebih dahulu. Setelah cukup jauh, mesin kapal kemudian dihidupkan dan pelayaran menuju pulau Sambu dilanjutkan. Pulau Sambu menjadi tempat pertemuan (*rendezvous*) antara Indonesia dengan pembeli asal Singapura.

Sebelum berlabuh di pulau Sambu, kapal Indonesia mengirimkan sinyal lewat radio kepada pembeli Singapura. Sinyal yang diberikan pihak Indonesia



Selama enam hari enam malam mengarungi lautan, kapal kecil bermuatan gula dan candu ini hampir saja tertangkap kapal patroli Belanda. Bahkan, ketika sampai di laut Jawa, mereka berpapasan dengan kapal milik Belanda



► Ladang bibit opium. (Sumber: Gahetna).

dibalas dengan cahaya lampu sebagai penanda bahwa keadaan aman, dan kapal diperbolehkan berlabuh. Jual beli candu seberat setengah ton berjalan dengan mulus.

Informasi mengenai kedatangan pejuang Indonesia ke Singapura dengan membawa candu sudah diterima pemerintah Inggris dari pihak Belanda di Indonesia. Berbekal pengetahuan ini, maka Subeno dan Karkono dari pulau Sambu harus menggunakan kapal lain agar bisa masuk ke Singapura. Selama di Singapura, keduanya kerap berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada hari di mana mereka harus

menginap di gudang, rumah kosong, atau hotel. Menginap di hotel pun harus berpindah-pindah setiap hari.

Cara ini dilakukan untuk menghilangkan jejak sehingga tidak tertangkap tentara Inggris.

Uang hasil penjualan tidak diserahkan Lie Kwet Tjin kepada Subeno dan Karkono. Uang itu disimpan di dalam Chines Overseas Bank. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil uang tersebut tanpa adanya cek dari Moekarto, selaku kordinator penyelundupan dan penjualan candu.



Penjualan kedua dilakukan pada September 1948. Kali ini Subeno dan Karkono menyewa pesawat terbang Catalina jenis amphi. Titik pemberangkatan berlokasi di sebuah dermaga di Kediri selatan. Waktu keberangkatan dan pertemuan sudah dikirimkan dari Indonesia ke pihak pembeli asal Singapura. Namun ketika hendak berangkat, pilot pesawat mendapat kabar bahwa Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) juga ikut dalam penyewaan pesawat ini. Pesawat yang seharusnya berangkat langsung menuju Singapura ini terpaksa berhenti

dahulu di Jogjakarta. Akibatnya, pesawat Catalina ini mengalami keterlambatan.

Setelah mengirimkan tanda, pesawat terus berputar-putar di atas salah pulau di Singapura. Tidak kunjung mendapat jawaban dari bawah, Subeno dan Karkono pun menjadi panik. Merasa tidak mendapat kepastian dari pembeli, pilot akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kediri. Keputusan pilot ditentang keras oleh Subeno. Sambil menodongkan pistol di punggung sang pilot, Subeno memerintahkan untuk segera

melakukan pendaratan. Mereka terpaksa menginap di tengah pulau menunggu datangnya pembeli.

Keesokan hari, para pembeli pun datang. Candu seberat dua ton dimasukkan ke dalam kapal untuk diangkat menuju Singapura. Seperti strategi sebelumnya, Subeno dan Karkono berangkat ke Singapura menggunakan kapal lain. Selain dua orang yang berasal dari tim penyelundupan, terdapat pejuang lain yang ikut dalam pesawat tersebut. Djaruman diberi tugas mencari alat-alat percetakan

untuk Jogjakarta.

Setibanya di Singapura, karena memiliki tugas yang berbeda-beda, mereka pun berpisah. Subeno dan Karkono pulang ke Indonesia dengan menyewa pesawat terbang dari Bangkok, Thailand, melewati Bukit Tinggi, dan tiba di Jogjakarta dengan selamat. Djaruman yang membawa alat-alat percetakan kembali ke Indonesia menggunakan kapal sewaan dengan tujuan pantai Rembang tidak dapat meloloskan diri dari sergapan tentara Belanda. Ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.

Sejarah mengenai penjualan candu tahap ketiga tidak diketahui secara detail. Candu seberat satu setengah ton tersebut diselundupkan menggunakan skema yang sama ketika pertama kali diselundupkan ke Singapura. Dengan kapal berkapasitas 80 ton, candu disisipkan di antara karung-karung gula. Sewaktu memasuki selat Lombok, kapal sewaan ini dikejar oleh *destroyer* Belanda. Tidak ada yang tahu pasti alasan *destroyer* Belanda menghentikan pengejaran dan berpuatar arah. Namun harus disyukuri karena penjualan berhasil dilakukan dan seluruh tim yang terlibat berhasil sampai di Jogjakarta dengan selamat.

Penyelundupan keempat dan kelima masing-masing seberat satu ton dibantu oleh pengusaha asal Solo,

Sie Tek Soen. Transaksi yang dilakukan pada bulan Desember 1948 ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Permasalahan yang muncul justru ketika pesawat amfibi sampai di Kediri. Surutnya telaga di selatan Kediri ini membuat pilot berkebangsaan Inggris tidak berani mendarat di telaga itu. Ia menyarakan agar mendarat di laut saja. Terlihat jelas dari atas, tempat pendaratan yang disebutkan pilot terdapat *destroyer* Belanda. Tidak ada pilihan lain, maka tim penyelundupan menodongkan pistol ke leher sang pilot. Dengan pasrah, pilot berusaha mendarat di pelabuhan surut itu. Pendaratan pun berhasil dilakukan.

“

“Candu seberat satu setengah ton tersebut diselundupkan menggunakan skema yang sama ketika pertama kali diselundupkan ke Singapura.”

”

Penangkapan Moekarto oleh Belanda

Informasi mengenai penjualan candu sebagai upaya menghimpun dana perjuangan Republik Indonesia telah sampai ke telinga Belanda. Tidak tinggal diam, NICA menyebar intel untuk mendalami informasi yang mereka terima. Dari hasil penelusuran, tentara sekutu akhirnya berhasil menemukan jejak perdagangan candu dari tangan mahasiswa. Beberapa orang mahasiswa ditangkap setelah menjual candu kepada orang-orang Tionghoa di Glodok, Jakarta.

Bocornya rahasia penyelundupan ini disebabkan banyaknya pihak yang mulai ikut terlibat dalam penjualan candu. Padahal, sejak awal telah diputuskan bahwa yang berhak menyelundupkan hanya orang-orang yang telah dipilih oleh Menteri Keuangan A.A Marais. Namun, besarnya kebutuhan uang yang diperlukan beberapa menteri untuk membiayai kementeriannya, maka para menteri meminta candu yang sudah jadi dikirimkan ke Jakarta. Candu-candu yang diperjualbelikan mahasiswa kepada etnis Tionghoa berasal dari para menteri tersebut.

Interogasi yang dilakukan Belanda untuk menemukan pelaku distribusi candu tidak membuahkan hasil. Upaya mengorek keterangan dari mahasiswa tidak juga berhasil sebab para mahasiswa tidak benar-benar

mengetahui dari mana candu yang mereka edarkan berasal. Meski tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan, Belanda mulai mengintensifkan operasi intelnya. Dari operasi tersebut didapatkan info yang menyatakan penyelundupan candu diorganisir oleh Kepala Jawatan Regie Tjandu dan Garam, Moekarto.

Moekarto yang saat itu ditunjuk sebagai kordinator penyelundupan, juga bertanggung jawab sebagai inspektur pemakaian uang hasil perdagangan candu. Tanggung jawab ini mengharuskan Moekarto melakukan inspeksi keuangan ke kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Beberapa tempat yang ia datangi adalah Singapura, Bangkok, dan New Delhi. Pada waktu itu, kantor perwakilan Indonesia di Singapura dipimpin oleh Oetojo. Bangkok dipimpin oleh Isac Machdi dan New Delhi dipimpin oleh Dr. Soedarsono. Inspeksi ini dilakukan Moekarto sebanyak dua kali. Dalam menjalankan inspeksi, ia didampingi M. Soebeno Sosrosaputro.

Moekarto akhirnya berhasil ditangkap oleh NICA di Kemayoran. Saat terjadi penangkapan, Belanda menemukan surat pertanggungjawaban penggunaan uang perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di dalam tasnya. Tuduhan atas penyelundupan candu untuk mendanai perjuangan tidak dapat dibuktikan. Namun, surat-surat pertanggungjawaban itu cukup

“

Moekarto akhirnya berhasil ditangkap NICA di Kemayoran. Saat terjadi penangkapan, Belanda menemukan surat pertanggungjawaban penggunaan uang perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di dalam tasnya. Tuduhan atas penyelundupan candu untuk mendanai perjuangan tidak dapat dibuktikan.

”

untuk menyeret Moekarto ke penjara Salemba. Moekarto mendekam di balik jeruji selama satu tahun.

Dengan ditangkapnya Moekarto, terjadi kekosongan kursi Kepala Pusat Jawatan Regie Tjandu dan Garam. Maka pada tanggal 1 Agustus 1948, Jabatan

Kepala Jawatan Regie Tjandu dan Garam kemudian diserahkan dari Moekarto Notowidigdo kepada Soewahjo Darmosarkoro. Penetapan ini dikukuhkan dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1949 No.89/A/49.



► Lorem ipsum onet, quaerernam, qui velicia si non eic totatium qui

Penghapusan Candu dan berdirinya Jawatan Regie Garam

Perjuangan melalui jalur politik hingga tahun 1948 belum dapat mengantarkan Indonesia diakui sebagai negara merdeka oleh bangsa-bangsa lain. Beberapa kali diplomasi antara Indonesia dan Belanda dilakukan, seperti perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Roem-Rojien, namun belum juga menemukan titik sepakat. Hal yang paling mendasar adalah Belanda menginginkan kedaulatan Indonesia merupakan pemberian dari Kerajaan Belanda, bukan pengakuan kedaulatan seperti yang diinginkan Indonesia.

Tidak tercapainya kesepakatan dalam beberapa kali pertemuan, maka pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 dilakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda di Den Haag, Belanda. Pada akhir konferensi disepakati beberapa poin penting antara Indonesia dan Belanda. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan terhadap

kedaulatan Indonesia paling lambat dilakukan tanggal 30 Desember 1949.

Persoalan mengenai Irian Barat akan dirundingkan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan. Uni Indonesia Belanda didirikan sebagai bentuk kerja sama antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Belanda harus menarik kapal perang-kapal perangnya dari Indonesia, dengan catatan beberapa korvet diserahkan ke Indonesia. Tentara Kerajaan Belanda harus segera ditarik mundur. Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) harus dibubarkan. Perwira KNIL yang diperlukan untuk memperkuat militer Indonesia harus bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia.

Bersamaan dengan diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka, perdagangan candu di dalam negeri dihapuskan.



► J.H. van Maarseveen, Sultan Hamid II dan Mohammad Hatta menandatangani Perjanjian Meja Bundar, 2 November 1949.

Berbekal hasil kesepakatan ini, pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan antara Indonesia dan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Perjanjian ini ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda Willem Dress, Menteri kelautan AM. JA. Sassen dari pihak Belanda. Sedangkan Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Indonesia, Mohammad Hatta.

Bersamaan dengan diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka, perdagangan candu di dalam negeri dihapuskan. Candu atau opium merupakan hasil ekstraksi dari tanaman *papaver somniferum*. Di dalamnya terdapat racun yang dapat melemahkan syaraf-syaraf tubuh manusia. Jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu akan menimbulkan efek memabukkan bagi penggunanya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan opium ini membuat pemerintah menghapuskan kebijakan

penjualan candu. Pemerintah menilai, candu dapat merusak masa depan bangsa dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Pelegalan perdagangan candu pada masa perjuangan dilatarbelakangi sulitnya mencari dana perjuangan. Pemerintah pada saat itu sangat membutuhkan dana untuk membeli senjata, pakaian, membiayai perjuangan, serta biaya untuk diplomasi melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kesulitan mencari pendanaan karena sebagian besar pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan hancur pada masa akhir penjajahan Jepang. Hasil-hasil perkebunan tidak dapat dikirim baik antar daerah di Indonesia maupun ke luar negeri karena adanya blokade perairan laut yang dilakukan oleh Belanda.

Kondisi semakin diperparah dengan lemahnya mata uang Republik Indonesia jika dibandingkan dengan mata uang Belanda dan Jepang. Pemerintah tidak dapat menahan laju penggunaan kedua mata uang tersebut. Dengan kondisi-kondisi ini, maka pemerintah memutuskan untuk melegalkan perdagangan candu di dalam negeri. Pengolahan candu mentah menjadi candu siap pakai (cepuk) dilakukan Pabrik Tjandu, milik Jawatan Regie Tjandu dan Garam. Distribusi candu ditangani oleh Perusahaan Candu dan Garam milik pemerintah ini di bawah pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



Pelegalan perdagangan candu pada masa perjuangan dilatarbelakangi sulitnya mencari dana perjuangan. Pemerintah pada saat itu sangat membutuhkan dana untuk membeli senjata, pakaian, membiayai perjuangan, serta biaya untuk diplomasi melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).



Dengan dihapusnya perizinan penjualan candu pada tanggal 27 Desember 1949, maka Jawatan Regie Tjandu dan Garam berubah menjadi Jawatan Regie Garam.

Perubahan nama dan fungsi perusahaan tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.239 tahun 1952. Dalam lembaran negara tersebut dijelaskan, mulai tanggal 27 Desember 1949, pemerintah



tidak melakukan penjualan candu isap lagi. Sehubungan dengan itu, maka Jawatan Regie Tjandu dan Garam telah diubah menjadi Jawatan Regie Garam. Pabrik candu untuk sementara berubah sifatnya menjadi pabrik alat-alat pembungkus seperti tubes untuk keperluan obat gosok gigi, cat, peti-peti pengepak tubes, dan karung-karung jerami pembungkus garam. Dengan berubahnya fungsi pabrik, maka kebutuhan tubes

di dalam negeri dapat terpenuhi sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor.

Selain memproduksi garam dan alat-alat pembungkus, pemerintah memberi tugas kepada Jawatan Regie Garam membuat soda *caustic* dengan memanfaatkan garam sebagai bahan dasarnya. Soda *caustic* atau soda api di sektor industri digunakan sebagai bahan kimia

basa untuk kebutuhan pembuatan bubur kertas, tekstil, sabun, dan deterjen. Dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan garam dalam memproduksi soda *caustic* ini, maka pemerintah mendorong untuk membuat susunan komersil sehingga bisa mendatangkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan yang nantinya berperan besar bagi pendapatan negara.

Upaya Meningkatkan Produksi Garam Nasional

Jawatan Regie Garam sebagai satu-satunya perusahaan garam milik pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan nasional. Berbagai percobaan terus dilakukan, salah satunya dengan menggunakan *solivap green*. Bahan ini dipilih karena tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan.

Percobaan menggunakan cairan dari tepung berwarna hijau tua ini dilakukan pada tahun 1951. Cara

menggunakannya, cukup dengan menyebarkan cairan ini di beberapa bidang pegaraman. Hasil percobaan menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 18 persen di tiap-tiap bidang pegaraman yang ditaburi cairan *solivap green*. Maka mulai tahun 1951, seluruh area pegaraman ditaburi cairan ini. Kerja keras yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produksi membuahkan hasil. Produksi garam pada tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Produksi garam mencapai 480.00 ton, 100.000 ton lebih besar jika dibandingkan dengan produksi tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 1941.

Dalam rentang waktu lima tahun, antara tahun 1948 sampai 1952, pencapaian produksi tertinggi terdapat pada tahun 1951. Pada tahun 1948 sebesar 381.000 ton, tahun 1949 sebesar 316.000 ton, tahun 1950 sebesar 161.000 ton, tahun 1951 sebesar 480.00 ton, dan tahun 1952 mencapai 328.000 ton.

Di samping tetap menjaga kebutuhan stok nasional, besarnya produksi yang dihasilkan Jawatan Regie Garam, maka sejak tahun 1949 sampai tahun 1952, perusahaan telah mengeksport garam ke Jepang



sebanyak 102.000 ton. Pada akhir tahun 1952, stok ketersediaan garam yang dimiliki perusahaan mencapai 500.000 ton. Stok ini mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri selama dua setengah tahun.

Aset yang dimiliki Regie Garam cukup besar pada masa itu. Pada tahun 1950, perusahaan garam pelat merah ini tercatat memiliki 10 kantor pengawasan daerah, 18 kantor perusahaan, dan 257 gudang sekaligus tempat penjualan garam. Area pegaraman yang dimiliki perusahaan mencapai 6.000 hektare yang tersebar di Gresik, Gresik Putih, Sampang, Pamekasan, Nembakor, dan Sumenep. Empat lahan pegaraman yang berada di Rembang, Tuban, Panggul, dan Pacitan, dikembalikan kepada pemilik aslinya pada pertengahan tahun 1950. Lahan seluas 800 hektare ini sejak tahun 1947 hingga 1948 pernah digunakan sebagai pegaraman untuk Republik Indonesia.

Sebagai perusahaan pemerintah, maka Jawatan Regie Garam mengemban tugas menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pabrik Tjandu di Salemba yang sudah tidak terpakai kemudian digunakan untuk pembuatan peti kayu dan cepuk-cepuk timah (tabon) pembungkus obat. Pengoperasian kembali pabrik ini bertujuan memberikan pekerjaan bagi para karyawan pabrik candu yang kehilangan pekerjaan ketika produksi dan peredaran candu dilarang oleh pemerintah. Pabrik obat yang berada di lereng gunung merapi,

Sawangan, ditata kembali untuk kemudian diserahkan ke Kementerian Kesehatan.

Sebagian hasil produksi diolah di pabrik garam briket yang berada di Krampon dan Kalianget. Sampai tahun 1950, kedua pabrik pengolahan ini memiliki 11 mesin briket. Namun karena usianya yang sudah tua, garam briket yang dihasilkan setiap tahunnya hanya mencapai 110.00 ton. Guna meningkatkan hasil produksi, maka didatangkan beberapa mesin baru yang lebih modern. Dengan menggunakan mesin baru ini, pada tahun 1953, garam briket yang dihasilkan meningkat menjadi 200.000 ton.

Hasil produksi berupa garam curah dan garam briket dikirimkan melalui jalur perairan menggunakan kapal yang dimiliki perusahaan. Distribusi menggunakan kapal ini menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Hingga tahun 1950, Jawatan Regie Garam memiliki 10 kapal tarik, 30 cunia, dan 1 coaster. Sebelum kembali ke Madura, kapal-kapal ini akan berlabuh ke pelabuhan Tanjung Priok, Semarang, dan Tanjung Perak untuk mengantarkan muatan berupa batubara dari Sumatera, rotan dari Kalimantan, dan Kopra dari Sulawesi.





Bagian III

Transformasi Menuju PN Garam

Perusahaan Garam dan Soda Negeri



Jawatan Regie Garam berubah status menjadi Perusahaan Garam dan Soda Negeri (PGSN) sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 1952. Undang-undang yang disahkan Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Soemitro Djohadikusumo di Jakarta pada tanggal 26 September 1952 ini sekaligus membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nr. 18405/K, mengenai monopoli garam di seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat.

Surat Keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 1950 ini hanya mengatur monopoli garam di wilayah kekuasaan Indonesia Serikat. Keputusan ini dibuat sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 19 Mei 1950. Aturan dari Menteri Keuangan ini menyesuaikan wilayah kekuasaan Indonesia Serikat sesuai dengan perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dilakukan di atas Kapal perang milik Amerika Serikat, USS Renville. Perundingan yang dimulai tanggal 8 Desember 1947 ini diinisiasi oleh Komisi Tiga Negara (*Committe of Good Offices for Indonesia*) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Indonesia mengirim Amir Syarifudin untuk mewakili Indonesia dalam perundingan yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pihak Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Widjoatmodjo. Perjanjian yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 ini menjadi perjanjian paling tidak menguntungkan dalam sejarah perundingan Indonesia dengan Belanda. Isi perjanjian meliputi kesepakatan gencatan senjata secara militer berdasarkan Garis van Mook. Wilayah yang diakui Belanda sebagai bagian dari Republik Indonesia hanya

Terbentuknya NKRI pada tanggal 19 Mei 1950, menjadikan Jawatan Regie Garam yang sebelumnya berada di bawah Republik Indonesia Serikat otomatis menjadi bagian dari NKRI

Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Sumatera. Dengan ketentuan ini, maka Indonesia harus menarik seluruh pasukan dari kantong-kantong wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pihak Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat selama masa peralihan. Dengan ketentuan dilaksanakannya referendum terhadap daerah-daerah yang dikuasai Belanda secara agresi militer.

Terbentuknya NKRI pada tanggal 19 Mei 1950, menjadikan Jawatan Regie Garam yang sebelumnya berada di bawah Republik Indonesia Serikat otomatis menjadi bagian dari NKRI. Penguasaan garam yang

sebelumnya hanya di wilayah-wilayah RIS sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nr. 18405/K, dibatalkan dan diganti dengan undang-undang nomor 14 tahun 1952. Lahirnya undang-undang ini didasarkan pada laporan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengenai anggaran Belanja bagian perusahaan garam tahun 1950/1951.

Memori jawaban yang diberikan pemerintah atas laporan DPR RI mengemukakan, penguasaan terhadap garam harus berada di bawah negara. Dengan dilakukannya monopoli garam maka semua keuntungan perusahaan akan masuk ke dalam kas negara yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat menemukan fakta bawah

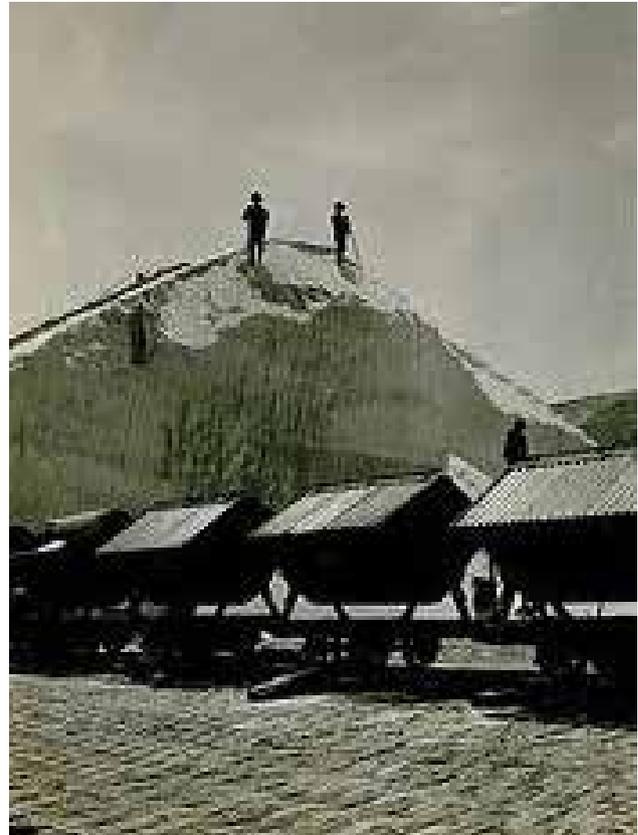




praktek produksi dan perdagangan garam yang dilakukan perusahaan swasta hanya menguntungkan beberapa orang saja. Hal ini bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menghendaki agar produksi yang penting bagi negara dan kepentingan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Dalam memori jawaban juga disebutkan, kualitas garam yang dihasilkan pihak swasta jauh di bawah kualitas garam yang dihasilkan oleh perusahaan milik pemerintah. Berdasarkan hasil laporan Kementerian Kesehatan, pegaraman swasta di pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat berbahaya karena wilayah tersebut merupakan sumber penyakit malaria. Selain mengantisipasi menyebarkan penyakit malaria, pemerintah juga berfokus pada upaya pencegahan penyakit gondok yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Untuk memberantas penyakit ini pemerintah menetapkan aturan untuk menyediakan garam briket beriodium.

Hasil kajian pemerintah terhadap sejarah menemukan fakta bahwa kebutuhan rakyat akan garam dapat dijamin sebaik-baiknya jika produksi dan penjualan garam diurus oleh instansi pemerintah. Hingga laporan ini diterbitkan, produksi garam nasional telah melebihi kebutuhan konsumsi garam di dalam negeri. Keberhasilan pemerintah dalam menyediakan garam murah bagi masyarakat, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti pedalaman Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi Utara, semakin meneguhkan pentingnya penguasaan garam oleh negara.



Pelaksanaan undang-undang No. 14 tahun 1952, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 66646/K tanggal 31 Maret 1953. Dalam lembar Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.390 disebutkan, pengusaha pegaraman swasta yang menempati bekas daerah Republik Indonesia Serikat (Perjanjian Renville), yang telah melakukan produksi garam sebelum tanggal 1 April 1953, diperbolehkan menjual seluruh hasil produksinya sampai tanggal 1 Januari 1954. Pengusaha garam swasta diwajibkan mendaftarkan luas lahan pegaraman yang dimilikinya kepada kantor kabupaten paling lambat tanggal 1 Juli 1953.

Sebagai kompensasi pelarangan kegiatan produksi garam oleh swasta, pemerintah memberikan ganti

rugi sebesar Rp.1000 untuk setiap hektare tanah pegaraman yang diusahakan. Pemberian ganti rugi hanya diberikan satu kali. Pembayaran kompensasi dari pemerintah kepada pengusaha dilakukan oleh Kepala Perusahaan Garam dan Soda Negeri atas permintaan Bupati. Pengusaha garam swasta berhak mendapatkan pembayaran 50 persen di tahap awal. Pemerintah akan membayar sisanya setelah lahan pegaraman yang mereka miliki diubah menjadi sawah dan tambak ikan.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka seluruh penguasaan produksi dan perdagangan garam di Republik Indonesia berada di bawah kendali Pemerintah dan dikelola oleh Perusahaan Garam dan Soda Negeri.

“

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka seluruh penguasaan produksi dan perdagangan garam di Republik Indonesia berada di bawah kendali Pemerintah dan dikelola oleh Perusahaan Garam dan Soda Negeri.

”

Berakhirnya Monopoli Garam

Berakhirnya masa monopoli garam di tangan pemerintah ditandai dengan terbitnya Undang-undang Darurat No.25 tahun 1957 (Lembaran Negara No.52/1957). Penghapusan monopoli terhadap produksi dan perdagangan garam ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 9 Agustus 1957. Semua undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat dicabut, termasuk undang-undang No. 14 tahun 1952 mengenai hak monopoli garam di tangan pemerintah.

Sejak diberlakukan tanggal 10 Agustus 1957, maka masyarakat Indonesia diizinkan kembali menggarap



lahan garam miliknya. Persyaratan mengenai pembuatan garam diatur dalam undang-undang. Pengajuan perizinan dilakukan paling lambat enam bulan setelah Undang-undang Darurat diberlakukan. Petani garam diizinkan memproduksi garam setelah mendapat surat dari Kepala Daerah setingkat Provinsi atau pejabat yang berkuasa di daerah tersebut. Kepala daerah atau pejabat yang mendapat kuasa dari pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menetapkan syarat-syarat mengenai luas lahan pegaraman, cara pembuatan garam, dan persyaratan lainnya yang disesuaikan dengan kepentingan umum.

Kepala daerah berhak mencabut surat izin apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemegang surat izin dengan pihak penggarap. Lokasi pegaraman rakyat harus berjarak minimal tiga kilometer dari pegaraman negara. Pengusaha dan petani garam harus membayar biaya perizinan yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah daerah. Biaya perizinan yang dibayarkan pengusaha dan petani garam diperuntukkan sebagai pendapatan daerah. Kepala daerah atau pejabat setempat diwajibkan membuat daftar perizinan pembuatan garam.

Pengusaha garam rakyat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah akan

didenda paling tinggi Rp.10.000 atau kurungan penjara paling lama tiga bulan. Pengusaha atau petani garam yang tidak mengajukan perizinan dalam kurun waktu enam bulan setelah Undang-undang Darurat ditetapkan akan didenda paling tinggi Rp.2.500 atau kurungan paling lama tiga minggu. Pengusaha garam rakyat yang ketahuan melanggar harus menyerahkan seluruh hasil produksinya untuk dijadikan barang bukti. Jika terjadi perlawanan, maka pemerintah berhak melakukan penyitaan secara paksa.

Untuk menjaga keamanan, Panglima Tentara dan Territorium V/Brawijaya selaku Ketua Perang atas Daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan instruksi nomor I.P2-1/I/1958. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 1958 ini menyebutkan, izin pembuatan garam rakyat di wilayah Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dari Karesidenan Madura akan diberikan dengan catatan lahan pegaraman berjarak tiga kilometer dari pegaraman negara. Persyaratan mengenai perizinan disusun oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, Komandan Militer Tertinggi, Kepala Polisi dan Pamongpraja, serta Kepala Perusahaan Garam dan Soda Negeri di Kalianget.

Dari Ekspor hingga Pengamanan Negara

Produksi garam pada tahun 1952 mencapai 328.000 ton. Sebanyak 500.000 ton telah disiapkan pemerintah



Republik Indonesia untuk menjaga ketersediaan garam nasional selama dua setengah tahun. Dalam laporan Kepala Kantor Penjualan Hasil Tambang Negeri kepada Kepala Kantor Pusat Perusahaan Garam dan Soda Negeri tanggal 20 November 1952, Indonesia menawarkan harga jual garam per ton berkisar dari USD7 hingga USD14 kepada Jepang. Melalui Japanese Monopoly, Jepang mampu membeli harga garam Indonesia dengan harga USD9 per ton dengan catatan garam tersebut memiliki kandungan NaCL sebesar 94 persen. Dalam arsip yang sama tercatat bahwa Jepang telah melakukan kontrak pembelian garam dengan kandungan NaCL 94-95 persen dengan harga USD9,30 per tonnya sebanyak 10.000 ton.

Sejak produksi dan perdagangan candu dilarang pemerintah Indonesia pada tahun 1949, Pabrik Tjandu milik PGSN dialihfungsikan sebagai pabrik pembuatan peti kayu dan cepuk-cepuk timah (tabon) pembungkus obat. Guna menghindari ketergantungan terhadap



ekspor, pemerintah menugaskan PGSN memproduksi tube untuk keperluan obat gosok gigi. Pada tahun 1953, PGSN mampu memenuhi 10 juta tube pembungkus pasta gigi Pepsodent dari PT Unilever.

Penambahan jumlah armada angkutan garam tidak luput dari perhatian PGSN. Pada tahun 1955, PGSN tercatat memiliki 16 kapal tarik bertenaga 80-1.000 PK. Kapal Cunia yang pada masa Jawatan Regie garam berjumlah 30 ditingkatkan menjadi 40 buah. Kapasitas kapal berbeda-beda, mulai dari 100-350 ton. Kapal Coaster yang sebelumnya hanya 1 buah, dalam lima tahun bertambah menjadi 14 dengan kapasitas mulai dari 100 hingga 1.600 ton.

Ketika Letnan Kolonel Ahmad Husein memproklamkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958, PGSN sebagai perusahaan milik pemerintah diminta

untuk membantu pengamanan negara. Mengusung Syafrudin Prawiranegara sebagai perdana menteri, PRRI mendapat bantuan dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Bergabungnya permesta dalam barisan PRRI, kedua kelompok ini disebut PRRI/Permesta.

Pemerintah melancarkan operasi militer yang diberi nama Operasi Merdeka untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan PRRI/Permesta. Operasi gabungan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto



Guna menghindari ketergantungan terhadap ekspor, pemerintah menugaskan PGSN memproduksi tube untuk keperluan obat gosok gigi. Pada tahun 1953, PGSN mampu memenuhi 10 juta tube pembungkus pasta gigi Pepsodent dari PT Unilever.



Hendraingrat. Pemerintah menggunakan kapal-kapal PGSN untuk mengangkut tentara ke daerah-daerah operasi di Sumatera dan Sulawesi. Selain membantu dalam perjuangan menumpas pemberontakan PRRI/Permesta, PGSN juga turut andil dalam pembebasan Irian Barat.

Pada tanggal 28 April 1958, setelah berhasil mengantar pasukan ke pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah, kapal KM Giliraja milik PGSN tenggelam setelah dibom pesawat tempur sewaan milik Permesta. Anak buah kapal yang gugur adalah Timbul Sari (masinis II), Emar (mandor mesin), Sahran P. Amsin (tukang minyak), Samiudin (tukang minyak), Sahidin (pelayan), dan Musaffak (kelasi).

Kabar mengenai tenggelamnya KM Giliraja membawa duka yang mendalam bagi Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT Garam, Wahyudi Badar Sungkowo. Salah satu kapten dalam pelayaran tersebut adalah saudaranya.

"Salah satu kaptennya itu saudara saya, kapten Rasyid namanya. Karena tidak ada kabar, keluarga menganggap ia sudah meninggal. Kami mengaji tahlilan dan di hari keempat puluh, tiba-tiba dia datang. Semuanya kaget dengan kedatangan beliau," kenang Wahyudi.



Babak baru perjalanan Perusahaan Garam dan Soda Negeri dimulai dengan diserahterimakan dari Departemen Keuangan ke Departemen Perindustrian pada tanggal 1 Januari 1959. Bersamaan dengan dialihkannya pembinaan PGSN dari Deprin ke Depkeu, Jabatan Kepala PGSN yang diemban Soewahjo Darmosarkoro digantikan oleh Eben Soebana. Pergantian Kepala perusahaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M/1959.



Perusahaan Negara Garam

Perubahan paling terasa bagi mantan Kepala Bagian Pembelian Garam Rakyat DKI Jakarta dan Jawa Timur, Pakkar Rusdianto, dari Perusahaan Garam dan Soda Negeri (PGSN) ke Perusahaan Negara Garam (PN Garam) adalah diberlakukannya penggunaan seragam kerja. Pakkar bergabung ke perusahaan pada tahun 1960, saat itu masih bernama PGSN. Berstatus sebagai pegawai harian, ia mengalami masa-masa transisi dari PGSN menjadi PN Garam.

Mayoritas masyarakat Madura, khususnya Kalianget, pada waktu itu berprofesi sebagai nelayan. Petani palawija jumlahnya terbilang kecil. Daerah Madura yang berada di pesisir pantai menjadikan profesi nelayan sebagai pilihan utama sebagai mata pencaharian. Perusahaan Garam dan Soda Negeri menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat yang tidak ingin menjadi nelayan. Menurut Pakkar, jumlah pekerja di pabrik briket Kalianget mencapai 3.000 orang dan di pabrik Krampon mencapai 1.500 orang. Jumlah ini belum ditambah dengan buruh musiman ketika masa panen garam yang berlangsung selama empat bulan.

Bagi pegawai harian seperti Pakkar, penetapan aturan menggunakan seragam kerja di lingkungan perusahaan



artinya peningkatan kesejahteraan bagi karyawan. Ia dan pekerja lainnya yang sehari-hari menggunakan baju, celana, dan sepatu hasil dari kantong pribadi, mendapat bantuan berupa dua pasang pakaian kerja dan sepatu. Seragam berwarna abu-abu tua dan biru, serta sepasang sepatu diberikan setiap tahun. Perubahan aturan ini sesuai dengan diubahnya status PGSN menjadi PN Garam pada tahun 1961. Perubahan status ini sesuai dengan Undang-undang nomor 138 yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 17 April 1961.



Dengan diberlakukannya undang-undang ini, perusahaan soda dan perusahaan garam dipecah menjadi dua: Perusahaan Negara Garam dan Perusahaan Negara Soda. Perubahan status juga mengubah struktur pimpinan di dalam perusahaan. Pucuk pimpinan yang sebelumnya dijabat oleh Eben Soebana berakhir pada Januari 1961. Eben digantikan oleh Toegijo Karjowinangun. Perubahan status juga mengubah pembinaan

perusahaan. PN Garam berada di bawah pembinaan Badan Pimpinan Umum (BPU) Kimia Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Tugas utama PN Garam sebagai bagian dari pelayanan masyarakat adalah memenuhi kebutuhan garam konsumsi, industri, dan pengasinan ikan. Pemimpin perusahaan bertanggung jawab dalam membenahan administrasi

perusahaan selama masa transisi status perusahaan dari PGSN menjadi PN Garam. Perusahaan harus terlibat dalam operasi militer penumpasan pemberontakan yang dilakukan PRRI/Permesta dan pembebasan Irian Barat. Keterlibatan PN Garam dalam pengamanan negara berupa pengakutan tentara dan logistik menggunakan kapal-kapal yang dimiliki PN Garam.

Dua tahun setelah pergantian status, perusahaan mengalami masa-masa yang sulit. Tahun 1962 kinerja perusahaan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan semakin menjamurnya usaha garam rakyat baik yang dilakukan perorangan maupun perusahaan swasta. Sejak berakhirnya monopoli, usaha garam rakyat meningkat pesat. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan produksi dan perdagangan antara garam produksi perusahaan pemerintah dengan swasta.

Kinerja perusahaan mulai membaik setelah mendapat suntikan dana

dari pemerintah yang diberikan melalui Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam). Kinerja perusahaan semakin meningkat dengan dilakukannya pembelian garam dari rakyat. Menurut Pakkar, tahun 1964, menjadi peristiwa pembelian pertama garam rakyat oleh perusahaan. Penetapan harga ditentukan oleh Departemen Perdatam. Garam yang diproduksi masyarakat diklasifikasi menjadi tiga kelas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Harga beli yang ditetapkan pemerintah disesuaikan dengan kualitas garam tersebut.

Pergantian pimpinan perusahaan terjadi pada tahun 1963. Toegjio Karjowinangun digantikan oleh Ir. J. Sadiman. Tugas utama Sadiman sebagai Direktur PN Garam yang baru tidak jauh berbeda dengan Toegjio, melayani kebutuhan masyarakat untuk garam konsumsi, industri, dan pengasinan ikan. Yang membedakan dengan periode sebelumnya, pada masa kepemimpinannya, Sadiman mendapat tugas membersihkan perusahaan dari personil yang terlibat dalam Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Seluruh karyawan dipindai (*screening*).

“

“Tugas utama PN Garam sebagai bagian dari pelayanan masyarakat adalah memenuhi kebutuhan garam konsumsi, industri, dan pengasinan ikan.”

”

Bagi karyawan yang kedapatan terlibat dalam G30S dikeluarkan dari perusahaan. Periode kepemimpinan Sadiman berlangsung selama tiga tahun, 1963-1965. Tahun 1964, PN Garam melakukan ekspor ke Jepang sebanyak 60.000 ton.

Pergantian pucuk pimpinan perusahaan garam kembali dilakukan. Ir. Sentot Soedjono Daroesslam menggantikan Sadiman pada tahun 1965. Peristiwa besar yang terjadi pada masa kepemimpinan Sentot adalah rasionalisasi karyawan. Sebanyak 6.551 orang dirumahkan. Pakkar yang kala itu sudah menjabat Kepala Kristalisasi Garam

“

Kinerja perusahaan semakin meningkat dengan dilakukannya pembelian garam dari rakyat. Menurut Pakkar, tahun 1964, menjadi peristiwa pembelian pertama garam rakyat oleh perusahaan.

”



di Pegaraman I Sumenep mengatakan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan sifatnya tidak mutlak. Artinya, karyawan diberi kebebasan untuk memilih ingin bertahan atau keluar dari perusahaan.

Gaji karyawan dengan level kepala bidang sebesar Rp185 ribu per bulan, sedangkan kebutuhan hidup dasar masyarakat per bulan berkisar antara Rp300-400 ribu. Dengan jumlah gaji yang sedikit tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam sebulan. Besarnya pesangon yang ditawarkan perusahaan menjadi alasan utama karyawan memilih berhenti dari pekerjaan. Dengan pesangon yang cukup besar, menurut Pakkar, masyarakat bisa memulai membangun usaha sendiri.

Rasionalisasi karyawan tidak hanya terjadi pada tahun 1969. Pada tahun 1972, perusahaan kembali melakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 2.599 orang. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar gaji karyawan tepat waktu, emolumen beras yang selalu terlambat, pelayanan pengobatan bagi karyawan dan keluarga yang tidak terurus,



serta rumah dinas yang tidak dipelihara, menjadi latar belakang dilakukannya rasionalisasi ini.

“Karyawan yang awalnya berjumlah ribuan, hanya tinggal 400-an orang,” kenang Pakkar.

Pasca pemutusan hubungan kerja kepada ribuan karyawan, perusahaan mulai merekrut kembali tenaga-tenaga potensial. Jika sebelumnya karyawan didominasi lulusan sekolah menengah atas atau sekolah tinggi mesin, maka perekrutan kali ini lebih banyak didominasi lulusan perguruan tinggi.

“

Pasca pemutusan hubungan kerja kepada ribuan karyawan, perusahaan mulai merekrut kembali tenaga-tenaga potensial. Jika sebelumnya karyawan didominasi lulusan sekolah menengah atas atau sekolah tinggi mesin, maka perekrutan kali ini lebih banyak didominasi lulusan perguruan tinggi.

”

Restrukturisasi Perusahaan

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 331/M/SK/VI/1972 tanggal 13 Juli 1972, kemudian disusul dengan SK nomor 520/M/SK/IX/1972 tanggal 6 September 1972, berisi pengangkatan R. Moch. Tajib sebagai Direktur Finek dan Ir. John Anwar sebagai

Direktur Produksi dan Teknik PN Garam. Kementerian Perindustrian kemudian mengeluarkan surat keputusan nomor 702/M/SK/XII/1972 tanggal 18 Desember 1972 tentang pengangkatan R. Soewondo sebagai Direktur Utama PN Garam. Ketiga surat keputusan mengenai perombakan struktur

pimpinan di dalam perusahaan bertujuan menyetabilkan kembali PN Garam.

Selain melakukan restrukturisasi organisasi perusahaan, pemindahan kantor pusat PN Garam yang sejak tahun 1961 berlokasi di Jalan Kebon Sirih 36 ke Kalianget,





Madura, pada tanggal 20 Januari 1973 merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi perusahaan kembali normal. Pemindahan kantor pusat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perindustrian Kimia nomor 008/D.J/Kpts/1973. Pemerintah juga merumuskan konsep Program Pembinaan Garam Nasional yang kemudian ditetapkan menjadi Pokok-pokok Program Pembinaan Garam Nasional oleh Direktorat Jenderal Perindustrian Kimia.

Rincian Pokok-pokok Program Pembinaan Garam Nasional terdiri dari peningkatan efektifitas dan produktivitas PN Garam. Pembinaan garam rakyat dilaksanakan melalui sub Proyek BIPIK Garam Rakyat dengan PN Garam sebagai penyumbang teknologi. PN Garam bertugas sebagai operasional produksi dan pemasaran garam beryodium dalam program yodisasi yang dilakukan pemerintah. PN Garam juga berperan dalam program stabilisasi stok nasional.

Untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas perusahaan, dilakukan renovasi lahan di pegaraman Sumenep. Dengan dilakukannya renovasi dan modernisasi lahan pegaraman, diharapkan terjadi peningkatan dalam produksi. Garam dipasarkan perusahaan harus sesuai dengan Standar Industri Indonesia. Menurut SII nomor 139/1976, kandungan Natrium Chlorida yang terdapat dalam garam minimal 98,5 persen. Magnesium maksimal

“ Untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas perusahaan, dilakukan renovasi lahan di pegaraman Sumenep. ”

0,6 persen, Calcium maksimal 0,10 persen, Sulfat maksimal 0,2 persen, dan air maksimal 4 persen.

Program sub Proyek BIPIK dilakukan dengan diberikannya pelatihan bagi petani garam dari seluruh provinsi yang di wilayahnya terdapat lahan pegaraman. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 1978 di Kalianget, Madura.

PN Garam juga memberikan contoh pembuatan garam di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Irian Jaya.

Meningkatnya kebutuhan konsumen akan garam mendorong terjadinya persaingan produksi dan perdagangan garam menjadi tidak sehat. Permintaan konsumen

terhadap garam murah dan sekadar asin saja menyebabkan para petani garam mengesampingkan kualitas dan lebih mengedepankan peningkatan produksi. Akibatnya, harga jual garam di pasaran menjadi tidak stabil. Selain itu, garam yang dikonsumsi masyarakat bernilai mutu rendah.

Untuk menghentikan persaingan tidak sehat dalam perdagangan dan menyediakan garam berkualitas untuk masyarakat, pemerintah menunjuk PN Garam sebagai pemegang stok garam nasional. Cara yang ditempuh pemerintah dengan membeli garam dari sentra-sentra produksi petani. Pembelian garam dilakukan melalui PN Garam. Penetapan harga beli diatur oleh pemerintah. Jika harga yang dipasarkan petani melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah, maka para petani dipersilakan menjualnya kepada pengusaha garam swasta. Jika harga yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan pemerintah, maka para petani dipersilakan menjualnya kepada PN Garam.



Setelah mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan pembelian garam rakyat, PN Garam mendirikan tujuh kantor pembelian garam rakyat. Kantor pembelian garam daerah Madura Timur didirikan di Kalianget. Sedangkan Madura Barat di Pamekasan, Jawa Timur di Surabaya, Jawa Tengah

di Pati, Jawa Barat di Cirebon, Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, dan kantor pembelian daerah Nusa Tenggara Barat didirikan di Bima. Pemerintah membangun gudang stok nasional di tiap-tiap daerah untuk menampung produksi garam yang telah dibelinya.

Yodisasi Garam Nasional

Departemen Kesehatan merilis hasil survei yang dilakukan di sejumlah daerah pada tahun 1974. Data yang didapat Departemen Kesehatan menunjukkan, 10 persen



masyarakat Indonesia terkena penyakit akibat kekurangan yodium. Sembilan persen dari penderita merupakan anak-anak berusia 10-14 tahun. Kekurangan yodium dalam tubuh dapat menimbulkan penyakit seperti gondok, kerdil, embisil, cacat kelahiran dan ber-IQ rendah.

Pencegahan meluasnya penyakit yang ditimbulkan karena kekurangan yodium dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan UNICEF (*United Nation Emergency Children's Fund*). Kebijakan pemerintah tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 1974 dengan dilakukannya penandatanganan kerja sama antara Indonesia – UNICEF dalam Master Plan Operation for A Programme of Service for Children in The Context of Young Human Resources Development in Indonesia tahun 1975-1979. Salah satu bentuk kerjasama di bidang *nutrition activities* ini adalah Program Yodisasi Garam.



Pemerintah menargetkan garam konsumsi beryodium setiap tahun mencapai 250.000 ton. Dalam rentang waktu lima tahun, PN Garam harus mampu memproduksi 1.250.000 ton garam beryodium.



Pemerintah menargetkan garam konsumsi beryodium setiap tahun mencapai 250.000 ton. Dalam rentang waktu lima tahun, PN Garam harus mampu memproduksi 1.250.000 ton garam beryodium. Garam yang dihasilkan harus mengandung minimal 90 persen Natrium Chlorida (NaCl) dengan kadar air maksimum 5 persen. Senyawa yodium yang digunakan adalah kalium yodat (KIO₃). Senyawa ini dipilih karena dikenal sebagai senyawa yang stabil. Setiap kilogram garam harus mengandung 40 miligram kalium yodat. Proses Yodisasi garam dilakukan dengan

cara drip system, garam diberi tetesan larutan kalium yodat dengan perbandingan kualitas 40 ppm (*part per million*). Penetapan dosis 40 ppm kalium yodat dengan toleransi 25 persen ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 88/Men.Kes/XI/1975 tanggal 15 November 1975.

PN Garam menggunakan 20 unit yodisasi untuk menghasilkan garam beryodium. Delapan unit di antaranya milik perusahaan dan sisanya merupakan bantuan dari UNICEF. Keduapuluh unit ini ditempatkan di Madura, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Lokasi-lokasi tersebut dilengkapi dengan laboratorium pengujian sebagai sarana pengawasan kualitas produksi.

Modernisasi dan Renovasi Pegaraman Madura Timur

Proyek Modernisasi dan Renovasi Pegaraman Madura Timur merupakan bagian dari program Pelita (Pembangunan Lima Tahun) pertama yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. Rehabilitasi lahan pegaraman di Kabupaten Sumenep ini mendapat pinjaman lunak (*soft loan*) dari Belanda. Renovasi yang dilakukan PN Garam tidak hanya meliputi lahan milik perusahaan, tetapi juga lahan-lahan pegaraman milik rakyat yang sudah dibebaskan pada tahun 1975.

Direktur Jenderal Industri Kimia mengajukan permintaan perluasan tanah kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui surat No.792/D.J/1974 tanggal 21 September 1974. Lahan yang dibutuhkan untuk proyek modernisasi seluas 4.100 hektare, termasuk lahan pegaraman milik masyarakat yang belum dikuasai oleh PN Garam. Lahan masyarakat ini nantinya akan diintegrasikan dengan lahan pegaraman milik PN Garam. Mengenai ketersediaan lahan, Dirjen Industri Kimia berharap provinsi Jawa Timur dapat menyediakannya paling lambat bulan Januari 1967.

Penetapan besaran ganti rugi dirumuskan oleh Panitia Perumus Harga Dasar Daerah Tingkat II Sumenep.



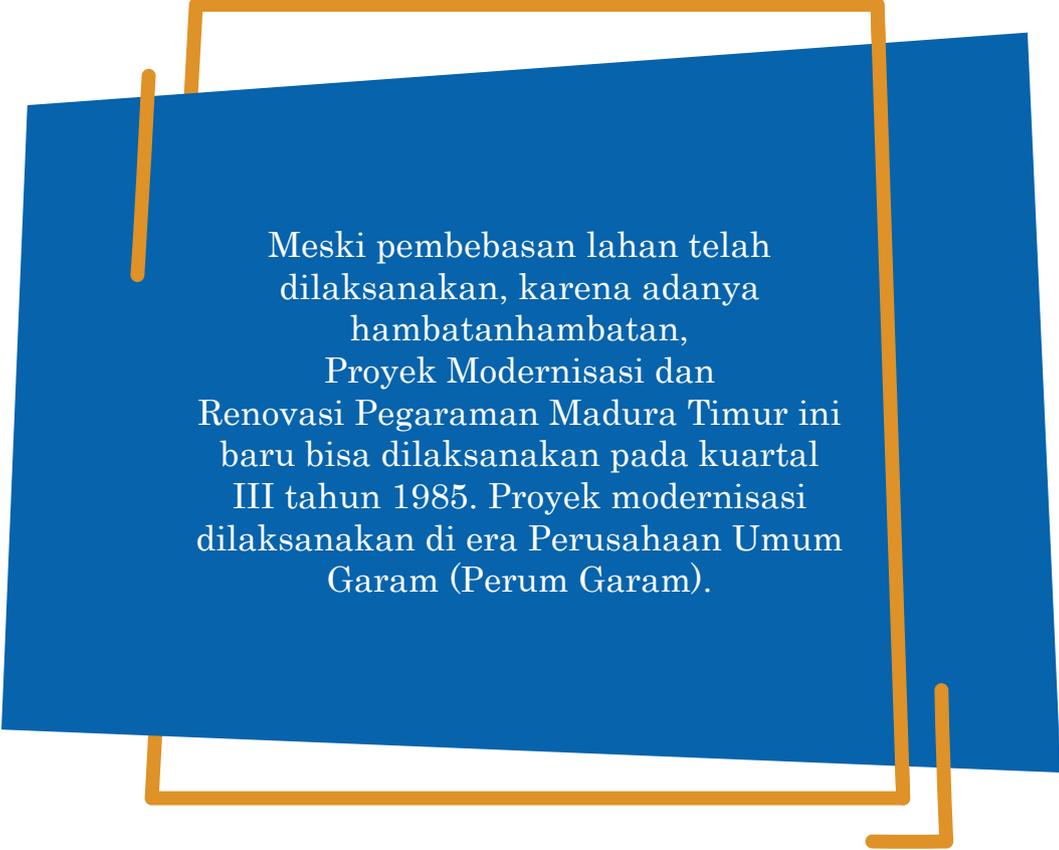
Panitia perumus terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sumenep, Ipeda Pamekasan, Kepala sub Direktorat Agraria Sumenep, DPU Seksi Sumenep, Camat Sumenep, Camat Saronggi, Camat Kalianget, Kasi Pendaftaran Tanah sub Direktorat Agraria Sumenep, dan dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep.

Penggantian ganti rugi tambak kelas I di area pegaraman Sumenep dan Nembakor dihargai Rp1.200.000 per hektare. Tambak kelas II yang berada di sekitar Teluk Gresik Putih dihargai Rp1.000.000 per hektare. Tanah rawa atau berbatu dihargai Rp400.000 per hektare. Tanah pasang surut dihargai Rp200.000 per hektare. Tanah Yayasan di Teluk Gresik Putih dihargai Rp500.000. Tanah yang rusak di daerah Z.W dan diokupasi oleh rakyat dihargai 50 persen dari harga sejenis. Tambak garam yang belum menghasilkan diberi ganti rugi sebesar 80 persen dari masing-masing jenis dan lokasi.

Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah didasari harga jual garam pada saat itu, berkisar Rp2-3 per kilogramnya. Harga 1 hektare tanah sama dengan harga 1 kilogram emas.

Meski pembebasan lahan telah dilaksanakan, karena adanya hambatan-hambatan, Proyek Modernisasi dan Renovasi Pegaraman Madura Timur ini baru bisa dilaksanakan pada kuartal III tahun 1985. Proyek modernisasi dilaksanakan di era Perusahaan Umum Garam (Perum Garam).





Meski pembebasan lahan telah dilaksanakan, karena adanya hambatanhambatan, Proyek Modernisasi dan Renovasi Pegaraman Madura Timur ini baru bisa dilaksanakan pada kuartal III tahun 1985. Proyek modernisasi dilaksanakan di era Perusahaan Umum Garam (Perum Garam).





Bagian IV
Transformasi dari
Perum Garam
menjadi PT Garam



Perusahaan Umum Garam



► Kantor PT Garam (Persero) di Surabaya.

Proyek Modernisasi dan Renovasi Pegaraman Madura Timur sudah dicanangkan sejak tahun 1975, namun pembangunan fisik baru terealisasi pada kuartal III tahun 1985. Proyek dengan tujuan meningkatkan produksi garam ini terlaksana setelah status perusahaan yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara Garam (PN Garam) menjadi Perusahaan Umum Garam (Perum Garam). Perubahan status dari PN Garam menjadi Perum Garam didasari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1981 tanggal 5 Desember 1981.

Belum terlaksananya program renovasi dan modernisasi pada waktu itu salah satunya disebabkan kesalahan perhitungan biaya pembangunan. Hasil uji kelayakan (*feasibility study*) menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek ini mencapai USD18.124.000. Setelah dilakukan perhitungan ulang oleh konsultan pada akhir tahun 1975, besaran biaya untuk proyek ini mencapai USD28.614.231. Kesalahan perhitungan disebabkan nilai mata uang Belanda lebih tinggi daripada



mata uang Amerika. 1 dolar Amerika Serikat pada waktu itu setara dengan 2,53 DFL (Gulden).

Rehabilitasi lahan pegaraman di kabupaten Sumenep bertujuan menghasilkan produk garam berkualitas tinggi. Sebagai perusahaan milik pemerintah, Perum Garam berkewajiban memenuhi kebutuhan garam bermutu tinggi untuk masyarakat. Ketiga lahan yang akan direnovasi, sebelumnya menghasilkan garam sebanyak 80.000 ton per tahun. Dengan dilakukannya renovasi ini diharapkan terjadi peningkatan produksi hingga mencapai 265.000 ton per tahun.

Area pegaraman yang akan direnovasi seluas 4.009 hektare, terdiri dari 3.167 hektare milik Perum Garam dan 824 hektare milik masyarakat. Pembebasan dan pemberian ganti rugi lahan milik masyarakat sudah dilakukan sejak tahun 1975.

Perubahan status menjadi Perum Garam tidak menghapus peran perusahaan sebagai bagian dari agen

perubahan di masyarakat. Penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat menjadi salah satu dasar pertimbangan dari proyek ini. Meningkatnya luas area pegaraman sejalan dengan semakin besarnya penyerapan tenaga kerja. Hasil uji kelayakan menunjukkan, akan terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 17,32 persen, dari 2.840 orang menjadi 3.332 orang. Dampak sosial lainnya adalah tumbuhnya sektor-sektor usaha penunjang seperti armada pengangkutan garam, kontraktor, leveransir, dan pergudangan.

Proyek renovasi bisa terlaksana setelah mendapat bantuan dari pemerintah Belanda sebesar DFL27 juta dan Rp10.814.894.540 dari pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan proyek ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Perum Garam dengan Akzo Zout Chemie b.v pada tanggal 15 Agustus 1983. Penandatanganan dilakukan setelah Menteri Perindustrian menerbitkan surat kuasa kepada Perum Garam pada tanggal 9 Agustus 1983. Nilai proyek *basic engineering*



Rehabilitasi lahan pegaraman di kabupaten Sumenep bertujuan menghasilkan produk garam berkualitas tinggi.

Sebagai perusahaan milik pemerintah, Perum Garam berkewajiban memenuhi kebutuhan garam bermutu tinggi untuk masyarakat.



design yang dikerjakan oleh Akzo Zout sebesar DFL635.000. Satu bulan setelahnya, pada tanggal 9 September 1983, Menteri Perindustrian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang dan Peralatan pemerintah, mengenai disetujuinya renovasi lahan garam senilai DFL25.800.000.

Perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah melalui Direktur Dana Investasi (DJMDN) dengan Perum Garam sebesar DFL27.000 diterbitkan pada tanggal 2 Mei 1984. Pada tanggal 5 Januari 1985, Menteri Perindustrian menerbitkan surat kuasa yang ditujukan kepada Direktur

Utama Perum Garam mengenai perjanjian pelaksanaan *detailed engineering* dan konstruksi antara Azko Engineering dengan kontraktor Indonesia. Nilai kontrak untuk proyek ini sebesar DFL25.165.000.

Biaya bimbingan teknis solarisasi garam di Madura Timur yang ditetapkan Azko Consultan sebesar DFL1.330.000. Perum Garam juga melibatkan konsultan lokal dalam proyek renovasi ini. Konsultan lokal yang mendampingi Perum Garam adalah DESERCO. Penandatanganan pelaksanaan jasa konsultan dilakukan pada tanggal 10 April 1985 dengan nilai kontrak sebesar Rp181.241.000. Pada tanggal yang sama, dilaksanakan pemasangan patok dan penghentian penggarapan garam pada lahan yang sudah dibebaskan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses *detailed engineering*.



Fase konstruksi Proyek Modernisasi dan Renovasi Pegaraman Madura Timur memakan waktu hampir tiga tahun. Proyek ini diselesaikan pada bulan Mei 1987. Uji coba operasi (*trial operation*) dilaksanakan pada tahun 1989. Lahan pegaraman yang sudah direnovasi mulai dioperasikan pada tahun 1990.

Direktur Utama PT Garam (Persero), Budi Sasongko mengatakan, renovasi yang dilakukan pada tahun 1985, nyatanya belum bisa meningkatkan produksi garam sampai hari ini. Bahkan desain lahan pegaraman yang digunakan waktu itu sudah tidak diikuti lagi. Ketika masih berstatus pegawai Penelitian dan Pengembangan (Litbang), ia pernah meneliti mengenai renovasi lahan ini. Dalam hasil penelitiannya, Budi menemukan ada beberapa hal yang tidak dituntaskan sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal.

Budi menjelaskan, dalam mendesain lahan pembuatan garam seluas 1.000 hektare, 20 persen digunakan untuk bozem, 60 untuk evaporasi (penguapan), 10-20 persen digunakan untuk kristalisasi. Pada renovasi sebelumnya, bozem tidak mencapai 20 persen, penataan evaporasi tidak maksimal, sehingga peningkatan produksi yang diharapkan tidak tercapai.

Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT Garam (Persero), Wahyudi Badar Sungkowo menambahkan, agar proses penguapan air laut bisa optimal, maka ketebalan lahan harus diatur. Penguapan air laut bisa efektif jika ketebalannya berkisar antara 20-25 sentimeter. Namun

mengatur lahan yang luasnya mencapai ribuan hektare bukan perkara mudah. Tidak meratanya elevasi lahan pegaraman menjadi kendala dalam meningkat produksi garam.

Wahyudi yang kala itu menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Pegaraman Sumenep, ikut mengukur lahan-lahan yang telah selesai dikerjakan kontraktor. "Ada yang elevasinya baik, ada yang elevasinya kurang baik. Ada yang memenuhi standar 25 cm, bahkan ada yang ketebalannya mencapai 50 cm. Dengan proses penguapan yang sama, tetapi ketebalannya berbeda-beda, maka kepekatannya pun menjadi berbeda."

Selain persoalan teknis, kendala non teknis pun turut mempengaruhi menurunnya jumlah produksi. Lahan pegaram milik Perum Garam berada di tengah-tengah



► Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko.

perkampungan, Desa Karang Anyar dan Desa Pinggir Patas. Masyarakat di kedua desa tersebut mayoritas bekerja sebagai petani garam. Lahan milik para petani garam berada di sisi luar pegaraman perusahaan. Posisinya yang berdekatan kerap menimbulkan gejolak di antara kedua pihak. Namun konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik.

Menurunnya jumlah tenaga kerja menjadi persoalan yang harus dihadapi perusahaan dari waktu ke waktu. Dulu, ketika masa panen berlangsung, masyarakat berbondong-bondong mendatangi perusahaan untuk meminta pekerjaan. Di Kalianget saja, dibutuhkan 2.000 orang pekerja yang terdiri dari buruh harian dan buruh borongan. Setiap tahun, jumlah pekerja semakin menurun. Menurunnya jumlah pekerja musiman secara langsung berdampak pada menurunnya produksi.

Kesulitan mencari tenaga kerja musiman sebetulnya bisa diatasi dengan dilakukan mekanisasi pada lahan garam. Namun sebagai perusahaan milik pemerintah hal tersebut tidak bisa dilakukan. Perusahaan mengemban tanggung jawab membangun misi sosial, salah satunya menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Perusahaan milik negara harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di wilayahnya. Dengan dilakukannya mekanisasi, otomatis kebutuhan tenaga kerja menurun. Menurunnya kebutuhan tenaga kerja akan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber pendapatan. Alasan ini yang membuat Perum Garam saat itu tidak melakukan mekanisasi ladang garam.

Selain mendesain ulang tata aliran air dan merenovasi lahan pegaraman, dilakukan perbaikan sarana-sarana pendukung produksi. Garam yang dipanen para pekerja dikumpulkan di pinggir area tambak garam. Garam curah yang disusun berbentuk segitiga ini kemudian diangkut ke pabrik menggunakan lori. Karena usianya yang sudah tua, penggunaan lori tidak lagi efektif, sehingga angkutan garam diganti menggunakan *dump truck*. Rel yang menghubungkan lahan pegaraman menuju pabrik dibongkar, diganti jalan makadam. Makadam adalah sebutan jalan yang disusun dari batu-batu. Meski tidak semulus jalan beraspal, makadam mampu dilalui *dump truck* dengan baik.

Pembongkaran gudang-gudang peninggalan zaman Belanda pun dilakukan. Konstruksi gudang pada zaman Belanda menggunakan kayu jati. Kayu jati umumnya dikenal tahan lama. Namun karena usianya yang sudah terlampau tua, untuk menghindari ambruknya gudang-gudang tersebut, maka gudang dihancurkan dan diganti dengan konstruksi baja. Gudang-gudang ini juga dilengkapi dengan *belt conveyor*. Alat ini untuk menggantikan pengangkutan garam yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia.

Meski belum berhasil meningkatkan produksi seperti yang direncanakan, Budi tidak ingin mengatakan renovasi yang dilakukan pendahulunya merupakan sebuah kegagalan. Baginya, yang terpenting saat ini adalah melakukan normalisasi dan optimalisasi lahan tersebut sehingga bisa meningkatkan produksi.



“Saya katakan normalisasi dan optimalisasi karena desainnya sudah direnovasi. Saya tidak kerja dari awal lagi. Mulai tahun ini, tata letak bozem sudah 20 persen. Proses normalisasi sudah berjalan 50 persen dan berhasil meningkatkan produksi,” ujar Budi saat diwawancarai di kantornya pada bulan Oktober lalu.

Pegaraman I Sumenep sebelumnya hanya menghasilkan 60-80 ribu ton per tahun. Setelah dilakukan normalisasi, Budi menargetkan Pegaraman I mampu menghasilkan produksi di atas 100.000 ton per tahun. Ketika melakukan kunjungan, produksi yang dihasilkan Pegaraman I Sumenep sudah di atas 120.000 ton.

“**Meski belum berhasil meningkatkan produksi seperti yang direncanakan, Budi tidak ingin mengatakan renovasi yang dilakukan pendahulunya merupakan sebuah kegagalan. Baginya, yang terpenting saat ini adalah melakukan normalisasi dan optimalisasi lahan tersebut sehingga bisa meningkatkan produksi.**”

Optimalisasi Lahan dan Penambahan Armada

Lahan pegaraman yang dimiliki Perum Garam tidak hanya berada di Madura Timur, tetapi juga berada di Madura Barat. Setelah renovasi Madura Timur selesai dilaksanakan, giliran lahan-lahan pegaraman di Pamekasan, Sampang, dan Gresik Manyar yang dibenahi. Optimalisasi di tiga wilayah ini dilakukan dengan cara merehabilitasi sarana pegaraman, sarana angkutan, pompa-pompa dan mesin-mesin penggeraknya, gudang sekaligus memperluas area halamannya, serta

memperluas area *brine storage* (penampungan air laut tua).

Guna meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan, tahapan perbaikan dilakukan pada pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Sebelum proses kristalisasi dimulai, bagian operasional harus menyediakan air laut tua dengan konsentrasi 25 Be dalam jumlah yang cukup. Untuk mengurangi kadar magnesium dan sulfat pada air





tua yang memiliki konsentrasi 14-25 Be, dilakukan penambahan kapur padam ($\text{CA}(\text{OH})_2$). Pemasangan jaring atau tirai di depan pintu air masuk meja kristalisasi dilakukan untuk menangkap *gips*.

Memasuki proses produksi, bagian operasional memastikan kristalisasi garam hanya dilakukan pada air laut tua yang konsentrasinya berkisar antara 25-28 Be dan tebal air mencapai lima sentimeter. Ketika proses memanen berlangsung,

maka harus dipastikan ketersediaan air mencukupi karena air tersebut juga digunakan untuk mencuci garam. Sesudah kristalisasi, penjemuran dilakukan minimal lima hari. Hal ini bertujuan menghilangkan air lindi induk yang terdapat di kristal garam. Selama proses pengangkutan dari area penjemuran menuju gudang harus bersih dari kotoran.

Pada pasca produksi, garam dari gudang kemudian diangkut menuju

pabrik pengolahan. Di dalam pabrik pengolahan dilakukan pencucian, pemecahan butir, pemisahan cairan menggunakan *sentrifuge*, pengeringan, pemberian *additive*, terakhir dilakukan pengepakan. Proses pengolahan dilakukan di dua pabrik, pabrik Gresik yang mampu memproduksi 50.000 ton per tahun dan Pabrik Kalianget yang memiliki kapasitas 100.000 ton per tahun.

Seperti pegaraman di Kalianget dan Nembakor, lahan-lahan

Sesudah kristalisasi, penjemuran dilakukan minimal lima hari. Hal ini bertujuan menghilangkan air lindi induk yang terdapat di kristal garam. Selama proses pengangkutan dari area penjemuran menuju gudang harus bersih dari kotoran.

pegaraman di Pamekasan, Sampang, dan Gresik Manyar yang sudah dioptimalisasi belum menunjukkan hasil yang baik. Sejak ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Garam pada tahun 2017, Budi Sasongko berfokus pada pembenahan perusahaan di segala bidang, termasuk optimalisasi lahan-lahan yang kurang produktif. Di masa kepemimpinannya, optimalisasi lahan pegaraman di Pamekasan dan Sampang sudah mulai dilakukan.

Dalam rencana renovasi lahan pegaraman Madura Timur sebetulnya tidak hanya mencangkup daerah Kalianget dan Nembakor saja, tetapi juga Gresik Putih. Namun proses renovasi tertunda pelaksanaannya. Lahan

pegaraman Gresik Putih baru mulai dilaksanakan pada tahun 1991 menggunakan dana internal perusahaan. Meski sudah dilakukan renovasi, sebagian lahan yang berada di Gresik Putih bukan hanya tidak produktif, tetapi dibiarkan terbengkalai.

“Lahan di Gresik Putih yang dulu ditukar guling tidak pernah dilakukan optimalisasi produksi. Bahkan sebagian dibiarkan menjadi laut. Saya akan membendung laut sepanjang 100 hektare. Optimalisasi ini akan dilakukan di dua tempat, Baban dan Kalimao,” ujar Budi.

Tidak hanya di Baban dan Kalimao, lahan seluas 300-400 hektare di Nagara Sindir dibiarkan tidak terurus. Menurutnya, jika dilakukan normalisasi dan optimalisasi, lahan seluas itu bisa meningkatkan produksi bagi PT Garam.

Mengenai armada angkutan garam, pada tahun 1984, Perum Garam mengajukan pembelian kapal baru kepada pemerintah. Armada angkutan garam yang dimiliki perusahaan sebagian besar sudah berusia tua sehingga tidak efisien di dalam pengoperasiannya. Selain itu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan melarang beroperasinya kapal-kapal niaga berusia tua. Kebijakan ini dikeluarkan melalui surat keputusan nomor 57/HK-404/Phb-84 tanggal 29 Maret 1984. Atas dasar inilah, perusahaan mengambil keputusan meremajakan beberapa kapal angkutan garam. Melalui proyek Caraka Jaya, Perum Garam

melakukan peremajaan empat buah kapal dengan sistem *leasing* kepada PT. PANN.

Rencana pembelian kapal oleh Perum Garam mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (MENKO EKUIN). Persetujuan ini berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan nomor 2040/377/Phbl tanggal 30 April 1984. Prosedur pembelian kapal dimulai dengan mengevaluasi studi kelayakan terhadap pembelian tiga buah kapal berkapasitas 3.000 DWT dan satu buah kapal berkapasitas 1.000 DWT. Evaluasi ini dilakukan secara bersama-sama antara Perum Garam, PT. PANN, dan Direktorat Jendel Industri Mesin dan Logam Dasar.

Koperasi Karyawan dan Yayasan Dana Hari Tua

Besarnya biaya hidup yang harus ditanggung karyawan setiap bulannya, mendorong para karyawan mengajukan pendirian koperasi kepada Perum Garam. Keinginan para karyawan disambut baik oleh direksi. Maka pada tanggal 27 Oktober 1978, Koperasi Karyawan Perum Garam (Kokargam) didirikan. Modal usaha Kokargam berasal dari iuran pokok, wajib, dan sukarela dari seluruh karyawan Perum Garam. Besarnya iuran pokok yang harus dibayar setiap karyawan senilai Rp.1000, sedangkan iuran wajib sebesar Rp.250. Mengenai iuran sukarela, seperti namanya, tidak ada aturan mengenai berapa jumlah yang harus dibayarkan karyawan.





Status badan hukum baru dimiliki Kokargam pada tanggal 2 Februari 1981. Dua tahun setelah berdirinya koperasi karyawan ini.

Pada masa awal pendirian, koperasi karyawan garam ini hanya memiliki dua unit usaha, simpan pinjam dan kredit barang. Untuk meningkatkan pendapatan, dilakukan perubahan tata kelola operasional koperasi. Maka pada tahun 1 Desember 1989, A Moestamin ditunjuk sebagai manajer Kokargam. Ia bertugas mengelola seluruh kegiatan usaha sekaligus membangun unit bisnis baru Kokargam. Perubahan tata kelola koperasi ini berhasil melahirkan tiga unit bisnis baru Kokargam, usaha pertokoan, bengkel, dan *cleaning service* dalam rentang waktu tahun 1990-1991.

Jika pendirian koperasi bertujuan menambah pemasukan bagi para karyawan, maka untuk jaminan masa tua, didirikan Yayasan Dana Hari Tua Perum Garam. Yayasan yang didirikan pada tanggal 6 Juni 1983, dibentuk untuk menjamin lancarnya pembayaran uang pensiun kepada karyawan yang telah habis masa kerjanya di perusahaan. Penyaluran dana untuk janda, serta anak yang ditinggalkan mantan pegawai perusahaan juga disalurkan melalui yayasan ini. Pada masa awal pendirian, aset yang dimiliki yayasan ini sebesar Rp1.023.690.167,03.

Jumlah iuran yang harus dibayarkan peserta jaminan hari tua sebesar 10 persen dari keseluruhan gaji yang diterimanya (*take home pay*) setiap bulan. Perusahaan mengeluarkan iuran sebesar 20,6 persen setiap bulannya yang disesuaikan dengan gaji karyawan yang bersangkutan. Aturan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 33/D/SK/II/1985 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 1985. Dalam pelaksanaannya, uang iuran bisa dikelola secara mandiri oleh yayasan atau diserahkan ke Perusahaan Asuransi milik negara.

Program dana pensiun tidak berlaku bagi direksi, pegawai negeri sipil, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diperbantukan di Perum Garam. Jaminan hari tua untuk direksi, PNS, dan ABRI disalurkan melalui program Tabungan Hari Tua. Jumlah iuran yang harus dibayarkan sama seperti iuran yang diberlakukan kepada pegawai perusahaan. Yayasan ini memberikan bantuan kepada karyawan dan keluarganya berupa hadiah dan bingkisan lebaran, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

Di Awal Pendirian PT Garam (Persero)

Badan-badan penampung didirikan sebagai wadah pengelompokan perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, badan-badan ini kemudian disatukan dalam sebuah institusi Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan milik Belanda yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Aceh, dinasionalisasi pemerintah republik Indonesia. Berawal dari 38 perkebunan tembakau, kemudian disusul

205 perkebunan dan pertanian, pada tahun 1960, 22 perusahaan kembali dinasionalisasi pemerintah. Semua perusahaan perkebunan dan pertanian ini dibawah naungan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang dibentuk pemerintah pada Desember 1957. Dalam perjalanannya, pengelolaan perusahaan di bawah PTPN I-IX.

Tidak hanya di sektor perkebunan, pemerintah mendirikan badan-badan penampung yang meliputi usaha di sektor perdagangan, perindustrian dan pertambangan, perbankan, serta listrik dan gas. Pada tahun 1973, pemerintah mendirikan Direktorat Persero dan Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara (PKPN) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sempat berganti nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara), organisasi setingkat Eselon II ini diubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada tahun 1993.

Pasca reformasi 1998, organisasi ini kembali diubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Sempat beberapa kali berganti nama, akhirnya pada kabinet Gotong Royong, didirikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) yang fungsinya mengelola seluruh perusahaan milik negara.



Sebagai perusahaan pelat merah, perjalanan PT Garam tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergantian badang pengelola perusahaan milik negara. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, status perusahaan garam, waktu itu bernama Jawatan Regie Tjandu dan Garam, di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI. Pembinaan perusahaan garam di bawah Kementerian Keuangan berakhir ketika status perusahaan berganti menjadi Perusahaan Negara Garam (PN Garam) pada tahun 1961. Pada periode ini, pembinaan PN Garam berada di bawah Badan Pimpinan Umum (BPU) Kimia Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Ketika berubah menjadi Perum Garam pada tahun 1981, pembinaan perusahaan di bawah Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar, Departemen Perindustrian. Pembinaan di bawah Departemen Perindustrian bertahan hingga status perusahaan menjadi PT Garam (Persero) pada tahun 1991. Perubahan dari Perum Garam menjadi PT Garam didasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1991.

Sejalan dengan perubahan status perusahaan, maka fungsi pimpinan di dalam organisasi perusahaan turut mengalami perubahan. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan tanggal 30 Juli 1991, jabatan Direktur Utama diisi oleh Ir. Muchji Rusnosuprpto. Dalam keputusan yang sama juga disebutkan komposisi direksi dan dewan komisaris perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan, modal dasar yang dimiliki PT Garam sebesar Rp200.000.000.000, yang terbagi ke dalam 200.000 lembar saham. Saham-saham ini diklasifikasikan menjadi dua, saham prioritas yang terdiri dari 40.000 lembar dan saham biasa sebanyak 160.000 lembar. Modal dasar tersebut kemudian disimpan pada kas persero.

Catatan Penting Periode 1991 – 2001

Area pegaraman milik PT Garam dibagi menjadi empat bagian. Pegaraman I Sumenep, Pegaraman II Pamekasan, Pegaraman III Sampang, dan Pegaraman IV Gresik Putih. Luas lahan dari keempat area pegaraman ini mencapai 6.000 hektare. Sejak tahun 1993, area Pegaraman IV Nembakor dilebur menjadi satu dengan area Pegaraman Sumenep. Pada tahun yang sama, Pegaraman V Gresik Manyar dinonaktifkan. Pada tahun 1997, Pegaraman VII diintegrasikan dengan Pegaraman Gresik Putih menjadi Pegaraman IV Gresik Putih.

Dalam peningkatan kesejahteraan karyawan, perusahaan memberikan beberapa fasilitas seperti tunjangan jabatan, tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya (THR) Idulfitri dan Natal, tunjangan pendidikan keluarga, serta tunjangan natura. Selain bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, para karyawan juga diberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas mereka. Pelatihan dilakukan

Pada masa Presiden Abdurrahmah Wahid (Gus Dur), pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2000, tentang penggabungan PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam.

secara rutin, baik di lingkungan perusahaan maupun ekstal perusahaan.

Pada tahun 1998, PT Garam mendapat suntikan dana pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1998 disebutkan, penambahan penyertaan modal Negara kepada PT Garam sebesar Rp31.484.711.227,94 (tiga puluh satu miliar empat ratus ribu delapan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen). Penyertaan modal ini diberikan dalam dua bentuk, berupa tunai dan barang. Dana tunai yang diberikan kepada PT Garam sebesar Rp19.575.546.298,40. Sedangkan penyertaan modal dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak sebesar Rp11.909.164.929,54.

Pada masa Presiden Abdurrahmah Wahid (Gus Dur), pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2000, tentang penggabungan PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam.



Dalam peningkatan kesejahteraan karyawan, perusahaan memberikan beberapa fasilitas seperti tunjangan jabatan, tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya (THR) Idulfitri dan Natal, tunjangan pendidikan keluarga, serta tunjangan natura. Selain bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, para karyawan juga diberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas mereka. Pelatihan dilakukan secara rutin, baik di lingkungan perusahaan maupun ekstral perusahaan.

PT. GARAM (PERSERI)





Bagian V

Menuju Bisnis Berkelanjutan

Perubahan untuk Masa Depan

Matahari belum tampak benar kala para pekerja memanen garam di tambak pegaraman Kalianget, Madura. Memanen garam dengan latar belakang matahari terbit merupakan pemandangan yang biasa pada masa panen berlangsung. Hilir mudik pekerja yang berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan kendaraan roda dua menjadi pemandangan yang tidak asing di Pegaraman I Sumenep pada akhir Oktober. Masa panen garam umumnya berlangsung selama empat bulan, dari Juli hingga awal

November. Aktivitas memanen garam dilakukan sejak pukul dua dini hari. Teriknya matahari di Kalianget, Madura, menjadi alasan para pekerja memilih bekerja pada dini hari.

“Kalau kamu ke area tambak garam pada siang hari tidak menggunakan penutup kepala dan menutupi seluruh area tubuh, bisa gosong kamu,” ujar Umam, staf Tata Usaha PT Garam.

Garam yang telah dipanen kemudian dikumpulkan di sisi tambak. Pukul sepuluh pagi, aktivitas memanen garam telah terhenti, digantikan para pekerja pengangkutan. Garam dibentuk dengan pola segitiga sebelum diangkut menuju gudang. PT Garam mengklasifikasi produksi garam menjadi empat, premium, ps, p, dan M. Sebagian garam yang dihasilkan dijual kepada perusahaan sebagai bahan baku, sebagian lainnya diproduksi di pabrik-pabrik pengolahan yang dimiliki perusahaan.

Produksi garam yang dihasilkan PT Garam (Persero) mencapai 350 ribu ton per tahun, 70 persen di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 1,4 juta ton per tahun. Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko mengatakan, kemampuan PT Garam dalam mensuplai kebutuhan garam nasional seperti konsumsi rumah



“PT Garam mengklasifikasi produksi garam menjadi empat, premium, ps, p, dan M. Sebagian garam yang dihasilkan dijual kepada perusahaan sebagai bahan baku, sebagian lainnya diproduksi di pabrik-pabrik pengolahan yang dimiliki perusahaan.”

menjadi perusahaan garam terbaik bukan hanya di dalam negeri, tetapi Asia Tenggara.

“Obsesi saya, PT Garam menjadi perusahaan produksi dan perdagangan garam terbaik di Asia Tenggara, kemudian mampu mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan garam dunia pada tahun 2023.”

Menurut Budi, untuk bisa mensejajarkan diri dengan perusahaan garam terbaik di dunia, tata kelola perusahaan yang selama ini berjalan harus diubah. Sejak zaman Belanda hingga tahun 2016, apa yang dilakukan PT Garam sebetulnya hanya pembudidayaan garam, pertanian garam. Visi PT Garam berfokus pada penyediaan bahan baku garam nasional. PT Garam harus

tangga, pangan, farmasi, dan industri murni, masih di bawah 17 persen. Sedangkan penyediaan bahan baku untuk industri mencapai 35 persen.

Jumlah produksi yang dihasilkan PT Garam berasal dari lahan pegaraman seluas 5.000 hektare. Masih jauh di bawah lahan pegaraman milik rakyat yang mencapai 25.000 hektare. Selain PT Garam terdapat 20 perusahaan yang memiliki prosesor pabrikaan besar di Indonesia. Persaingan industri garam di Indonesia sudah memasuki persaingan sempurna. Meski begitu, orang nomor satu di PT Garam ini berkeyakinan bahwa PT Garam mampu



melakukan transformasi di segala di bidang. Program utama yang digagasnya ketika ditunjuk sebagai Direktur Utama pada tahun 2017 lalu adalah mengubah budaya perusahaan (*corporate culture*).

Transformasi artinya mengubah tata kelola perusahaan dari cara-cara pertanian dan pembudidayaan yang sudah dilakukan sejak zaman Belanda menuju industri garam.

Dalam transformasi terdapat sistem pendukung yang disebut dengan *soft system* dan *hard sytem*. *Corporate culture* merupakan bagian dari *soft system*, di mana perubahan di dalam perusahaan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sesuatu hal yang biasa. Tanpa adanya kesadaran untuk berubah dari tiap-tiap individu di dalam perusahaan maka transformasi sulit dijalankan. Sebesar apa pun peran seorang pemimpin, sebagai *driver*, ia tetap kesulitan melakukan perubahan tanpa didukung oleh segenap insan di PT Garam.

Hard system dituangkan dalam bentuk peraturan dan standar operasional presedur (SOP) di dalam

perusahaan. Hal ini bertujuan menjaga transformasi tetap berjalan meski kursi pimpinan di dalam perusahaan berubah. Tanpa adanya aturan dan SOP yang baku akan menyebabkan program-program yang telah dibuat akan mendek jika terganti pergantian kursi pimpinan di dalam perusahaan.

Penyelarasan kedua sistem pendukung ini dikenal dengan *reinforcing*. *Ketika perubahan di dalam perusahaan telah dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan perangkat sistem manajemen telah dibuat, maka transformasi di dalam perusahaan lebih mudah dilaksanakan.*

Untuk mewujudkan terciptanya tranformasi di dalam perusahaan, sejumlah langkah besar telah ditempuh oleh PT Garam, baik dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia (*human capital*), pemanfaatan teknologi secara optimal, visi pembangunan yang berkelanjutan, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), hingga paradigma ramah mengenai lingkungan sosial dan lingkungan alam, tanpa harus melupakan aspek finansial bisnis.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kemajuan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pembentuknya, yaitu sumber daya manusia (SDM) di dalam perusahaan. Mengubah budaya perusahaan (*corporate culture*) artinya mengubah pola pikir

seluruh insan di dalam perusahaan bahwa perubahan merupakan hal yang biasa, bukan sebuah ancaman. Perubahan dalam sebuah perusahaan merupakan langkah adaptasi dengan situasi dan kondisi bisnis yang tidak menentu sehingga

perusahaan dapat terus bertahan. Perusahaan yang tidak beradaptasi akan tersingkir. Kondisi yang lebih buruk adalah kalah dari para kompetitor sehingga menyebabkan kebangkrutan.



Transformasi di dalam perusahaan tidak akan tercapai tanpa kerja sama seluruh SDM di dalamnya. Direktur utama dan direksi bertugas membawa perusahaan menuju ke arah pengelolaan yang baik. Sebagai *driver*, pemimpin bertugas menjadi motor penggerak perubahan di dalam perusahaan. Namun tanpa didukung oleh SDM, maka transformasi tidak akan berjalan. Transformasi yang dilakukan tanpa adanya resistensi

akan mengalami kemandekan sehingga menyebabkan berjalan di tempat. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk sebab kompetitor konsisten terhadap transformasi yang dilakukan di perusahaannya.

Pentingnya SDM bagi keberlangsungan bisnis perusahaan mendorong PT Garam menanamkan semangat pembelajar (*learning spirit*) di dalam setiap individu di dalam perusahaan. Para karyawan yang

memiliki jiwa pembelajar diharapkan terlibat aktif di dalam penciptaan, perolehan, dan transfer pengetahuan untuk menopang adaptasi perusahaan terhadap ketidakpastian ini. Dengan paradigma ini, maka setiap individu dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Seperti perusahaan yang tidak bisa beradaptasi akan gagal, maka karyawan yang tidak beradaptasi terhadap perubahan perusahaan akan tergeser oleh individu lainnya.





Dalam menjalankan roda perusahaan, sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas sangat penting bagi kemajuan perusahaan. PT Garam meyakini bahwa sumber daya manusia menjadi aset penting bagi perusahaan. Percepatan transformasi di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan adanya SDM yang mumpuni. Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko menyadari betul hal ini.

“Sejak saya dipercaya sebagai direktur utama, saya telah merekrut 100 orang *management trainee*. Mereka lulusan S1 dan D3 yang telah memiliki pengalaman bekerja. Tujuannya untuk mengubah *mindset* tadi,” ujar Budi.

Budi menambahkan, dua tahun sebelumnya, transformasi sulit dilakukan karena kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni. Pada periode 90-an, ketika kali pertama ia bergabung dengan perusahaan, dari total 3.000 karyawan di PT Garam, lulusan perguruan tinggi kurang dari 100 orang. Hingga tahun 2016, ketika ia menjabat sebagai direktur produksi, dari 350 karyawan, hanya 120 orang yang merupakan lulusan universitas, sisanya berasal dari sekolah menengah atas. Dengan kondisi seperti ini, baginya, sulit untuk melakukan transformasi.

Perekrutan 100 orang *management trainee* dilakukan secara bertahap dengan sistem *batch*. Dalam empat *batch* terpilih 100 orang dari puluhan ribu orang yang

melamar ke PT Garam. Proses perekrutan dilakukan dengan tes kelengkapan administrasi. Peserta yang lolos tahap ini kemudian mengikuti psikotes dan tes wawancara dengan *user*, kemudian wawancara dengan direksi. Setelah proses wawancara selesai, para pelamar kemudian menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan bukan sekadar formalitas saja, sebab siapa pun yang tidak memenuhi persyaratan tetap tidak bisa lolos dan bergabung dengan perusahaan. Para peserta yang lolos kemudian mengikuti *On Job Training* (OJT).

Selain merekrut tenaga potensial dari luar perusahaan, PT Garam memberikan pelatihan dan pendidikan bagi seluruh karyawan yang berada di lingkungan perusahaan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam perusahaan. Pelatihan Manajemen umum terdiri dari pelatihan Kriteria



Selain merekrut tenaga potensial dari luar perusahaan, PT Garam memberikan pelatihan dan pendidikan bagi seluruh karyawan yang berada di lingkungan perusahaan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam perusahaan.



Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Sistem Manajemen Mutu, Pelatihan Manajerial, dan Pengembangan Diri (*Leadership*). Pelatihan Keterampilan dan Teknis terdiri dari Pelatihan pemahaman proses produksi dan proses pengolahan, pelatihan sistem pergudangan, pelatihan sistem kearsipan dan tata usaha, pelatihan komputer dan teknologi informasi, Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pelatihan dasar-dasar audit.

PT Garam juga memberikan para karyawan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti berbagai pelatihan di luar perusahaan seperti seminar,

workshop, dan lokakarya. Pelatihan mengenai dunia usaha (pemasaran), ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), Penelitian dan pengembangan, keuangan, hukum dan pengembangan sumber daya manusia turut menjadi perhatian PT Garam untuk meningkatkan kapasitas karyawannya. PT Garam bahkan memberikan pendidikan persiapan purna tugas bagi karyawan yang menjelang masa pensiun.

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Divisi SDM dan Umum PT Garam, Jujuk Novi Rahayu mengatakan, pelatihan dan pendidikan yang diberikan perusahaan bertujuan mengasah kualitas sumber daya manusia dengan tetap menekankan pentingnya moral yang baik di dalam diri karyawan.

“Yang paling dibutuhkan perusahaan adalah pekerja yang memiliki integritas. Memiliki nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab demi memajukan perusahaan.” (Mediagaram, Mei 2018)

Beragam pelatihan yang digagas divisi SDM tidak hanya berkulat di dalam ruangan. Pelatihan juga dilaksanakan dengan kegiatan luar ruang, *outbound*. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong sikap inovatif dan menimbulkan kepercayaan diri para karyawan. Untuk mencapai hasil maksimal, pelatihan *outbound* dilakukan dua kali dalam setahun. Sedangkan pelatihan-pelatihan di dalam ruang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Divisi SDM mulai memperhitungkan posisi sebagai *talent management*. Kesenjangan usia antara karyawan

senior dan pegawai baru cukup jauh. Regenerasi mutlak diperlukan untuk mengantisipasi jurang pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki antara karyawan senior dengan junior. Dengan berakhirnya masa kerja para karyawan senior, maka roda perusahaan akan digerakkan oleh generasi yang lebih muda. Untuk menanggulangi hal ini, PT Garam memberikan pelatihan intensif kepada bagian operasional untuk mengasah kemampuan serta mempersiapkan diri untuk menempati posisi eselon I.

PT Garam berharap pelatihan dan pendidikan yang diberikan perusahaan dapat melahirkan bibit-bibit pemimpin baru sebagai penerus estafet perjuangan untuk memajukan perusahaan. “Kami menargetkan dalam satu tahun ke depan muncul bibit-bibit pemimpin baru. Jika sewaktu-waktu ada pergantian kepemimpinan, mereka sudah siap,” tutur Jujuk.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan PT Garam didukung dengan pemenuhan kebutuhan karyawan. Agar setiap individu di dalam perusahaan



dapat bekerja maksimal, kesejahteraan karyawan tidak bisa diabaikan. PT Garam menyadari betul pentingnya pemenuhan kebutuhan ini dengan melakukan penyesuaian gaji pokok secara bertahap. Selain gaji, karyawan PT Garam berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), bantuan kesejahteraan setiap awal tahun, insentif, bonus, fasilitas kesehatan berupa BPJS termasuk biaya pemeliharaan kesehatan untuk rawat inap dan *medical check up*, fasilitas pembinaan rohani, dan penghargaan masa kerja dan pangkat pengabdian kepada karyawan.



Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Garam meyakini kinerja perusahaan dapat meningkat dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern seperti keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Penerapan manajemen

modern sejalan dengan tujuan menciptakan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*). Guna mencapai tujuan itu, perusahaan berkomitmen terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).



Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peningkatan *corporate value* artinya meningkatkan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko terhadap terjadinya benturan antar kepentingan. Dengan meningkatnya *corporate value* dan deviden perseroan, maka akan menghadirkan kepuasan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction*).

Arah kebijakan perusahaan ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemegang saham tetap harus memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perusahaan dapat tercapai sejalan dengan diberlakukannya tata kelola perusahaan yang baik. Potensi untuk mengembangkan usaha sehingga meningkatnya nilai perusahaan pun akan dapat terpenuhi.

PT Garam telah melengkapi sejumlah perangkat penerapan CGC seperti Panduan Bagi Dewan Pengawas dan Direksi, *Board Manual*, Pedoman Tata Kelola Perusahaan/*Code of Corporate Governance*, Pedoman Perilaku/*Code of Conduct*, Piagam SPI/SPI Charter,

Piagam Komite Audit/Komite Audit Charter, Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran/*Whistle blowing*, dan Pedoman Gratifikasi.

Keseluruhan pedoman tersebut berpijak pada lima prinsip utama penerapan GCG yang dipegang teguh oleh PT Garam (Persero).

1. Transparansi

Penerapan asas transparansi dilakukan melalui komunikasi intensif yang dikelola secara profesional sehingga investor, pemegang saham, kreditur, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan perusahaan.

2. Akuntabilitas

Dengan menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan peran manajemen beserta seluruh unit di dalam perusahaan dan menerapkan sistem pengendalian serta pengawasan internal, PT Garam meyakini pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

3. Pertanggungjawaban

Dengan berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian, PT Garam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kemandirian

Kemandirian perusahaan dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta tekanan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kewajaran

PT Garam menempatkan keadilan dan kesetaraan secara berimbang (*equal treatment*) kepada seluruh pemangku kepentingan antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh perusahaan.

PT Garam membuka seluruh akses informasi kepada seluruh kepentingan sesuai dengan aspek transparansi yang terdapat prinsip utama GCG. Keterbukaan ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan yang bertujuan memajukan perusahaan. Namun, PT Garam tetap menerapkan aturan kerahasiaan dan membatasi informasi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.



Pengelolaan Perusahaan Berbasis Digital

Gedung ini dibangun pada tahun 1925. Belum pernah sekalipun dipugar. Tangga, jendela, ruang kantor masih sama seperti kali pertama dibangun. Prasasti yang menunjukkan tahun pembangunannya pun masih ada. Namun pemandangan dari jendela di lantai dua telah berubah. Bukan kapal-kapal berlogo perusahaan Belanda yang berlabuh di sana, melainkan kapal-kapal Indonesia yang siap mengangkut garam.

Bangunan yang menyimpan kisah masa lalu ini dulunya digunakan sebagai kantor sekaligus menara syahbandar untuk mengawasi pelabuhan Kalianget. Bangunan tua ini, kini digunakan sebagai penginapan untuk awak kapal yang menunggu selesainya muatan barang atau menunggu air pasang sehingga alur kapal yang hanya mencapai empat meter menjadi empat setengah meter, lalu kapal berkapasitas 8.000-10.000 ton bisa berlayar.



Selain gedung, terdapat empat meriam ditancapkan dalam posisi terbalik ke dalam tanah. Keempat meriam peninggalan zaman Belanda ini digunakan sebagai bolder untuk menambatkan tali bagi kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Kalianget, Madura. Untuk menunjang sarana pengangkutan garam melalui jalur laut, PT Garam memiliki Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2008, terminal khusus dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pokok perusahaan.

Kepala Bagian Terminal PT Garam (Persero), Hadi Purwanto mengatakan, di area TUKS terdapat tiga gudang. Gudang-gudang yang dulunya dinamakan gudang stok nasional ini secara keseluruhan mampu menampung 15.000 ton garam. Produksi garam dari pegaraman atau yang akan diangkut menggunakan kapal harus melewati timbangan yang berada di depan kantor terminal khusus milik PT Garam. Hasil timbangan kemudian dicetak untuk laporan ke perusahaan.

“Rencana ke depan, perusahaan akan menggunakan pelaporan berbasis teknologi informasi (TI), sehingga siapa pun bisa melihat jumlah barang yang masuk dan keluar. Direktur Utama dan para Direksi bisa langsung memonitor hanya dengan menggunakan telepon pintar,” ujar Hadi Purwanto.

Pengelolaan perusahaan berbasis digital mulai diterapkan PT Garam sejak tahun 2016. Pengembangan sistem teknologi informasi termasuk pengembangan perangkat

dan aplikasi dilakukan secara bertahap hingga tahun 2021. Penggunaan perangkat digital di dalam perusahaan bertujuan mendukung operasional antarunit di dalam perusahaan, termasuk memantau proses produksi, dan meningkatkan pelayanan perusahaan. Untuk mengintegrasikan seluruh kebutuhan direktorat yang berada di dalam perusahaan, PT Garam menggunakan *Enterprise Resource Planning* (ERP). Sistem ini disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibuat PT Garam.

“Aplikasi teknologi informasi (TI) yang efektif dan efisien dapat menjadi salah satu penunjang keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan dan pengembangan bisnis ke depan,” ujar Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko. (Mediagaram Mei 2018)

Penggunaan perangkat digital di dalam perusahaan bertujuan mendukung operasional antarunit di dalam perusahaan, termasuk memantau proses produksi, dan meningkatkan pelayanan perusahaan.

Budi menambahkan, di era penuh persaingan dan perubahan, menjalankan perusahaan dengan pendekatan teknologi informasi terintegrasi adalah sebuah keniscayaan. Di era VUCA (*Volatile, Uncertainly, Complexity, Ambiguity*), di mana perubahan-perubahan terjadi secara cepat, situasi yang tidak pasti, dan kompleks, serta ambigu, menuntut perusahaan beradaptasi terhadap perubahan. Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan akan menyebabkan perusahaan tersingkir, kalah dalam pertarungan dengan kompetitor. Agar bisa bertahap menghadapi berbagai situasi dan kondisi, maka perusahaan harus segera beradaptasi dengan melakukan perubahan, salah satunya dengan pengelolaan berbasis digital.

Tanpa didukung sistem Teknologi Informasi yang baik, perusahaan akan sulit menjalankan proses bisnis yang efektif dan efisien. Akibatnya, membuat daya saing perusahaan menurun. Penerapan sistem integrasi di semua unit memudahkan manajemen dalam memantau seluruh informasi yang ada di dalam perusahaan. Pengelolaan perusahaan pun menjadi lebih transparan.

Guna mendorong sinergi antar badan usaha milik negara yang telah digaungkan Menteri BUMN, Rini Soemarno, PT Garam menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sebagai mitra untuk mengembangkan teknologi ini. Uji coba perdana untuk modul produksi, *finance*, *warehouse*, dan *marketing* dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016.

Sarana yang baik tanpa didukung sumber daya manusia yang kompeten, hanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal. Mengingat pentingnya SDM yang kompeten untuk mengawal pelaksanaan proses bisnis berbasis digital, PT Garam melakukan berbagai pelatihan seperti, pelatihan ERP untuk pemograman dan administrasi database, jaringan Lan, web programing dan database menggunakan CI dan My SQL, network dan TPC/IP Fundamentals.



Tabel Modul Aplikasi *Enterprise Resource Planning*

No	Modul Unit	Ruang Lingkup
1	Human Resources	Employee Self Services (ESS): perjalanan dinas, cuti, absesnsi, reimbursment, klaim payroll (penggajian), data pegawai, dan jadwal kerja.
2	Produksi	Aktivitas peminihan Aktivitas kristalisasi Aktivitas pemungutan
3	Warehouse (pergudangan)	Terdiri dari semua aktivitas yang dilakukan dalam hal penyimpanan produk dan pengeluaran produk dari gudang
4	Sales (penjualan)	Pembuatan sales order (SO) Pembuatan SPJG (Surat Perjanjian Jual Garam) Pembuatan Invoice Pembuatan Delivery Order (DO)
5	Finance (Keuangan)	Budgeting, finance, dan akuntansi
6	Modul Report dan Dashbord	Modul pendukung dari modul-modul di atas

Modernisasi dan Inovasi Teknologi

Produksi garam sangat bergantung terhadap iklim. Sebagai negara tropis, Indonesia hanya memiliki dua musim, kemarau dan hujan.

Di Indonesia masa panen garam hanya berlangsung selama empat bulan, dari Juli hingga awal Agustus.

Berbeda dengan Indonesia, klimatologi terbaik untuk memproduksi garam dimiliki Australia. Negara kangguru tersebut memiliki waktu memproduksi garam selama 11 bulan. Iklim di Cina mendukung produksi di negara tersebut selama sembilan bulan, sedangkan India selama tujuh bulan.

Dalam analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dilakukan PT Garam, iklim Indonesia ditempatkan sebagai kelemahan. Selain iklim, tantangan terbesar datang dari para kompetitor. Perusahaan-perusahaan garam di Indonesia telah lebih dahulu menggunakan prosesor pabrikan besar untuk mengolah garam. Namun peluang menjadi perusahaan garam terbaik di Indonesia, bahkan Asia Tenggara masih terbuka lebar. PT Garam memiliki kekuatan yang tidak dimiliki perusahaan lainnya, menjadi satu-satunya perusahaan garam di Indonesia yang memiliki lahan pegaraman. Dengan memiliki cabang di 12 provinsi memungkinkan PT Garam menyalurkan distribusi ke seluruh daerah di Indonesia.

“PT Garam akan menggunakan berbagai teknologi agar produksi garam tidak hanya mengandalkan matahari di



musim kemarau, tetapi tetap bisa berproduksi di musim hujan,” ujar Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko.

Penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi garam telah dilakukan PT Garam sejak masih berstatus sebagai Jawatan Regie Garam. Pada tahun 1951, PT Garam menggunakan *solivap green* untuk mendorong peningkatan produksi. Cairan dari tepung berwarna hijau tua ini disebarkan di beberapa bidang pegaraman. Penggunaan *solivap green* berhasil meningkatkan produksi sebesar 18 persen. Berkat penggunaan cairan ini, produksi garam mencapai 480.00 ton, 100.000 ton

lebih besar jika dibandingkan dengan produksi tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 1941.

Pada tahun 2011, PT Garam melakukan penelitian terhadap manfaat geomembrane dalam mempercepat proses kristalisasi garam. Geomembrane merupakan lapisan lembar *high density polyethylene* (HDPE) berupa plastik tebal yang dihamparkan pada lahan garam. Lapisan anti air (*waterproof*) ini menjadi pembatas antara tanah dan air laut tua yang dialirkan dari kanal-kanal ke tambak garam. Geomembrane berfungsi mempercepat penguapan (*reservior*) air laut sehingga proses kristalisasi menjadi lebih cepat dari sebelumnya.





Menggunakan geomembrane ternyata cukup ampuh untuk mendongkrak produksi. Penggunaan geomembrane berhasil meningkatkan pertumbuhan produksi garam berkualitas premium hampir 100 persen pada tahun 2014.



Penggunaan geomembrane di seluruh tambak garam yang dimiliki perusahaan sejak tahun 2012. PT Garam menggelontorkan uang sebesar Rp50 miliar untuk penerapan teknologi geomembrane ini.

Menggunakan geomembrane ternyata cukup ampuh untuk mendongkrak produksi. Penggunaan geomembrane berhasil meningkatkan pertumbuhan produksi garam berkualitas premium hampir 100 persen pada tahun 2014. Berbeda dengan tahun sebelumnya, produksi garam premium maksimal mencapai 29.000 ton. Direktur Produksi PT Garam waktu itu, M. Zainal Alim mengatakan, hingga Agustus 2014, PT Garam berhasil memproduksi garam premium sebesar 53.000 ton.

“Peningkatan produksi garam premium memungkinkan industri pengolahan pangan maupun industri farmasi membeli garam dari PT Garam. Perusahaan garam Refina membeli garam untuk diolah menjadi garam konsumsi, sedangkan PT Kimia Farma untuk kebutuhan farmasi,” ujar Zainal Alim. (Bisnis.com/17 Agustus 2014)

Zainal Alim menambahkan, pada tahun sebelumnya, produksi garam yang dihasilkan lebih banyak didominasi kualitas dua dan tiga. Harga jualnya pun cukup rendah, hanya Rp700 per kilogram di wilayah Jawa Timur. Harga garam premium yang dipatok PT Garam untuk Kimia Farma sebesar Rp1.000 per kilogram. Peningkatan produksi sejalan dengan peningkatan penjualan. Hal ini ditandai dengan pemesanan garam premium sebanyak 50.000 ton per tahun dari produsen garam Refina.

Produksi garam dapat meningkat jika masa panen garam dapat diperpanjang. Untuk memungkinkan produksi garam di musim hujan, PT Garam menerapkan uji coba teknologi *tunnel* dan *prism* pada tahun 2017. Metode rumah garam tunnel dan prisma bertujuan meminimalisir ketergantungan terhadap cuaca. Dengan adanya rumah garam, butir-butir hujan tidak lagi jatuh ke area tambak dan menggagalkan proses kristalisasi garam. Uji coba penggunaan tunnel dan prisma di lahan seluas 200 hektare dilakukan PT Garam bekerja sama dengan PT Anta Tirta Karisma.

Inovasi yang dilakukan PT Garam tidak hanya sebatas menggunakan tunnel dan prisma saja. Untuk

meningkatkan produktivitas dalam proses panen, PT Garam mulai melakukan mekanisasi di tambak garam dengan menggunakan *hand tractor*.

“Modelnya menyerupai traktor tangan untuk sawah, tapi bagian bawahnya menggunakan karet lembut agar tidak merusak meja garam yang sekarang dilapisi dengan geomembrane,” terang Direktur Produksi PT Garam, Hartono. (Industry.co.id/22 Juli 2018)

Hartono menambahkan, diberlakukannya mekanisasi di tambak-tambak garam akan menciptakan efisiensi di dalam proses panen. Satu meja garam yang awalnya dikerjakan 10 orang, dengan menggunakan *hand tractor*, satu meja garam cukup dikerjakan satu orang saja sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan jauh lebih produktif. Mekanisasi di lahan pegaraman dilakukan perusahaan untuk mensiasati semakin berkurangnya tenaga kerja, khususnya tenaga kerja musiman.

Pengembangan alat yang dilakukan secara mandiri oleh PT Garam nantinya akan diproduksi massal dengan bekerja sama dengan PT Bharata.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi garam dari ladang pegaraman, PT Garam berupaya meningkatkan produksi garam olahan dengan membangun dua pabrik di Gresik, Jawa Timur. Kedua pabrik ini rencananya akan dibangun pada tahun 2019. Pabrik pertama diperuntukkan untuk memproduksi garam konsumsi, sedangkan pabrik kedua untuk menghasilkan

garam *refinery*. Garam *refinery* merupakan garam olahan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan industri seperti industri makanan.

Pembangunan dua pabrik ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara PT Garam dengan China Salt Industry Cooperation (CNSIC). CNSIC merupakan badan usaha milik pemerintah Cina di bidang garam. Penjajakan kerja sama antara PT Garam dengan perusahaan garam terbesar di Cina ini sudah dilakukan sejak Agustus 2018. Menurut Budi Sasongko, terdapat tiga skema kerja sama yang bisa dilakukan antar dua BUMN ini. Orang nomor satu di PT Garam ini mengatakan, kerja sama akan menasar di bidang teknologi dan pelatihan.

PT Garam akan mengadaptasi teknologi yang dimiliki perusahaan CNSIC dalam hal peningkatan panen, perlakuan sisa air tua paska panen, dan pergudangan (*stockpiling*). Dalam hal pelatihan, CNSIC akan mengirimkan perwakilan





ke Madura dan Kupang untuk memberi pelatihan kepada karyawan PT Garam. PT Garam pun akan mengirimkan karyawan ke pusat riset milik CNSIC di Cina.

Kapasitas produksi kedua pabrik dirancang 200.000 ton per tahun. Dengan dibangunnya dua pabrik baru, PT Garam berharap mampu memproduksi garam sebesar 100.000 ton per tahun. Pembangunan dua pabrik ini menjadi harapan baru bagi Indonesia agar bisa terlepas dari ketergantungan terhadap impor. Selain itu, dengan kapasitas yang besar, garam yang dihasilkan para petani garam mampu diserap lebih banyak oleh PT Garam.

Benchmarking yang dilakukan PT Garam kepada perusahaan Cina ini setelah melakukan penelitian dan pertimbangan yang panjang. Cina merupakan produsen garam terbesar di dunia yang mampu menghasilkan 58 juta ton per tahun. Dalam satu tahun, CNSIC mampu memproduksi 18 juta ton garam, sebagian besar berasal dari sumur garam (tambang garam). Negara Tirai Bambu ini memiliki empat sumber komoditas garam, air laut, sumur garam, danau garam, dan teknologi vakum *salt brine* yang memungkinkan memproduksi garam dengan mengolah air laut langsung di dalam pabrik.

"Ada dua sumber daya yang akan kami tingkatkan melalui kerja sama ini, sea salt dan penelitian mengenai sumur garam. Insyaallah tinggal izin kepada Deputi dan pemegang saham mengenai kerja sama bidang teknik untuk teknologi garam ini," ujar Budi.

Hilirisasi Produksi Garam

Tata kelola perusahaan berbasis pertanian (*farming*) menjadikan PT Garam lebih berfokus pada peningkatan produksi. Hasil produk kemudian dipasarkan melalui skema kerja sama *bussines to bussines* (B to B) antara PT Garam dengan perusahaan pengolahan. Produk yang dipasarkan PT Garam umumnya merupakan garam curah untuk kebutuhan bahan baku. Transformasi perusahaan ditandai dengan

perubahan pola produksi dan pola distribusi (*channel of distribution*). Jika sebelumnya PT Garam berupaya meningkatkan produksi yang sebagian besar dipasarkan dengan metode *bussines to bussines* (B to B) untuk kebutuhan bahan baku pabrik, *market* yang disasar PT Garam kini lebih kepada masyarakat, *Bussines to Customer* (B to C).



"Kami mengubah *mindset*, kalau dulu fokusnya pada produk, sekarang fokusnya pada *market*. Karena itu *channel of distribution* kami ubah. Distribusi yang dilakukan tidak hanya sampai lini dua, tetapi sampai agen." ujar Budi.

Produk yang dipasarkan PT Garam tidak lagi sebatas garam karungan, tetapi juga untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Garam LoSoSa dan Segitiga G merupakan produk unggulan yang dimiliki PT Garam.

Telah sejak lama PT Garam berperan dalam memenuhi

kebutuhan garam konsumsi yang baik bagi masyarakat. Pada era sebelumnya, sesuai instruksi pemerintah, PT Garam menghasilkan produk garam beriodium. Garam Segitiga G merupakan garam produksi yang diproses dengan menggunakan teknologi pengolahan yang menjamin higienitas produk dan kandungan yodium yang cukup. Selain berguna untuk menambah lezat makanan, garam Segitiga G dapat membantu mencegah terjadinya penyakit gondok, kretin dan penurunan IQ.

Dewasa ini, masyarakat Indonesia cenderung mengalami Over Sodium/Natrium yang mengakibatkan hilangnya



“

"Kami mengubah *mindset*, kalau dulu fokusnya pada produk, sekarang fokusnya pada *market*. Karena itu *channel of distribution* kami ubah. Distribusi yang dilakukan tidak hanya sampai lini dua, tetapi sampai agen."

”

keseimbangan sodium-Potassium di dalam tubuh. Guna menanggulangi masalah ini, PT Garam menghadirkan garam LoSoSa. Garam LoSoSa dapat memelihara kestabilan tekanan darah, menghambat pengeroposan tulang, menyerap alkohol dan kafein dalam tubuh dan mencegah serangan jantung mendadak.

PT Garam juga memproduksi bahan baku pembuatan minuman isotonik yang disebut Bittern. Bittern merupakan cairan pekat yang diperoleh dari hasil limbah pabrik garam. Pada proses produksi, mineral yang tidak ikut mengkristal menjadi cairan. Cairan ini mempunyai konsentrasi tinggi seperti magnesium (Mg), Natrium (Na) dan calcium (Ca).

Dengan diubahnya tata kelola produksi, maka produksi yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. PT Garam sedang berupaya untuk menghasilkan lima produk baru untuk menambah varian produk garam LoSoSa dan Segitiga G.

“Dari dulu banyak sekali investor yang datang kepada saya, namanya PT Akan karena hanya akan saja, tidak pernah ada realsisasinya. Kalau PT Garam serius, buktikan kepada saya, Agustus sudah harus panen.”

► Lorem ipsum onet, quaerernam, qui velicia si non eic totatium qui





Harapan Baru di Timur Indonesia

Tantangan itu datang dari Bupati Kupang, Ayub Titu Eki kepada perwakilan PT Garam, Wahyudi Badar Sungkowo. Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT Garam (Persero) ini menghadap Bupati Kupang untuk membicarakan pengembangan industri garam di Nusa Tenggara Timur. Deklarasi mengenai pengembangam industri garam di NTT telah digaungkan sejak tahun 2010. Kala itu, Republik Indonesia dipimpin oleh Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tanggal 21 Februari 2010, SBY melakukan kunjungan kerja di Kupang untuk meresmikan gong perdamaian. Dalam peresmian tersebut, tercetus untuk mengembangkan NTT sebagai wilayah produksi garam.

Pemerintah pusat membentuk tim pencari lahan potensial untuk produksi garam. Tim terdiri dari Kementerian Perindustrian, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT Garam. Proyek pengembangan industri garam di NTT tidak berjalan mulus. Ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan proyek ini tersedat. Hingga pergantian Presiden pada tahun 2014, di

mana Soesilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Joko Widodo, proyek ini masih belum bisa berjalan. Sampai tahun 2015, kepastian mengenai lahan pegaraman belum bisa didapat.

Tak kunjung mendapat kepastian, maka pada tahun 2016, atas inisiatif direksi PT Garam, Wahyudi menemui Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, untuk membicarakan pengembangan lahan pegaraman di Kupang. Provinsi NTT, menurut Wahyudi, memiliki potensi yang sangat besar untuk produksi garam. Riset mengenai potensi lahan telah dilakukan pemerintah pusat di mana Wahyudi turut terlibat di dalamnya. Meski memiliki potensi yang besar, tidak serta merta lahan-lahan tersebut dapat digarap. Sebagian besar lahan tersebut merupakan tanah adat. Kondisi ini salah satunya yang menyebabkan proyek yang digagas sejak 2010 selalu tersendat.

Setelah berdiskusi dengan Bupati Kupang, penjajakan dengan kepala adat-kepala adat pun dilakukan. Dari hasil pertemuan tersebut, didapatkan kesepakatan mengenai perizinan penggarapan garam di lahan seluas 304 hektare dengan mekanisme sewa. Proyek perluasan lahan pegaraman menggunakan dana internal perusahaan PT Garam. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Bupati Kupang, Ketua-ketua adat, dan PT Garam dengan masa konsesi selama 30 tahun.

Pembuatan lahan pegaraman dilakukan pada bulan Mei 2016. Pengerjaan ini dilakukan pada siang dan malam. Dalam rentang waktu tiga bulan, lahan seluas 304

“

Setelah berdiskusi dengan Bupati Kupang, penjajakan dengan kepala adat-kepala adat pun dilakukan. Dari hasil pertemuan tersebut, didapatkan kesepakatan mengenai perizinan penggarapan garam di lahan seluas 304 hektare dengan mekanisme sewa.

”



hektare berhasil dijadikan lahan pegaraman. Iklim panas di Kupang yang berlangsung delapan hingga sembilan bulan ditambah dengan salinitas air laut mencapai 4 Be, merupakan potensi besar dalam hal produksi garam. Lahan pegaraman di Timur Indonesia ini juga dilengkapi dengan geomembrane seperti yang digunakan di pegaraman Madura.

Sesuai dengan janji kepada Bupati Kupang, maka pada bulan Agustus, lahan-lahan pegaraman telah menghasilkan kristalisasi garam pertama. Panen garam perdana di desa Bipolo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dilakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2016. Keberhasilan panen perdana di NTT menjadi harapan baru bagi PT Garam. Pangkal soalnya, produksi garam di Madura saat itu mengalami penurunan drastis akibat adanya badai El Nina.

“Panen perdana berhasil mencapai 300 ton. Dalam waktu dekat, panen selanjutnya diperkirakan akan mencapai 1.200 ton,” ujar Direktur Utama PT Garam, Ahmad Budiono. (Kontan.co.id/1 Desember 2016)

Keberhasilan PT Garam memproduksi garam di NTT menjadi mercusuar industri garam di kawasan Indonesia Timur. Hal ini mendapat respos positif dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil dengan diberikannya lahan seluas 225 hektare di Kupang untuk dijadikan lahan pegaraman.

“Acara panen perdana didatangi oleh 10 menteri Republik Indonesia. PT Garam telah berhasil membangun industri garam di NTT. Hal ini pun kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta,” ujar Wahyudi.

Memuliakan Lingkungan, Memuliakan Manusia

Di sepanjang area pegaraman I Kalianget, Sumenep, tidak terlihat aktivitas pekerja mamanan garam siang itu. Jam menunjukkan pukul sebelas lewat tiga puluh menit. Hanya pekerja pengangkutan garam yang terlihat sedang mengumpulkan garam dari area-area tambak. Teriknya

matahari diselingi angin menebarkan hawa panas ke sekujur tubuh. Membuat kaus lebih mudah basah dengan keringat. Tidak jauh dari area pegaraman, terdapat sebuah rumah milik petani garam. Area pegaraman milik PT Garam memang bersisian dengan tambak petani garam sekaligus pemukiman warga.



Petani yang telah bertani garam puluhan tahun ini bercerita mengenai keberhasilan panen besar pada tahun 2017. Hasil panen tahun lalu merupakan panen terbaik bagi Suwarno selama menjadi petani garam. Jika biasanya ia hanya berhasil memproduksi garam sebanyak 50 ton, produksinya meningkat menjadi 100 ton pada akhir masa panen 2017. Bendahara Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras) ini mengatakan, keberhasilan peningkatan produksi tidak terlepas dari bantuan geomembrane yang diberikan PT Garam.

"Kalau biasanya kami mengolah air garam selama 30 hari baru menghasilkan kristal, dengan menggunakan geomembrane, dalam waktu dua minggu sudah jadi garam. Bahkan, walaupun umurnya baru dua hari sudah bisa diambil," ujar Suwarno.

Pemberian geomembrane kepada petani garam merupakan bagian dari program Bina Lingkungan yang dilakukan PT Garam. Bantuan yang diterima paguyuban petani sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Suwarno mengingat kali pertama diberi bantuan berupa alat-alat pertanian garam pada tahun 2003. Secara berkala bantuan diterima para petani garam dari PT Garam melalui paguyuban petani. Perras sendiri terdiri dari 20 orang petani yang secara keseluruhan memiliki luas lahan pegaraman 20 hektare.

"Geomembrane yang diberikan tebal sehingga bisa bertahan bertahun-tahun. Masyarakat sangat terbantu sekali. Yang biasanya tidak punya uang, dengan

peningkatan produksi, jadi pegang uang," ucap Suwarno sambil tertawa.

PT Garam sepenuhnya menyadari bahwa menempatkan lingkungan dan masyarakat, sebagai bagian dari para pemangku kepentingan dalam tanggung jawab sosial perusahaan turut menentukan tumbuh kembangnya perusahaan. PT Garam sebagai entitas bisnis perusahaan negara tidak hanya mementingkan keuntungan semata, melainkan juga turut berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial di mana perusahaan menjalankan operasinya.

Kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat yang dibentuk dalam program Bina Lingkungan dan Program Bantuan Sosial terdiri dari bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dan rangka pengetasan kemiskinan.

Selain Program Bina Lingkungan dan Bantuan Sosial, PT Garam meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan merupakan salah satu aspek keberhasilan perusahaan. Program peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar beroperasinya PT Garam diwujudkan dalam Program Kemitraan. Program kemitraan merupakan upaya PT Garam dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui program ini, PT Garam memberikan

bantuan berupa pinjaman lunak kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergerak di berbagai bidang seperti perdagangan, peternakan, kerajinan, dan makanan.

Bantuan kemitraan yang menysasar pengusaha kecil di lingkungan perusahaan sangat dirasakan manfaatnya, salah satunya oleh Luluk Faiqotul Himmah. Pengrajin batik Madura ini merasa sangat terbantu dengan diberikan modal usaha.

“Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang digulirkan PT Garam berupa bantuan peminjaman modal kepada pengusaha kecil sangat membantu sekali. Selama ini kami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha,” ujar Luluk.

“Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang digulirkan PT Garam berupa bantuan peminjaman modal kepada pengusaha kecil sangat membantu sekali. Selama ini kami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha,” ujar Luluk.

Komitmen PT Garam untuk bertumbuh dan berkembang bersama masyarakat tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan pendanaan. Peran PT Garam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar juga dilakukan dengan pendampingan program kewirausahaan. Dalam mendampingi pengrajin batik Madura, PT Garam membantu sampai tahap proses pengembangan produksi, termasuk transfer pengetahuan mengenai penggunaan metode pewarnaan alami yang ramah lingkungan. Tujuan dari bantuan yang diberikan PT Garam kepada pegiat usaha kecil tidak sekadar memiliki usaha saja, tetapi membantu mendorong peningkatan omzet mereka sehingga usaha yang mereka miliki dapat berkembang dan menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat lainnya.



Komitmen PT Garam untuk bertumbuh dan berkembang bersama masyarakat tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan pendanaan. Peran PT Garam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar juga dilakukan dengan pendampingan program kewirausahaan. Dalam mendampingi pengrajin batik Madura, PT Garam membantu sampai tahap proses pengembangan produksi, termasuk transfer pengetahuan mengenai penggunaan metode pewarnaan alami yang ramah lingkungan.



Profile

PT Garam (Persero)

Nama Perusahaan:

PT Garam (Persero)

Status Perusahaan:

Badan Usaha Milik Negara

Pembentukan Perusahaan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Akta Pendirian:

No.8 tanggal 2 Januari 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, SH, sebagaimana sesuai dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.14 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, SH, Notaris di Surabaya.

Modal Dasar:

Modal dasar PT Garam (Persero) ditetapkan sebesar Rp2.400.000.000 (dua triliun empat ratus miliar rupiah)

Komposisi Kepemilikan Saham:

100 persen milik Negara Republik Indonesia

Kegiatan Bisnis Utama Sesuai Anggaran Dasar:

Produksi dan Pemasaran Garam

Kantor Pusat PT Garam (Persero)

Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep, Madura 69471
Telepon: (0328) 662416

Kantor Administrasi PT Garam (Persero)

Jl. Arief Rahman Hakim No.93 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telepon: (031) 5937578-82

Faksmili: (031)5937583

Email: info@ptgaram.com

Website: www.ptgaram.com

Visi

Menjadi perusahaan industri garam yang berkualitas dunia

Misi

- Menjadi produsen garam bahan baku dan derivatnya, serta garam olahan berkualitas dunia untuk memenuhi kebutuhan nasional
- Berkomitmen menjaga pasokan produk secara berkesinambungan
- Menjamin kepuasan konsumen dan pemangku kepentingan

Budaya Perusahaan

1. Kerja Keras.
Kerja keras merupakan budaya perusahaan yang terarah untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dan optimal.
2. Kerja Cerdas.
Kerja cerdas merupakan usaha yang terarah untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan pengetahuan di bidang teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan prestasi perusahaan.

3. Kerja Ikhlas.

Kerja ikhlas adalah upaya terarah untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan kesucian hati, serta bekerja bukan untuk diri sendiri melainkan bagi sesama, termasuk menjadi bermanfaat bagi sekitar sebagaimana peran BUMN untuk negeri.

Tata Nilai Perusahaan

1. Integritas.

Membangun budaya kerja keras sebagai ladang

amal serta senantiasa profesional, efisien dan produktif.

2. Profesional

Kemampuan dan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan program kerja perusahaan.

3. Inovasi

Memacu dan menumbuhkembangkan gagasan-gagasan baru yang kreatif dan tepat guna untuk memberikan nilai tambah bagi **stakeholder**.

Produk PT Garam

Garam Bahan Baku

Garam bahan baku biasa disebut garam kasar atau garam **krosok**. Garam bahan baku merupakan garam yang belum mengalami proses pengolahan. Produksi garam kasar sebagian diproses menjadi garam industri dan garam konsumsi.

Garam Segitiga G

Garam Segitiga G merupakan garam olahan yang diproses menggunakan teknologi pengolahan yang menjamin higienitas produk dan kandungan yodium yang cukup. Selain berguna untuk menambah lezat makanan, garam Segitiga G dapat membantu mencegah terjadinya penyakit gondok, kretin dan penurunan IQ.

Garam LoSoSa

Garam LoSoSa dapat memelihara kestabilan tekanan

darah, menghambat pengeroposan tulang, menyerap alkhohol dan kafein dalam tubuh dan mencegah serangan jantung mendadak. PT Garam memproduksi garam LoSoSa sebagai upaya dalam memberikan solusi terhadap terjadinya **over sodium/natrium** yang banyak dialami masyarakat Indonesia. Kelebihan **over sodium/natrium** dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan sodium-Potassium di dalam tubuh.

Bittern

PT Garam juga memproduksi bahan baku pembuatan minuman isotonik yang disebut Bittern. Bittern merupakan cairan pekat yang diperoleh dari hasil limbah pabrik garam. Pada proses produksi, mineral yang tidak ikut mengkristal menjadi cairan. Cairan ini mempunyai konsentrasi tinggi seperti magnesium (Mg), Natrium (Na) dan calsium (Ca).

Area Pegaraman PT Garam (Persero)

Luas area 5.740 hektare

- Sumenep I 2.620 hektare dengan kapasitas produksi 200.000 ton per tahun.
- II seluas 640 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 50.000 ton per tahun.
- Pamekasan 980 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 100.000 ribu ton per tahun.
- Sampang 1.100 hektare dengan kapasitas 100.000 ton per tahun.
- Bipolo 400 hektare dengan kapasitas produksi 36.000 ton per tahun.

Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

- Pelabuhan Terminal Khusus Kalianget, Sumenep
- Pelabuhan Terminal Khusus Camplong, Sampang.

Gudang PT Garam

- Pegaraman Sumenep I: 35 unit
- Pegaraman Sumenep II: 6 unit
- Pegaraman Pamekasan: 15 unit
- Pegaraman Sampang: 19 unit
- Pelabuhan Terminal Khusus Kalianget: 22 unit
- Pelabuhan Terminal Khusus Camplong: 11 unit
- Cabang Niaga Seluruh Indonesia: 60 unit.

Kantor Wilayah Pemasaran PT Garam (Persero)

Kantor Wilayah Pemasaran	Alamat
Sumatera I Nanggroe Aceh Darussalam Bagansiapiapi, Sumatera Utara	Jl. Pendidikan Sehai 84, Medan Telp: (061) 6616394 Email: grm_smt@medan.wasantara.net.id Email: bangsar_sumut@ptgaram.com
Sumatera II Sumatera Barat Riau Bengkulu	Jl. Jenderal Sudirman 59 A, Padang Telp: (0751) 27593 Fax: (0751) 27593 Email: grm_smb@telkom.net Email: bangsar_sumsel@ptgaram.com

Jl. Masjid Raya 7, Pekanbaru, Riau
Telp: (0761) 21160
Fax: (0761) 21160
Email: grm_sumsel@telkom.net
Email: bangsar_sumsel@ptgaram.com

Sumatera III

Jambi
Sumatera Selatan
Lampung
Bangka Belitung

Jl. Aji Gathmir 4, Ilir, Sei Rendang, Palembang
Telp: (0711) 352285
Fax: (0711) 313974
Email: grm_sumsel@telkom.net
Email: bangsar_sumsel@ptgaram.com

Jl. Udang Garuntung, Tanjung Karang, Lampung
Telp: (0271) 482988
Fax: (0271) 482988
Email: grm_imp@lampung.wasantara.net.id
Email: bangsar_lampung@ptgaram.com

Sulawesi I

Sulawesi Utara
Gorontalo

Jl. Walanda Maramis KM 9 No.60, Maumbi, Manado
Telp: (0431)814243
Fax: (0431) 846520
Email: grm_mnd@telkom.net
Email: bangsar_sulut@ptgaram.com

Kalimantan I

Kalimantan Barat

Jl. Teuku Umar 10-A, Pontianak
Telp: (0561) 34328
Fax: (0561) 34328
Email: grm_klb@telkom.net
Email: bangsar_kalbar@ptgaram.com

Kalimantan II

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Jl. Basuki Rahmat 21, Samarinda

Telp: (0541) 742053

Email: grm_klm@telkom.net

Email: bangsar_kaltim@ptgaram.com

Komplek Pergudangan Palapa C-13 Jl. Gubernur H. Subardjo, Basirih,
Banjarmasin.

Telp: (0511) 442053

Email: grm_kls@telkom.net

Email: bangsar_kalsel@ptgaram.com

Jawa I

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jl. Sunan Drajat 44, Rawamangun, Jakarta Timur

Telp: (021) 4894884

Fax: (021) 4755569

Email: grm_jkt@telkom.net

Email: bangsar_jabar@ptgaram.com

Jawa II

Jawa Timur

Jawa Tengah

DIY Yogyakarta

Bali

Jl. Arif Rahman Hakim 93, Surabaya

Telp: (031) 5937578-82

Fax: (031) 5937583

Email: grm_jatim@telkom.net

Email: bangsar_jatim@ptgaram.com

Jl. Gowongan Kidul 51, Yogyakarta

Telp: (0274) 512091

Fax: (0274) 512091

Email: grm_jateng@telkom.net

Email: bangsar_jateng@ptgaram.com

Jaringan Pemasaran

Jaringan Pemasaran			
DKI Jakarta	Banda Aceh	Denpasar-Bali	Gorontalo
Cirebon	Pekanbaru	Kupang	Ternate
Cilacap	Padang	Pontianak	Ambon
Semarang	Bangka	Samarinda	Jayapura
Yogyakarta	Palembang	Banjarmasin	
Surabaya	Belitung	Manado	
Madura	Bandar Lampung	Makassar	

Struktur Organisasi PT Garam (Persero)

Dewan Komisaris PT Garam (Persero)

Eniya Listiani Dewi, Komisaris Utama

Eniya Listiani Dewi merupakan pejabat aktif di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Perempuan kelahiran Magelang, 14 Juni 1974, ini menempati posisi Deputi Kepala Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi di BPPT. Ia bergabung dengan PT Garam (Persero) sejak 29 Desember 2017 sebagai Komisaris Utama.

Karyono Supomo, Komisaris

Karyono Supomo memiliki pengalaman sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia. Pria kelahiran

Cicalap, 21 April 1951, ini menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Garam (Persero) sejak 29 Desember 2017.

Sabar Wicaksono, Komisaris

Sabar Wicaksono tercatat sebagai pegawai aktif di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pria kelahiran Yogyakarta, 22 Juli 1968, ini menempati posisi Kepala Bidang Usaha Industri Agri dan Farmasi II b di KemenBUMN. Bergabung dengan PT Garam (Persero) sejak 29 Desember 2017 sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Cholili Ilyas, Komisaris

Cholili Ilyas saat ini masih aktif di Jawa Pos Radar Madura dan Jawa Pos Radar Bromo. Pria yang lahir pada 15 Desember 1954, ini bergabung dengan PT Garam (Persero) sebagai Anggota Dewa Komisaris sejak 22 Oktober 2015.

Direksi PT Garam (Persero)**Budi Sasongko (Direktur Utama PT Garam)**

jiwa pembelajar menjadi bagian tidak terpisahkan dari Budi Sasongko. Sederet gelar akademik dan profesi melengkapi nama Direktur Utama PT Garam (Persero) ini. Budi menamatkan pendidikan strata satu Jurusan Akuntansi Universitas Widya Gama pada 1987. Tidak hanya satu gelar akademik saja, ia memiliki *double degree* dengan menempuh pendidikan Jurusan Hukum Universitas Narotama, Surabaya. Di universitas yang sama, Budi melanjutkan pendidikan master di jurusan hukum dan bisnis

Setelah mengantongi gelar magister hukum, Pria kelahiran Blitar, 17 Agustus 1963, ini tak menyurutkan semangatnya untuk belajar. Budi menempuh pendidikan Profesi Akuntan dan Profesi Notaris di Universitas Andalas, Padang pada 2013. Di perguruan tinggi ini pula, ia melanjutkan program doktor jurusan ekonomi.

Sepertihalnya belajar, perjalanan kariernya pun terus menanjak. Budi mengawali kariernya di PT Garam sebagai Kepala Wilayah Pemasaran Sumatera Barat pada

2009. Posisi ini ia lakoni hingga tahun 2014. Berbagai tugas baru ia dapati, mulai dari Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Pemasaran, hingga menempati posisi Kepala Biro Penelitian, Pengembangan, dan Manajemen Risiko.

Karier Budi seolah tak berbendung. Februari 2016 menjadi babak baru dalam perjalanan karier Budi sebagai salah satu pucuk pimpinan perusahaan. Ia mendapat amanah menjalankan fungsi Direktur Produksi di PT Garam. Jabatan itu pun harus kembali ia letakkan pada September 2017. Ia meletakkan jabatan tersebut untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai Direktur Utama PT Garam.

Anang Abdul Qoyyum (Direktur Keuangan)

Kiprah Anang Abdul Qoyyum di perusahaan milik negara terbilang cukup panjang. Rekam jejak perjalanan kariernya di perusahaan berpelat merah bermula ketika ia menjabat sebagai Kepala Divisi Umum, PKBL, dan PTR di PT Perkebunan Negara (PTPN) XI pada 2014.

Pria kelahiran Jombang, 24 Desember 1959, ini kemudian menempati posisi sebagai Kepala Divisi Pemasaran hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Keuangan PTPN XI pada 2015. Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Islam Indonesia ini pun mendapat tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan mengampu jabatan Direktur Utama PT Nusantara Sebelas Media. Jabatan ini ia laksanakan dalam rentang waktu 2016 hingga pertengahan Juni 2017.

Anang kemudian menjadi bagian dari PT Garam (Persero) dengan menempati kursi Direktur Keuangan pada 21 Juni 2017.

Hartono (Direktur Operasi)

Gelar Sarjana Teknik, Hartono raih setelah menamatkan studinya di jurusan Teknik Elektro di Politeknik Institute Teknologi Surabaya pada 1994. Hartono kemudian melanjutkan pendidikan masternya di bidang Teknik Elektro di kampus yang sama pada 1999.

Pria kelahiran Surabaya, 15 Mei 1972, ini menjadi bagian dari PT Garam (Persero) sejak tahun 2005. Kariernya dimulai dengan menempati posisi sebagai staf MIS pada Biro Keuangan dan Akuntansi. Dari seorang staf pada biro keuangan, karier Hartono terus menanjak hingga menempati posisi sekretaris perusahaan. Posisi ini kemudian ia lepaskan untuk mengambil peran lebih besar lagi di PT Garam sebagai Direktur Operasi. Hartono dipercaya mengisi posisi ini pada 26 September 2017.

Edward Hariandja (Direktur Pengembangan)

Di Universitas Diponegoro, Edward Hariandja menempuh pendidikan strata satu jurusan Ekonomi Manajemen pada 1990. Tidak butuh waktu lama bagi pria kelahiran Semarang, 16 Mei 1964, ini untuk memutuskan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selesai meraih gelar sarjana, Edward kemudian menempuh program MBA di Program Wijawiyata Manajemen di PPM School of Manajemen, Jakarta.

Dengan latar belakang pendidikan di bidang manajemen, Edward dipercaya mengisi Kepala Divisi SDM dan Umum di PT Garam (Persero) pada 2016. Ia kemudian dipercaya mengisi jabatan Direktur Pengembangan PT Garam pada September 2017.

